

**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN STRATEGI  
PENGEMBANGANNYA DALAM MENINGKATKAN  
POTENSI EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN  
LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**ANISTIA ALVIA**

19 0401 0154

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

**ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DAN STRATEGI  
PENGEMBANGANNYA DALAM MENINGKATKAN  
POTENSI EKONOMI DAERAH DI KABUPATEN  
LUWU UTARA**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Syariah (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



**IAIN PALOPO**

**Oleh**

**ANISTIA ALVIA**

19 0401 0154

**Pembimbing:**

**Jibria Ratna Yasir, S.E.,M.Si**

**IAIN PALOPO**  
**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2023**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Peneliti yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Anistia Alvia  
NIM : 19 0401 0154  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 24 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Anistia Alvia  
NIM. 19 0401 0154



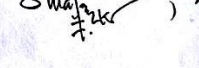
# IAIN PALOPO

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Anistia Alvia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0154, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 Miladiyah bertepatan dengan 20 Safar 1445 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Palopo, 18 September 2023


### TIM PENGUJI

- |                                       |                   |   |
|---------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI | Ketua Sidang      | (  )   |
| 2. Dr, Fasiha, M.EI                   | Sekretaris Sidang | (  )  |
| 3. Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si      | Penguji I         | (  ) |
| 4. Umar, SE., M.SE                    | Penguji II        | (  ) |
| 5. Jibria Ratna Yasir, SE., M.Si      | Pembimbing        | (  ) |

Mengetahui :

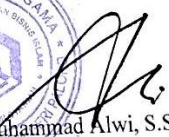
Rektor IAIN PALOPO  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
NIP. 19820124200901 2 006

Ketua Program Studi  
Ekonomi Syariah



  
Muhammad Alwi, S.Sy., M.EI  
NIP. 19890715201908 1 001

# IAIN PALOPO

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(اما بعد)

Alhamdulillah, segala puji syukur peneliti penjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara”** setelah melalui proses yang panjang.

Salawat serta salam dihanturkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam bidang ekonomi syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Peneliti menyadari bahwa dalam penyelesaian penelitian skripsi ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun dengan ketabahan, ketekunan dan keikhlasan yang disertai dengan do'a, bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moril dari berbagai pihak, sehingga Alhamdulillah skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta Bapak Jumari dan Ibu Asmiati yang selalu mendoakan dan mendukung saya dalam proses penyusunan skripsi ini, baik secara moril maupun

secara materil. Begitu banyak pengorbanan yang telah diberikan kepada peneliti, sungguh peneliti sadar tidak mampu untuk membalas semua pengorbanannya, hanya do'a dengan ketulusan hati yang dapat peneliti berikan, semoga senantiasa berada dalam limpahan kasih sayang dan perlindungan Allah.swt.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi, tempat peneliti menimba ilmu pengetahuan.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo, dalam hal ini Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI.,M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, M.EI, Wakil dekan bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Muzayyanah Jabani, S.T., M.M dan Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A sebagai Wakil dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Muhammad Alwi, S.Sy., M.SI selaku Ketua program studi Ekonomi Syariah dan sekretaris program studi Ekonomi Syariah Ibu Hardianti Yusuf, S.E.Sy., M.E, beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam

penyelesaian skripsi.

4. Pembimbing Utama, Ibu Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dengan tulus dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Penguji I Bapak Abdul Kadir Arno, SE., M.Si dan Penguji II Bapak Umar, SE., M.SE yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun bagi penulis selama penyusunan skripsi.
6. Bapak Dr. Mujahidin, Lc., M.E.I selaku dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan penyusunan skripsi ini.
8. Kepala UPT Perpustakaan, Bapak Abu Bakar, S.Pd., M.Pd beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Utara dan para staf yang senantiasa membantu peneliti dalam proses penelitian.
10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara dan staf, yang senantiasa membantu peneliti dalam proses penelitian.
11. Kepada saudara-saudara serta segenap keluarga besar yang telah membantu dan mendukung penulis dalam proses penyelesaian studi.
12. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Ekonomi

Syariah IAIN Palopo angkatan 2019 (khususnya kelas EKIS F), dan teman-teman yang selama ini membantu dan selalu memberikan saran dalam penyusunan skripsi ini.

13. Kepada diri saya sendiri, yang telah semangat dan tetap kuat serta selalu percaya bahwa saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Teriring doa, semoga segala amal kebaikan serta keikhlasan dukungan mereka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wata'ala serta senantiasa dalam rahmat dan lindungan-Nya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun, penulis menerima dengan hati yang lapang dan ikhlas. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud bakti penulis yang dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan serta bernilai ibadah di sisi-Nya. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Palopo, 24 Juli 2023

IAIN PALOPO

Anistia Alvia



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. *Konsonan.*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diptong.

Vokal tunggal bahasa Arab, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	a
اِ	<i>Kasrah</i>	I	i
اُ	<i>ḍammah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauḷa*

## 3. Maddah

*Maddah* atau Vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ.. اِ.. اِى	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِى	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اِو	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

#### 4. *Tā' marbutah*

Transliterasi untuk *tā' marbutah* ada dua, yaitu: *tā' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-*serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbutah* itu di transliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-at fāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ : *al-Madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

أَلْحَقْ : *al-ḥaqq*

نُعِمَ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (حِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-* baik, ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. *Hamzah*

Aturan Transliterasi huruf hamzah menjadi opostrof (') hanya berlaku bagi hamzah terletak ditengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak di lambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa Alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta' muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim, dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi di tulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), al-hamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'in al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* ( frasa nominal), di transliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله دِينُ اللهُ *dīnullāh billāh*

Adapun *tā marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (*t*).

Contoh:

الله رَحْمَةً اللهُ *hum fī raḥmatillāh*

## 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (A-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang di dahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abu al-Walid Muḥammad ibn Rusyd, di tulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid

Muḥammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muḥammad Ibnu)

Nasr Ḥamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Ḥamid (bukan: Zaid, Nasr

Ḥamid Abu)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

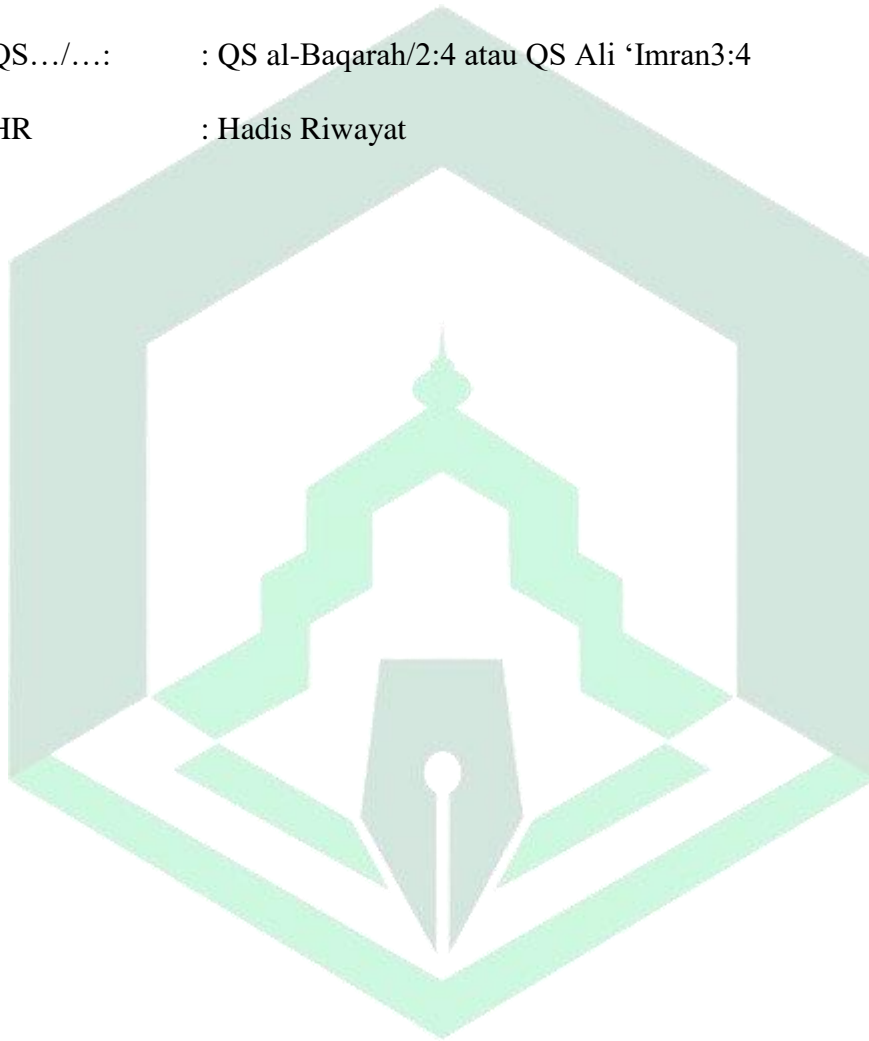
Swt. : *Subḥānahu wa ta'ālā*

Saw : *Shallallāhu 'alaihi wasallam*

as. : *'alaihi al-salām*

H : Hijrah

M : Masehi  
SM : Sebelum Masehi  
I : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)  
W : Wafat tahun  
QS.../....: : QS al-Baqarah/2:4 atau QS Ali 'Imran3:4  
HR : Hadis Riwayat



IAIN PALOPO



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> ....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>14</b>
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	14
B. Landasan Teori .....	21
C. Kerangka Berpikir .....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian .....	40
B. Lokasi Penelitian .....	40
C. Definisi Operasional Variabel .....	40
D. Populasi dan Sampel.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data .....	42
F. Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>60</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
B. Hasil Analisis Data .....	69
C. Pembahasan .....	96
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>129</b>
A. Kesimpulan.....	129
B. Saran .....	130

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>136</b>



**IAIN PALOPO**

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Produk Domestik Regional Bruto Luwu Utara Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018 - 2022 .....	3
Tabel 1.2	Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018-2022 .....	5
Tabel 1.3	Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022 .....	7
Tabel 1.4	Presentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan (Persen) .....	8
Tabel 1.5	Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan .....	10
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel .....	41
Tabel 3.2	Klasifikasi Tipologi Klassen .....	49
Tabel 3.3	Skala Perbandingan Berpasangan .....	57
Tabel 3.4	Matriks Perbandingan Berpasangan .....	58
Tabel 3.5	Nilai Indeks Random .....	59
Tabel 4.1	Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 .....	60
Tabel 4.2	Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022.....	63
Tabel 4.3	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2022 .....	66
Tabel 4.4	Analisis Shift Share Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2018-2022 .....	70
Tabel 4.5	Hasil Analisis Tipologi Klassen Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2018-2022 Persen (%) .....	73
Tabel 4.6	Hasil Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan Tipologi Klassen, Tahun 2018-2022 .....	76
Tabel 4.7	Hasil Analisis Overlay (Shift Share dan Tipologi Klassen) Sektor Perekonomian di Kabupaten Luwu Utara 2018-2022.....	79
Tabel 4.8	Hasil Pembobotan Kriteria Keseluruhan Stakeholders.....	82
Tabel 4.9	Pembobotan Alternatif Strategi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap Kriteria .....	88
Tabel 5.1	Pembobotan Alternatif Strategi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib .....	92

Tabel 5.2	Pembobotan Alternatif Strategi Sektor Jasa Pendidikan .....	95
Tabel 5.3	Urutan Peringkat Alternatif Strategi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan .....	107
Tabel 5.4	Urutan Peringkat Alternatif Strategi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib .....	113
Tabel 5.5	Urutan Peringkat Alternatif Strategi Sektor Jasa Pendidikan .....	118



IAIN PALOPO

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir.....	39
Gambar 4.1	Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara .....	62
Gambar 4.2	Grafik Persentase Penduduk di Kabupaten Luwu Utara 2022 ...	64
Gambar 4.3	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2022 ...	68
Gambar 4.4	Grafik Analisis Multi Kriteria Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan ....	88
Gambar 4.5	Grafik Analisis Multi Kriteria Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib.....	92
Gambar 4.6	Grafik Analisis Multi Kriteria Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Jasa Pendidikan.....	95



IAIN PALOPO

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 PDRB ADHK Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018-2022
- Lampiran 2 PDRB ADHB Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018-2022
- Lampiran 3 PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022
- Lampiran 4 PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022
- Lampiran 5 Hasil Analisis *Shift Share*
- Lampiran 6 Hasil Analisis *Tipologi Klassen*
- Lampiran 7 Hasil Analisis *Overlay*
- Lampiran 8 Analisis *Multi Criteria Decision Analysis (MCDA)*
- Lampiran 9 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 10 Surat Izin Meneliti
- Lampiran 11 Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran 12 SK Penguji
- Lampiran 13 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 14 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 15 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 16 Halaman Persetujuan Penguji
- Lampiran 17 Halaman Verifikasi Naskah
- Lampiran 18 Hasil Cek Plagiasi
- Lampiran 19 Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

## ABSTRAK

**Anistia Alvia,** 2023, “*Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara*”. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut agama Islam Negeri palopo. Dibimbing oleh Jibria Ratna Yasir, S.E.,M.Si.

Skripsi ini membahas mengenai Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara dan untuk mengetahui bagaimana strategi pengembangan sektor unggulan dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini adalah Metode Kuantitatif Deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi dan wawancara dalam bentuk kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan dalam menentukan sektor unggulan adalah dengan analisis *Shift Share*, *Tipologi Klassen* dan analisis *Overlay* (gabungan). Sedangkan dalam menentukan strategi pengembangannya menggunakan analisis Multi Kriteria atau MCDA (*Multi Criteria Decision Analysis*) yaitu untuk melihat alternatif strategi pengembangan dari masing-masing sektor unggulan yang telah diberikan bobot oleh para *stakeholders*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat tiga sektor unggulan yang ada di Kabupaten Luwu Utara yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan sektor jasa pendidikan. Sedangkan strategi prioritas untuk mengembangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah: (1) Pelatihan atau peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja, (2) Memaksimalkan upaya penanggulangan bencana guna meminimalkan bencana yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, (3) Berusaha untuk meningkatkan jaringan infrastruktur di setiap daerah demi mendorong kegiatan perekonomian, (4) Mengenalkan teknologi pertanian yang modern serta menyediakan sarana produksi pertanian yang memadai, dan (5) Berupaya untuk mendorong kegiatan ekspor komoditas unggulan dari bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Prioritas alternatif strategi untuk pengembangan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yaitu: (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik, (2) Pengembangan dan pemanfaatan *Electronic-Government (E-Government)* bagi instansi pelayanan publik, (3) Penguatan program jaminan sosial wajib, (4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan (5) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk prioritas strategi pengembangan sektor jasa pendidikan adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, (2) Peningkatkan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok, (3) Memberikan beasiswa kepada para mahasiswa/i berprestasi yang kurang mampu untuk penyelesaian studi, dan (4) Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Setiap alternatif strategi pengembangan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dapat dijadikan pemerintah daerah sebagai rujukan dalam pengambilan kebijakan guna mengembangkan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

**Kata kunci** : Sektor Unggulan, Shift Share, Tipologi Klassen, Overlay, MCDA, Strategi Pengembangan

## ABSTRACT

*Anistia Alvia*, 2023, "Analysis of Leading Sectors and Development Strategies for Increasing Regional Economic Potential in North Luwu Regency". Thesis for the Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Economics and Business, Palopo State Islamic Institute. Supervised by Jibria Ratna Yasir, S.E.,M.Sc.

*This thesis discusses the Analysis of Leading Sectors and Their Development Strategies in Increasing Regional Economic Potential in North Luwu Regency. This study aims to find out which sectors are the leading sectors in North Luwu Regency and to find out the strategies for developing leading sectors in increasing regional economic potential in North Luwu Regency. This type of research is Descriptive Quantitative Method. Data collection was carried out by means of documentation and interviews in the form of a questionnaire. The data analysis technique used in determining the leading sector is Shift Share analysis, Klassen Typology and Overlay analysis (combined). Meanwhile, in determining the development strategy using Multi Criteria Analysis or MCDA (Multi Criteria Decision Analysis), namely to see alternative development strategies from each leading sector that has been given weight by stakeholders.*

*Based on the results of research that has been done, there are three leading sectors in North Luwu Regency, namely agriculture, forestry and fisheries; sector of government administration, defense, and compulsory social security; and the education services sector. While the priority strategies for developing the agricultural, forestry and fisheries sectors are: (1) Training or improving the quality of human resources, especially in agriculture, plantations and fisheries as an effort to increase employment, (2) Maximizing disaster management efforts to minimize disasters that have occurred and what will happen, (3) Trying to increase the infrastructure network in each region to encourage economic activity, (4) Introducing modern agricultural technology and providing adequate agricultural production facilities, and (5) Trying to encourage export activities of superior commodities from the agricultural sector agriculture, plantation and fishing. Alternative priority strategies for the development of the government administration, defense and mandatory social security sectors are: (1) Improving the quality of human resources for public service delivery apparatus, (2) Development and utilization of Electronic-Government (E-Government) for public service agencies, (3) Strengthening mandatory social security programs, (4) Increasing community participation in public services, and (5) Giving awards and sanctions to community service units. Meanwhile, the priority strategies for the development of the education services sector are: (1) Increasing the availability of educational facilities and infrastructure, (2) Improving the quality of teaching staff in remote areas, (3) Providing scholarships to outstanding students who are less able to complete their studies, and (4) Cooperating with universities to improve the quality of education. Each alternative development strategy that has been formulated in this study can be used by the local government as a reference in making policies to develop leading sectors in North Luwu Regency.*

**Keywords:** *Leading Sector, Shift Share, Klassen Typology, Overlay, MCDA, Development Strategy*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berkembangnya suatu pemerintahan yang bersifat modern di berbagai Negara saat ini, dapat dilihat melalui dengan adanya pelimpahan kekuasaan atau wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Terutama mengenai wewenang atau urusan yang berkaitan langsung dengan masyarakat karena suatu daerah dianggap lebih mengetahui apa yang terjadi di daerahnya masing-masing. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut sebagai desentralisasi. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi yang seluas-luasnya, artinya daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Sehingga dengan adanya desentralisasi diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saingnya melalui prinsip demokrasi, pemerataan pembangunan, dan peningkatan efisiensi sumber daya yang ada.

Pelaksanaan otonomi daerah tercantum pada UU Nomor 12 Tahun 2008 yang merupakan perubahan kedua dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menekankan agar pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengelola daerahnya secara mandiri melalui penyelenggaraan kewenangan,

menetapkan kebijakan pembangunan serta mampu mengelola keuangan dalam rangka memenuhi kebutuhannya guna mensejahterakan masyarakat daerahnya.<sup>1</sup>

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam mengetahui keberhasilan pembangunan di suatu daerah karena di dalam pertumbuhan ekonomi terdapat pembangunan ekonomi. Indikator yang dapat digunakan dalam mengukur laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah tingkat pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa memandang tingkat pertumbuhan penduduk dan ada perubahan atau tidak dalam pergeseran struktur ekonomi.<sup>2</sup>

Produk Domestik Regional Bruto merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk perencanaan kebijakan pembangunan daerah, penetapan arah dari pembangunan daerah, untuk mengevaluasi hasil dari pembangunan daerah, dan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral untuk mengetahui sektor mana saja yang menjadi penyebab perubahan secara signifikan dalam pertumbuhan ekonomi wilayah. PDRB yang semakin laju pertumbuhannya menunjukkan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah sehingga mempercepat pembangunan daerahnya.<sup>3</sup>

Untuk mengetahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka dapat diketahui dengan mengidentifikasi sektor-

---

<sup>1</sup> Muh. Aqsha Gunawan, Skripsi, “*Analisis Peran Sektor Unggulan Terhadap Perekonomian Kabupaten Sinjai*,” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Alauddin Makassar, 2019, 1-2.

<sup>2</sup> Ircham Adri Nur Rachman, “*Analisis Sektor Unggulan Dalam Perekonomian Kabupaten Malang*,” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2019, 2.

<sup>3</sup> Muhammad Agus Muljanto, “*Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo*,” *Jurnal Manajemen Keuangan Publik* Vol.5, No.2, (2021), 17.

sektor unggulan atau sektor basis pada suatu daerah. Sektor basis dapat menunjang perekonomian suatu daerah karena sektor yang diidentifikasi sebagai sektor basis dapat memenuhi kebutuhan ekonomi suatu daerah bahkan dapat memenuhi kebutuhan ekonomi daerah lain, sehingga dapat memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dan dapat berguna bagi pemerintah untuk mengembangkan sektor lain yang berpotensi menjadi sektor unggulan atau basis dan dapat meningkatkan kebutuhan ekspor.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara disumbang oleh 17 sektor, ketujuh belas sektor tersebut memiliki potensi menjadi sektor basis atau sektor unggul di Kabupaten Luwu Utara, jika pemerintah daerah dapat mengelola sektor-sektor ekonominya menjadi sektor basis dan dapat mengekspor hasil produksinya hingga keluar daerah maka kemampuan pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat terpenuhi secara maksimal. Ketujuh belas sektor di kabupaten Luwu Utara dapat dilihat dari data PDRB Kabupaten Luwu Utara lima tahun terakhir mulai tahun 2018 sampai 2022 sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto Luwu Utara Atas Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022**

Lapangan Usaha PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,721,222.4	3,806,792.7	3,722,525.5	3,925,725.4	4,061,190.6
Pertambangan dan Penggalian	136,585.8	148,523.0	152,998.6	157,885.8	155,710.6
Industri Pengolahan	313,777.9	367,850.1	358,505.7	375,983.6	380,327.2

Lapangan Usaha PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pengadaan Listrik dan Gas	10,356.8	11,148.3	11,805.8	12,109.3	12,674.7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	343.6	373.1	393.9	407.5	438.2
Konstruksi	849,396.5	968,446.7	958,020.3	970,302.7	1,027,340.5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	873,028.0	989,073.9	976,017.9	994,057.4	1,041,144.2
Transportasi dan Pergudangan	151,973.6	174,219.2	158,694.4	159,872.1	177,952.4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	81,990.5	92,486.9	84,354.5	86,842.2	92,962.3
Informasi dan Komunikasi	315,990.5	350,717.9	386,683.5	406,992.8	451,032.0
Jasa keuangan dan Asuransi	108,338	111,639.7	118,518.2	129,605.2	129,312.4
Real Estate	220,573.8	233,813.8	240,228.0	243,350.2	247,371.5
Jasa Perusahaan	1,365.3	1,546.7	1,422.8	1,487.4	1,578.6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	358,570.8	395,614.0	398,803.3	406,042.2	433,009.9
Jasa Pendidikan	460,029.2	488,495.2	515,553.8	526,956.1	569,349.8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,544.0	78,086.2	86,064.2	91,667.5	93,314.5
Jasa Lainnya	2,109.9	2,371.1	2,149.3	2,211.7	2,258.5
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>7,675,196.6</b>	<b>8,221,198.6</b>	<b>8,172,739.7</b>	<b>8,491,499.1</b>	<b>8,876,967.9</b>

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara, 2023

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa, dari tahun 2018-2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan dan penurunan. Terlihat pada tahun 2018 sebesar Rp7,675,196.6, dan tahun 2019 meningkat lagi sebesar Rp8,221,198.6. Namun, pada tahun 2020 tercatat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara mengalami penurunan yakni berada di angka Rp8,172,739.7, turun (0,59%) dari tahun 2019 yang sebesar Rp8,221,198.6. Kemudian di tahun berikutnya berada di angka Rp8.491,499.1 naik 3,90% dan di tahun 2022 mengalami peningkatan lagi sebesar 4,54%. PDRB di Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020 menurun seiring dengan datangnya pandemi Covid-19 di Indonesia. Selain itu, penurunan yang terjadi di tahun 2020 juga diakibatkan karena adanya bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara.

**Tabel 1.2 Produk Domestik Regional Bruto Sulawesi Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018-2022**

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Kep.Selayar	3.422,67	3.685,67	3.620,20	3.765,56	3.903,80
Bulukumba	8.121,33	8.567,46	8.604,20	9.013,58	9.357,11
Bantaeng	5.075,84	5.621,52	5.650,54	6.151,45	7.102,04
Jeneponto	6.338,74	6.685,62	6.696,42	7.058,35	7.327,53
Takalar	6.190,67	6.616,25	6.575,76	6.908,05	7.228,40
Gowa	12.825,81	13.783,11	14.025,76	15.043,70	15.734,85
Sinjai	6.681,25	7.090,28	7.200,23	7.576,83	7.945,62
Maros	13.558,74	13.726,28	12.233,66	12.400,62	13.532,96
Pangkep	16.168,91	17.205,17	16.915,23	17.500,61	18.363,59
Barru	4.466,54	4.797,43	4.839,12	5.069,99	5.329,31
Bone	20.660,07	22.108,04	22.053,74	23.273,87	24.491,73

Kabupaten/ Kota	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Soppeng	6.494,39	6.993,53	7.146,65	7.585,98	8.054,42
Wajo	12.357,35	12.858,45	12.708,31	13.569,28	13.891,79
Sidrap	8.075,03	8.450,69	8.401,06	8.866,07	9.297,02
Pinrang	11.987,44	12.770,08	12.826,45	13.472,49	14.082,03
Enrekang	4.302,05	4.535,55	4.592,23	4.884,37	5.065,36
Luwu	9.155,58	9.728,97	9.855,91	10.449,75	11.044,67
Tana Toraja	4.251,26	4.558,14	4.545,29	4.780,98	5.025,78
Luwu Utara	7.675,20	8.221,20	8.172,74	8.491,50	8.876,97
Luwu Timur	15.837,80	16.022,95	16.256,90	16.030,50	16.349,57
Toraja Utara	4.778,53	5.140,01	5.148,55	5.357,13	5.639,38
Makassar	112.568,41	122.465,83	120.905,75	126.312,83	133.132,60
Parepare	4.639,40	4.947,79	4.944,03	5.162,10	5.468,43
Palopo	5.102,99	5.447,36	5.472,08	5.768,28	6.104,74

*Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023*

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa, dari total PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Pada Tahun 2022 Atas Dasar Harga Konstan terlihat bahwa, Kota Makassar memiliki andil terbesar kemudian diikuti oleh beberapa Kabupaten lainnya seperti: Kabupaten Bone, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Wajo, Kabupaten Maros, Kabupaten Luwu, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Takalar, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Palopo, Kabupaten Toraja Utara, Kabupaten Pare-pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Kep.Selayar.

Berdasarkan PDRB tiap Kabupaten/Kota Atas Harga Konstan tahun 2018-2022 diatas sumbangsi Kabupaten Luwu Utara terhadap Total PDRB Provinsi

Sulawesi Selatan masih menempati posisi jajaran urutan tengah yaitu berada di urutan ke 12 dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, yang artinya Kabupaten Luwu Utara masih memiliki keterlambatan pertumbuhan, keterlambatan tersebut dipengaruhi antara lain karena kurangnya pengelolaan sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Luwu Utara.

Selain itu ada beberapa masalah lain yang berhubungan dengan potensi ekonomi itu sendiri. Kabupaten Luwu Utara memiliki sektor-sektor potensial untuk dikembangkan, namun belum diketahui sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Sehingga hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara belum terlalu maksimal.

**Tabel 1.3 Jumlah Penduduk dan Persentase Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2022**

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)	Penduduk (persentase)
Kepulauan Selayar	139,1	1,51
Bulukumba	443,3	4,81
Bantaeng	199,4	2,16
Jeneponto	410,6	4,45
Takalar	305,1	3,31
Gowa	783,2	8,49
Sinjai	263,8	2,86
Maros	403,8	4,38
Pangkajene Dan Kepulauan	351,4	3,81
Barru	186,9	2,03
Bone	813,2	8,81
Soppeng	236	2,56
Wajo	379,7	4,12
Sindenreng Rappang	327,4	3,55
Pinrang	411,8	4,46

Kabupaten/Kota	Penduduk (ribu)	Penduduk (persentase)
Enrekang	230,6	2,50
Luwu	369,8	4,01
Tana Toraja	291	3,16
Luwu Utara	327,8	3,55
Luwu Timur	305,5	3,31
Toraja Utara	268,2	2,91
Makassar	1.432,2	15,52
Pare-Pare	154,9	1,68
Palopo	190,9	2,07
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>9.225,6</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Kemudian berdasarkan data jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, Kabupaten Luwu Utara menempati urutan ke-11 dengan populasi terpadat dari 24 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Total penduduk terpadat berada di Kota Makassar dengan populasi 1.432,2 ribu penduduk, sedangkan Kabupaten Luwu Utara memiliki populasi penduduk sebesar 327,8 ribu penduduk dengan persentase sebesar 3,55% dari total keseluruhan jumlah penduduk di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 1.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Sulawesi Selatan**

Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Persen)		
	2020	2021	2022
Kepulauan Selayar	12,48	12,45	12,24
Bulukumba	7,1	7,43	7,39
Bantaeng	8,95	9,41	9,07
Jeneponto	14,58	14,28	13,73
Takalar	8,44	8,25	8,25
Gowa	7,38	7,54	7,36
Sinjai	9,00	8,84	8,8



Kabupaten/Kota	Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan (Persen)		
	2020	2021	2022
Maros	9,74	9,57	9,43
Pangkep	13,96	14,28	13,92
Barru	8,26	8,68	8,4
Bone	10,68	10,52	10,58
Soppeng	7,59	7,53	7,49
Wajo	6,95	6,46	6,57
Sidrap	5,05	5,04	5,11
Pinrang	8,86	8,81	8,79
Enrekang	12,17	12,47	12,39
Luwu	12,65	12,53	12,49
Tana Toraja	12,1	12,27	12,18
Luwu Utara	13,41	13,59	13,22
Luwu Timur	6,85	6,94	6,81
Toraja Utara	12,01	11,99	11,65
Makassar	4,54	4,82	4,58
Pare Pare	5,44	5,4	5,41
Palopo	7,85	8,14	7,78
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>8,72</b>	<b>8,78</b>	<b>8,63</b>

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Masalah berikutnya adalah terkait kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara. Dari data yang diperoleh bahwa Kabupaten Luwu Utara masuk ke dalam 3 besar dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki angka kemiskinan terbesar. Kabupaten Pangkep menempati urutan pertama dengan presentase penduduk miskin sebesar 13,92%. Disusul Kabupaten Jeneponto dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,73%. Sedangkan Kabupaten Luwu Utara berada di urutan ketiga dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,22%.

**Tabel 1.5 Luas Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan**

Wilayah	Luas Area (km <sup>2</sup> )		
	2014	2015	2019
Kepulauan Selayar	903,50	904,00	1.357,03
Bulukumba	1.154,67	1.155	1.284,63
Bantaeng	395,83	396	395,83
Jeneponto	903,35	903	706,52
Takalar	566,51	567	566,61
Gowa	1.883,32	1.883	1.883,32
Sinjai	819,96	820	798,96
Maros	1.619,12	1.619	1619,12
Pangkajene dan Kepulauan	1112,29	1112	1132,08
Barru	1174,71	1175	1174,71
Bone	4559	4559	4559
Soppeng	1359,44	1359	1557
Wajo	2.506,2	2.506	2.504,06
Sindereng Rappang	1.883,25	1.883	1.883,23
Pinrang	1.961,17	1.961	1.961,67
Enrekang	1.786,01	1.786	1.784,93
Luwu	3.000,25	3.000	3.343,97
Tana Toraja	2.054,3	2.054	1.990,22
Luwu Utara	7.502,68	7.503	7.502,58
Luwu Timur	6.944,88	6945	6.944,88
Toraja Utara	1.151,47	1.151	1.215,55
Makassar	175,77	176	199,26
Parepare	99,33	99	99,33
Palopo	247,52	248	252,99
<b>Sulawesi Selatan</b>	<b>127.708,35</b>	<b>45.765</b>	<b>46.717,48</b>

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2023

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa Kabupaten Luwu Utara memiliki wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 7.502,58 km<sup>2</sup>. Kemudian disusul Kabupaten Luwu Timur dengan luas wilayah 6.944,88 km<sup>2</sup>. Sedangkan Bone menempati posisi ketiga dengan luas wilayah 4.559,00 km<sup>2</sup>.

Meskipun Kabupaten Luwu Utara memiliki wilayah terluas di Provinsi Sulawesi Selatan, namun tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara masih cukup tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik bahwa Kabupaten Luwu Utara berada di urutan ketiga dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Padahal Luwu Utara memiliki potensi sumber daya ekonomi yang melimpah yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomiannya, yakni sektor-sektor unggulan atau sektor potensial yang mampu meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah metode yang dapat digunakan untuk melihat sektor apa saja yang memiliki potensi atau unggul. Untuk selanjutnya dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tindakan atau strategi pengembangan seperti apa yang harus diambil untuk meningkatkan potensi ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. Hal tersebut sangat penting, dikarenakan potensi yang belum diketahui keunggulannya akan sulit untuk dikembangkan. Sehingga pertumbuhan yang ada hanya tercermin pada angka-angka kuantitatif saja. Jika telah diketahui sektor apa saja yang memiliki potensi, maka pemerintah daerah dapat mengambil sikap dan kebijakan untuk mengembangkan sektor-sektor tersebut dengan lebih tepat, sehingga dapat meningkatkan pembangunan yang baik di Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mengenai kondisi perekonomian di Kabupaten Luwu Utara maka penulis begitu tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sektor-sektor apa saja yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara periode 2018-2022?
2. Bagaimana strategi pengembangan sektor unggulan dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Luwu Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara pada periode 2018-2022.
2. Untuk mengetahui strategi pengembangan sektor unggulan dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Luwu Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat untuk beberapa lapisan kepentingan, yaitu manfaat dalam ilmu pengetahuan, bagi pemerintahan serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

2. Manfaat dalam Ilmu Pengetahuan

Manfaat yang didapat sebagai pembelajaran ke depan adalah mengetahui adanya sektor unggulan perekonomian wilayah yang dapat diandalkan atau diunggulkan dalam pertumbuhan perekonomian wilayah di Kabupaten Luwu Utara.

### 3. Manfaat bagi Pemerintahan

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah adalah dapat digunakan sebagai bahan atau alat pertimbangan dalam pengaplikasian di wilayah yaitu memberikan masukan terhadap pemerintah Kabupaten Luwu Utara dalam upaya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bermanfaat sebagai salah satu pendorong pertumbuhan perekonomian wilayah yang berdasar pada sektor unggulan dengan tidak mengabaikan sektor lain dalam perencanaan.

### 4. Manfaat bagi Masyarakat

Manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yakni masyarakat dapat mengetahui keunggulan dari wilayahnya sehingga dapat dikembangkan dan di maksimalkan pengolahannya, serta adanya perluasan lapangan kerja bagi masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan memiliki tujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan dalam penelitian. Disamping itu juga untuk menghindari anggapan plagiasi atau persamaan dalam penelitian ini, maka dalam kajian teori ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu.

Imroatul Mutmainah dan Hendry Cahyono (2021) dalam jurnalnya yang berjudul “*Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Kabupaten Lamongan*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode campuran yaitu metode deskriptif kuantitatif dan *study literature*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sektor yang masuk dalam sektor basis ( $LQ > 1$ ) yaitu sektor pertanian; konstruksi; pengangkutan dan komunikasi; dan sektor jasa-jasa. Sedangkan yang menjadi sektor *non*-basis ( $LQ < 1$ ) adalah sektor tambang dan galian; industri pengolahan; listrik, air bersih dan gas; sektor *real estate*, sektor jasa perusahaan; dan sektor keuangan. Hasil analisis *Shift Share* pada seluruh sektor Kabupaten Lamongan memiliki nilai positif yang artinya bahwa pertumbuhan regional mengalami pertumbuhan yang pesat. Analisis strategi ekonomi pembangunan berkelanjutan menggunakan kajian atau studi literatur dimana Kabupaten Lamongan belum mencapai pembangunan berkelanjutan jika dilihat dari aspek ekonomi saja, dan belum mempertimbangkan seluruh aspek komponen pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan

strategi kebijakan yang berbeda untuk setiap aspek di wilayah Kabupaten Lamongan guna mempercepat pencapaian menuju pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lamongan.<sup>4</sup>

Dari penelitian yang pernah dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah keduanya sama-sama menganalisis sektor unggulan dan mengkaji strategi pengembangan sektor unggulan suatu daerah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dalam menentukan strategi pengembangan sektor unggulan, dalam penelitian yang dilakukan oleh Imroatul Mutmainah dan Hendry Cahyono menggunakan metode *study literature*, sedangkan yang akan peneliti gunakan adalah metode analisis MCDA (*Multi-Criteria Decision Analysis*).

Aty Uar dan Hadija Madubun (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Strategi Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dan wawancara terhadap para perencana di Bappeda dan pihak-pihak lain yang terkait di Tual Kabupaten Maluku Tenggara. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kontribusi dan laju pertumbuhan sektor dalam PDRB, analisis location quotient (LQ), analisis *Shift-Share* dan analisis SWOT. Hasil penelitian diperoleh bahwa sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Maluku Tenggara adalah (1) sektor pertanian; (2) sektor industri pengolahan; dan (3) sektor perdagangan, hotel & restoran. Adapun strategi yang

---

<sup>4</sup> Imroatul Mutmainah dan Hendry Cahyono, “*Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Kabupaten Lamongan*,” *Journal Of Economics* Volume 1, Nomor 1, (2021), 186.

digunakan untuk mengembangkan sektor unggulan adalah strategi diversifikasi konsentris yaitu memanfaatkan kekuatan sektor unggulan untuk mencari peluang baru sesuai dengan kapasitas yang ada dan mengembangkan sektor lain (*non-unggulan*) untuk memanfaatkan kelebihan kemampuan sektor unggulan baik yang masih berkaitan dengan kegiatan sektor unggulan maupun sama sekali tidak berkaitan.<sup>5</sup>

Dari penelitian yang pernah dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah menggunakan data sekunder Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang telah dipublikasikan oleh BPS. Perbedaannya terletak pada objek penelitian, dalam penelitian yang dilakukan oleh Aty Uar dan Hadija Madubun objek penelitiannya di Kabupaten Maluku Tenggara, sedangkan penelitian ini mengambil objek penelitian di Kabupaten Luwu Utara. Kemudian dalam menentukan sektor unggulan penelitian Aty Uar dan Hadija Madubun tidak menggunakan analisis *Tipologi Klassen* dan analisis *Overlay*. Selain itu, alat analisis yang digunakan dalam menentukan strategi pengembangan dalam penelitian yang dilakukan oleh Aty Uar dan Hadija Madubun menggunakan alat analisis SWOT sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan menggunakan alat analisis MCDA (*Multi-Criteria Decision Analysis*).

Frederic Winston Nalle (2022) dengan penelitiannya yang berjudul "*Peran Sektor Unggulan Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Di*

---

<sup>5</sup> Aty Uar dan Hadija Madubun, "*Strategi Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara*," Jurnal Hipotesa Volume 15, No. 1 (Mei 2021), 34.



*Kabupaten Timor Tengah Utara*". Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis perubahan dan pergeseran sektor ekonomi, mengklasifikasikan dan memetakan sektor unggulan serta merumuskan strategi yang tepat dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif. Alat analisis yang digunakan adalah analisis *Shift Share*, *Tipologi Klassen* dan analisis SWOT. Jenis data yang digunakan adalah data primer untuk kebutuhan analisis SWOT dan data sekunder untuk kebutuhan analisis *Shift Share* dan *Tipologi Klassen*, dimana data yang digunakan adalah data PDRB dan Ketenagakerjaan per sektor tahun 2015-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui analisis *Shift Share*, secara umum sektor dengan nilai *National Share* (Ns), *Proportional Shift* (Ps) dan *Differential Shift* (D) terbesar adalah sektor pertanian. Melalui analisis *Tipologi Klassen*, sektor-sektor yang berkembang dan tumbuh pesat adalah sektor pertanian dan industri manufaktur. Oleh karena itu, strategi yang dianggap tepat dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif melalui konsep pengembangan sektor unggulan adalah dengan menerapkan strategi *Strength-Opportunity* (SO), dimana pemerintah diharapkan mampu memanfaatkan segala bentuk kekuatan yang ada dengan tetap memperhatikan berbagai peluang yang dimiliki.<sup>6</sup>

Dari penelitian yang pernah dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah menggunakan alat analisis yang sama yaitu analisis *Shift Share* dan analisis *Tipologi Klassen* untuk

---

<sup>6</sup> Frederic Winston Nalle, " *Peran Sektor Unggulan Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Kabupaten Timor Tengah Utara*," *Jurnal AGRIFOR* Volume 21 No.2 (Oktober 2022), 241.

menentukan sektor unggulan. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Frederic Winston Nalle tidak menggunakan metode penggabungan atau *Overlay* dalam menentukan sektor unggulannya. Selain itu, perbedaannya juga terletak pada alat analisis yang digunakan dalam menentukan strategi pengembangan sektor unggulan yaitu menggunakan analisis SWOT, sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA).

Rismayanti (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Potensi Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi (Sectoral Potential Analysis In Economic Development Planning)*”. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis *Location Quotient* yang dilakukan menunjukkan bahwa dari ke-17 sektor, hanya terdapat 3 sektor yang merupakan sektor *non-basis* (tidak memiliki keunggulan komparatif) yakni sektor pertanian, pertambangan dan administrasi pemerintahan. Sementara ke-14 sektor lainnya tergolong sebagai sektor basis ekonomi di Kota Kendari. Sektor dengan Indeks LQ terbesar adalah sektor jasa perusahaan dan yang terkecil adalah sektor pertambangan. Hasil analisis *Shift Share* dan *Typologi Klassen* menunjukkan bahwa terdapat sektor ekonomi potensial dan memiliki keunggulan kompetitif (berdaya saing) yakni sektor pertanian, pertambangan, pengadaan listrik, administrasi pemerintahan, dan jasa kesehatan. Sektor maju tapi tertekan di Kota Kendari yakni sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, jasa perusahaan dan jasa lainnya. Sementara terdapat 3 sektor yang tergolong sektor relatif tertinggal yakni sektor

pengadaan air bersih dan pengolahan sampah, penyediaan akomodasi dan real estate. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa dari 3 sektor fokus pembangunan Kota Kendari, terdapat satu sektor yang tidak sesuai dengan hasil analisis sektor potensial yaitu sektor infrastruktur, dalam hal ini adalah sektor konstruksi dan real estate.<sup>7</sup>

Dari penelitian yang pernah dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah menggunakan alat analisis yang sama yaitu analisis *Shift Share* dan *Tipologi Klassen* untuk menentukan sektor yang menjadi sektor ekonomi potensial atau sektor unggul. Perbedaannya pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tidak menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) dalam menentukan sektor unggulannya. Serta dalam penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti tidak menggunakan analisis *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) untuk menentukan strategi pengembangannya.

Abdul Kadir Arno dan Ilham (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Competitiveness of Gross Regional Domestic Product and Its Effect on Economic Development in Palopo City, South Sulawesi Province*”. Metode penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait lainnya untuk mengumpulkan data dan informasi. Teknik yang digunakan adalah analisis *Location Quotient*, *Tipologi Klassen*, *Shift Share*, dan

---

<sup>7</sup> Rismayanti, “*Analisis Potensi Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi*,” *Gorontalo Development Review (GOLDER)* Vol. 4 No. 2, (Oktober 2021), 75.

regresi. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa di Kota Palopo terdapat beberapa sektor ekonomi basis diantaranya adalah pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan dan daur ulang sampah; konstruksi; perdagangan hotel dan restoran; transportasi dan pergudangan; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Sedangkan sektor yang memiliki daya saing di Kota Palopo adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel, restoran; transportasi, dan pergudangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Dari penelitian yang pernah dilakukan memiliki persamaan dan perbedaan. Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah menggunakan alat analisis yang sama yaitu analisis *Shift Share* dan *Tipologi Klassen* untuk menentukan sektor yang menjadi sektor unggulan. Perbedaannya pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah tidak menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) dalam menentukan sektor unggulannya. Sedangkan alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini dalam menentukan menggunakan analisis *Shift Share*, *Tipologi Klassen* dan *Overlay* (gabungan).<sup>8</sup>

IAIN PALOPO

---

<sup>8</sup> Abd. Kadir Arno dan Ilham, “*Competitiveness of Gross Regional Domestic Product and Its Effect on Economic Development in Palopo City, South Sulawesi Province*,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. 5 No. 5, (2023), 2666.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pembangunan Ekonomi**

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh sebuah wilayah untuk dapat mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup dari masyarakatnya. Menurut definisi lama, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang membuat pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pendapatan per kapita paling sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam sebuah ekonomi/negara. Dalam definisi baru, pembangunan ekonomi adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar secara sosial dalam ekonomi (Hakim, 2004).<sup>9</sup>

Thomas Robert Malthus (1798) menganggap bahwa proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten dipihak rakyat. Jadi menurut Malthus proses pembangunan adalah suatu proses naik turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi.<sup>10</sup>

Pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan sebuah proses dalam peningkatan pendapatan total dan per kapita, yang disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi negara dan distribusi pendapatan penduduk negara, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk. Pembangunan ekonomi bersifat kualitatif, tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga

---

<sup>9</sup> Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, "*Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal)*," Edisi ke-2 (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), 296-297.

<sup>10</sup> Andi Mardiana dan Azhar J. Habu, "*Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara*",. Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo) Volume 1, Nomor 1 ( 2020), 140

mengubah struktur produksi dan meningkatkan alokasi input ke berbagai sektor ekonomi seperti peningkatan institusi, pengetahuan, sosial dan teknologi. Menurut Sukirno dalam Fitri Amalia (2022) pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi.<sup>11</sup> W.W Rostow (1960) membagi proses pembangunan ekonomi pada lima tahap pertumbuhan yaitu, tahap masyarakat tradisional, tahap prasyarat untuk lepas landas, tahap lepas landas, tahap menuju kedewasaan, dan tahap konsumsi tinggi.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (2004) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan sosial terencana, karena di dalamnya menyangkut berbagai aspek untuk mengupayakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, kesadaran lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk memperbaiki kualitas hidupnya.<sup>12</sup>

Menurut Joseph Schumpeter (1911) berpendapat, pembangunan ekonomi adalah peningkatan output yang ditimbulkan oleh inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau dari golongan entrepreneur, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisir dan mengembangkan faktor produksi lain untuk menghasilkan komoditas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Mereka adalah golongan masyarakat yang menciptakan inovasi atau revitalisasi dalam perekonomian. Inovasi ini berarti peningkatan teknologi dalam arti luas, seperti

---

<sup>11</sup> Fitri Amalia dkk, "*Ekonomi Pembangunan*," Cetakan Pertama (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 86.

<sup>12</sup> Bonaraja Purba dkk, "*Ekonomi Pembangunan*," Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 84-85.

penemuan produk baru, pembukaan pasar baru dan sebagainya. Sedangkan pembangunan ekonomi untuk daerah, makna yang tradisional difokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten atau kota.

Pada dasarnya, konsep pembangunan ekonomi meliputi empat unsur penting, diantaranya adalah:

a. Pembangunan adalah sebuah proses

Konsep ini dapat diartikan bahwa dalam pembangunan ada tahapan yang harus dilalui oleh seluruh masyarakat atau rakyatnya. Setiap tahapan perkembangan harus dilalui untuk menuju kondisi yang adil, makmur, dan sejahtera.

b. Pembangunan merupakan peningkatan pendapatan per kapita

Pembangunan diartikan sebagai bentuk usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita di setiap Negara. Dalam pencapaiannya maka diperlukan tindakan dan partisipasi seluruh masyarakat, pemerintah dan elemen lain di dalam Negari. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai ketika pendapatan per kapita meningkat.

c. Peningkatan pendapatan per kapita pada jangka panjang

Jika pendapatan per kapita relatif meningkat dalam jangka panjang, berarti ekonomi dianggap berkembang. Tentu saja, peningkatan pendapatan per kapita tidak serta merta menunjukkan peningkatan ketika muncul hal-hal diluar perkiraan seperti adanya musibah, bencana alam, masalah konflik dan kekacauan politik sehingga perekonomian mengalami resesi atau

kemunduran. Meski hanya sementara, namun yang terpenting adalah ekonomi rata-rata tumbuh setiap tahun.

d. Penyempurnaan sistem kelembagaan

Perbaikan sistem kelembagaan dapat dilihat dari dua sisi yaitu perbaikan di sisi aturan atau “*rule of the games*” pada peraturan formal dan *non-formal* serta perbaikan di sisi organisasi sebagai “pemain” dari aturan yang dibuat.<sup>13</sup>

Pembangunan ekonomi (*economic development*) dan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) sering digunakan secara bergantian dan sering dianggap sama. Padahal secara konsep, istilah pembangunan ekonomi/perkembangan ekonomi (*economic development*), berbeda dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan pendapatan nasional, tanpa memandang kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah terjadi perubahan dalam struktur ekonominya atau tidak. Sedangkan pembangunan ekonomi sebagai perkembangan pendapatan per kapita suatu masyarakat bersamaan dengan perombakan dan modernisasi dalam struktur ekonomi dari tradisional ke modern. Suatu negara dapat dikatakan ada pertumbuhan ekonomi apabila terdapat lebih banyak output, dan dikatakan terjadi pembangunan/ perkembangan ekonomi apabila tidak hanya terdapat lebih banyak output, tetapi juga terjadi perubahan-perubahan dalam

---

<sup>13</sup> Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, “*Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal)*,” Edisi ke-2 (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), 39.



kelembagaan dan pengetahuan teknik (terjadi modernisasi) dalam menghasilkan output yang lebih banyak tersebut. Disamping itu, dikatakan terjadi pembangunan ekonomi apabila pertambahan pendapatan nasional pada suatu tahun tertentu melebihi dari tingkat pertambahan penduduk. Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa pembangunan ekonomi selalu dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi pertumbuhan ekonomi belum tentu disertai dengan pembangunan ekonomi.<sup>14</sup>

## **2. Pembangunan Ekonomi Daerah**

Rahayu (2014) mendefinisikan pembangunan wilayah atau pembangunan daerah merupakan sebuah usaha atau upaya pembangunan daerah guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui berbagai pemanfaatan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknis, dan prasarana fisik secara efektif, optimal, dan berkelanjutan.<sup>15</sup>

Menurut Arsyad dalam Steva Tumangkeng (2018) Pembangunan ekonomi daerah berarti bahwa pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan

IAIN PALOPO

---

<sup>14</sup> Endang Mulyani, *“Ekonomi Pembangunan,”* Edisi ke - 1 (Yogyakarta : UNY Press, 2017), 6.

<sup>15</sup> Muammar, Skripsi, *“Analisis Sektor Unggulan Di Kota Banda Aceh Berdasarkan Metode Tipologi Klassen Dan Shift-Share,”* Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, 19.

mendorong pengembangan kegiatan ekonomi lokal (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.<sup>16</sup>

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang mengandung arti perubahan yang terjadi secara terus-menerus, upaya untuk meningkatkan pendapatan perkapita, kenaikan pendapatan perkapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Berikut adalah tujuan pembangunan ekonomi:

- a. Mengembangkan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada. Tujuan perencanaan pembangunan ekonomi dan pengerjaan adalah bukan untuk menarik tenaga kerja baru, tetapi untuk menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk yang ada.
- b. Mewujudkan stabilitas ekonomi daerah. Pembangunan ekonomi akan sukses jika mampu memenuhi kebutuhan dunia usaha (misalnya: lahan, sumber daya keuangan, infrastruktur, dan lain-lain) yang beragam. Hal ini untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya akan memengaruhi kesempatan kerja masyarakat.<sup>17</sup>

### **3. Pertumbuhan Ekonomi Wilayah**

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value)

---

<sup>16</sup> Steeva Tumangkeng, "Analisis Potensi Ekonomi di Sektor dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Tomohon," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 18, No.01 (2018), 129.

<sup>17</sup> Bonaraja Purba dkk, "Ekonomi Pembangunan," Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021), 70.

yang terjadi di wilayah tersebut (Tarigan, 2007). Para ahli ekonomi yang telah mengemukakan teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah Adam Smith, David Ricardo dan T.R Malthus. Adam Smith mengemukakan bahwa dengan adanya pertumbuhan penduduk, maka akan terjadi pertumbuhan pada perekonomiannya pula. Di sisi lain, David Ricardo dan T.R Malthus mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk terjadi secara berlebihan, maka upah dan bahan makanan tidak akan mencukupi kebutuhan mereka sehingga perekonomian akan statis atau mengalami stagnasi.<sup>18</sup>

Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total, sedangkan pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen berikut 1) sumber alam, 2) tenaga kerja/pertumbuhan penduduk, 3) jumlah persediaan.

Menurut David Ricardo faktor pertumbuhan penduduk yang semakin besar hingga menjadi dua kali lipat pada suatu saat akan menyebabkan jumlah tenaga kerja melimpah. Pendapat Ricardo ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Thomas Robert Malthus, menyatakan bahwa makanan (hasil produksi) akan bertambah menurut deret ukur sehingga pada saat perekonomian akan berada pada taraf subsisten atau kemandegan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Nur dkk, "Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Dalam Perekonomian Kota Pare-Pare" *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban* Vol. VII No.2 (2021), 161

<sup>19</sup> Dodi Chandra dkk, "Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi," *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol. 12. No. 2, (2017), 69-70.

Pertumbuhan ekonomi wilayah juga diartikan sebagai peningkatan pendapatan masyarakat yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu peningkatan total nilai tambah yang terjadi di wilayah tersebut. Pertambahan pendapatan itu diukur secara riil, artinya diukur dalam harga konstan. Hal itu juga menjelaskan balas jasa untuk faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi transfer payment yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah (Steeva Tumangkeng, 2018).<sup>20</sup>

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, jadi persentase pertambahan output itu haruslah lebih tinggi dari persentase pertambahan penduduk dan ada kecenderungan dalam jangka panjang bahwa pertumbuhan itu akan berlanjut. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah, diperlukan kemampuan untuk menganalisis potensi ekonomi wilayah, yaitu terkait dengan menentukan sektor-sektor riil yang perlu dikembangkan agar perekonomian wilayah tumbuh cepat dan disisi lain mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang membuat potensi sektor tertentu rendah dan menentukan apakah prioritas untuk menanggulangi kelemahan tersebut.

#### **4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah pada periode tertentu adalah dengan menggunakan data Produk Domestik

---

<sup>20</sup> Steeva Tumangkeng, "Analisis Potensi Ekonomi di Sektor dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Tomohon," Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 18, No.01 (2018), 130.

Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.<sup>21</sup> Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya diartikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (*netto*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (BPS, 2022).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung atas dasar harga berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah dari barang dan jasa tersebut yang dihitung atas harga berlaku pada tahun tertentu. Produk Domestik Regional Bruto adalah total nilai produksi barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah atau daerah dalam kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Dalam menyusun PDRB diperlukan data dari berbagai kegiatan ekonomi dan berasal sumber yang berbeda. Kegiatan ekonomi merupakan sebuah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi dan akumulasi kekayaan. Menurut Setiawan dan Handoko bahwa PDRB ialah jumlah nilai tambah bruto barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di seluruh daerah dalam tahun tertentu atau periode tertentu dan biasanya satu tahun (Lucky Riana Putri, 2020).<sup>22</sup> Yang dimaksud dengan nilai tambah bruto adalah nilai produksi (*output*) dikurangi biaya antara (*intermediate cost*). Komponen nilai tambah bruto meliputi komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan),

---

<sup>21</sup> Rudi Hartono, "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja," Jurnal Inovasi Volume 14, No.1 (2018), 38.

<sup>22</sup> Lucky Riana Putri, "Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan PDRB Kota Surakarta," Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, 2020, 45-46.

penyusutan dan pajak tidak langsung bersih. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor kemudian dijumlahkan maka akan didapatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor-sektor perekonomian berdasarkan lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB, yaitu: Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah.<sup>23</sup>

#### **5. Sektor Ekonomi Unggulan**

Menurut Ratnasari (2004) *Leading Sector* atau sektor unggulan adalah sektor atau kegiatan ekonomi yang memiliki potensi, kinerja dan prospek yang lebih baik dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga diharapkan mampu menggerakkan kegiatan usaha ekonomi turunan lainnya, agar mewujudkan kemandirian pembangunan wilayah. Sektor unggulan juga dapat diartikan sebagai sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya yang ditunjukkan dengan parameter seperti:

- a. Kontribusi sektor ekonomi terhadap perekonomian wilayah cukup tinggi,
- b. Sektor yang mempunyai *multiplier effect* tinggi,
- c. Sektor yang kandungan deposit atau simpanannya melimpah, dan
- d. Memiliki potensi nilai tambah yang cukup baik.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Aldy Cornelis Ndoen, Skripsi, "*Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur*," Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, 2022, 27-28.

<sup>24</sup> Fahrul Alam Masruri dkk, "*Analisis Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat*," Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. XII, No 1 (Maret 2021), 34.

Menurut Tambunan dalam Aldy Cornelis Ndoen (2022) pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik perbandingan dalam skala regional, nasional maupun internasional. Dalam lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggul jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama di negara lain. Sedangkan pada tingkat nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang diproduksi oleh wilayah lain, baik di pasar nasional maupun domestik.<sup>25</sup>

Menurut Adam Smith keunggulan absolut atau daya saing (*competitiveness*) yang dimiliki oleh setiap negara akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, David Ricardo juga yang menyatakan meskipun suatu wilayah tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi dibandingkan dengan wilayah lain, tetapi wilayah tersebut masih diuntungkan dengan adanya perdagangan dan perbandingan rasio harga lainnya. Seperti Teori daya saing dalam Porter, M (1990) yang menjelaskan adanya produktivitas sebagai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja, sehingga negara akan memperoleh daya saing yang berasal dari perusahaan secara kompetitif untuk mencapai keuntungan dibandingkan dengan negara lain. *World Economic Forum* (2019) menjelaskan

IAIN PALOPO

---

<sup>25</sup> Aldy Cornelis Ndoen, Skripsi, “*Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur*,” Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, 2022, 21

bahwasanya daya saing adalah kemampuan yang dimiliki oleh negara atau daerah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.<sup>26</sup>

Teori sektor unggulan dalam ekonomi diungkapkan oleh seorang ahli ekonomi bernama Gunnar Myrdal. Teori ini dikenal sebagai "Teori Pertumbuhan Akumulatif" atau "Teori Pertumbuhan Berkurang" yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul "*Economic Theory and Underdeveloped Regions*" yang diterbitkan pada tahun 1957. Myrdal menyatakan bahwa ekonomi berkembang tidak merata di semua sektor, melainkan berkembang lebih cepat di sektor-sektor tertentu yang memiliki keunggulan komparatif. Konsep sektor unggulan mengacu pada sektor ekonomi yang memiliki keunggulan produktivitas dan kompetitif dibandingkan dengan sektor lainnya. Keunggulan ini bisa berdasarkan sumber daya alam, keterampilan tenaga kerja, teknologi, atau faktor-faktor lainnya. Dalam teori ini, pengembangan sektor unggulan dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi keseluruhan suatu wilayah atau negara.<sup>27</sup>

Menurut Sjafrizal (1985), sektor unggulan atau basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena memiliki keuntungan kompetitif (*Competitive Advantage*) yang cukup tinggi.<sup>28</sup> Sektor unggulan juga dapat disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian dalam suatu wilayah. Istilah *Competitive advantage* menganalisa tentang kemampuan

---

<sup>26</sup> Niken Puspitasari dan Farida Rahmawati, "Analisis Indeks Daya Saing dan Pengaruh Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah Kota Batu," *OECOMICUS Journal of Economics* Vol. 6, No. 2, (2022), 61-62.

<sup>27</sup> Muhammad Hasan dan Muhammad Azis, "*Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal)*," Edisi ke-2 (Makassar: CV. Nur Lina, 2018), 80-81

<sup>28</sup> Andi Kurniawan Karta Negara & Aning Kesuma Putri, "*Analisis Sektor Unggulan Kecamatan Toboali dengan Metode Shift Share dan Location Share*," *Jurnal Ekonomi* Vol.8, No.1 (Juni 2020), 27.



suatu daerah untuk memasarkan hasil produknya keluar wilayah atau daerah, sehingga dapat memberikan keuntungan.

Menurut Tumenggung dalam Maulana Irmansyah (2018) adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian lainnya, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor.<sup>29</sup>

Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) sangat erat kaitannya dengan data PDRB dari daerah yang bersangkutan. Karena PDRB mengandung informasi yang sangat penting antara lain untuk melihat output sektor ekonomi (kontribusi masing-masing sektor) dan laju pertumbuhan di suatu daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Penentuan sektor unggulan menjadi penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan dan kewenangan untuk mengambil kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi daerah. Adapun kriteria sektor unggulan menurut Usya (2006) adalah:

- 1) Sektor unggulan memiliki tingkat atau laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
- 2) Sektor unggulan memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang relatif besar,

---

<sup>29</sup> Maulana Irmansyah , “*Analisis Sektor Unggulan yang Ada di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur,*” JDEP-Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Volume 2, No. 1 (2018), 8

- 3) Sektor unggulan memiliki keterkaitan antar sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang,
- 4) Sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Ada empat syarat agar suatu sektor menjadi sektor prioritas, Menurut Rachbini (2001) yakni :

- a. Sektor tersebut harus menghasilkan produk yang memiliki permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan dapat berkembang pesat sebagai akibat dari efek permintaan tersebut;
- b. Karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas;
- c. Harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil produksi sektor prioritas, baik swasta maupun pemerintah.

Sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu mempengaruhi sektor-sektor lainnya. Menurut Ambardi dan Socia (2002), kriteria komoditas unggulan suatu daerah, antara lain:

- 1) Komoditas unggulan harus mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi. Artinya, komoditas unggulan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran.
- 2) Komoditas unggulan memiliki keterkaitan ke depan dan ke belakang yang kuat, baik antar komoditas unggulan maupun komoditas lainnya.
- 3) Komoditas unggulan mampu bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain di pasar nasional maupun pasar internasional, baik dari segi harga produk, biaya produksi, kualitas pelayanan, dan aspek lainnya.

- 4) Komoditas unggulan daerah memiliki keterkaitan dengan daerah lain, baik dari segi pasar (konsumen) maupun penyediaan bahan baku (jika bahan baku di daerah sendiri tidak mencukupi atau tidak tersedia sama sekali).
- 5) Komoditas unggulan memiliki status teknologi yang terus meningkat, terutama melalui inovasi teknologi.
- 6) Komoditas unggulan mampu menyerap tenaga kerja berkualitas secara optimal sesuai dengan skala produksinya
- 7) Komoditas unggulan mampu bertahan dalam kurun waktu tertentu, mulai dari fase kelahiran, pertumbuhan, puncak hingga penurunan. Ketika satu komoditas unggulan memasuki tahap penurunan, maka komoditas unggulan lainnya harus mampu menggantikannya.
- 8) Komoditas unggulan tidak rentan terhadap guncangan eksternal dan internal.
- 9) Pengembangan komoditas unggulan harus mendapat berbagai bentuk dukungan. Misalnya, dukungan keamanan, sosial, budaya, informasi dan peluang pasar, kelembagaan, fasilitas insentif/disinsentif, dan lain-lain.<sup>30</sup>

## **6. Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah**

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah bisa diartikan sebagai cara yang ditempuh untuk mengembangkan masing-masing sektor unggulan dengan tujuan memperluas dan meningkatkan kapasitas sektor tersebut untuk dalam berkontribusi dalam pembentukan PDRB. Sistem atau metode ini disusun berdasarkan kekuatan dan kelemahan sektor atau daerah tersebut.

---

<sup>30</sup> Aldy Cornelis Ndoen, Skripsi, “*Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur*,” Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, 2022, 23

Untuk mengetahui potensi ekonomi daerah merupakan hal yang tidak mudah. Potensi ekonomi daerah adalah kemampuan ekonomi yang ada di daerah yang memungkinkan dan layak untuk dikembangkan sehingga akan terus berkembang menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat setempat bahkan dapat mendorong perekonomian daerah secara keseluruhan untuk berkembang dengan sendirinya dan berkesinambungan (Suparmoko, 2002).

Sebelum menyusun strategi pengembangan, ada baiknya diketahui terlebih dahulu potensi dan permasalahan daerah dalam mengembangkan perekonomiannya. Dengan mengetahui potensi dan permasalahan dari suatu daerah maka akan lebih cepat dalam menyusun strategi untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Oleh karena itu dalam menyusun strategi terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi bidang atau sektor kegiatan mana yang berpotensi untuk dikembangkan dari masing-masing sektor.
- 2) Mengidentifikasi sektor-sektor yang memiliki potensi rendah untuk dikembangkan dan mencari faktor-faktor penyebab rendahnya potensi sektor-sektor tersebut untuk dikembangkan.
- 3) Mengidentifikasi sumber daya (faktor-faktor produksi) yang ada termasuk sumber daya manusia dan yang siap digunakan untuk mendukung pengembangan masing-masing sektor terkait.
- 4) Dengan menggunakan model pembobotan terhadap kriteria dan alternatif strateginya, maka akan ditemukan potensi ekonomi yang unggul dan layak untuk dikembangkan.

- 5) Menetapkan strategi yang akan ditempuh untuk pengembangan sektor-sektor andalan yang mampu menarik sektor-sektor lain untuk tumbuh sehingga perekonomian mampu berkembang dengan sendirinya (*self propelling*) secara berkelanjutan (*sustainable development*).<sup>31</sup>

### C. Kerangka Berpikir

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah merupakan salah satu hal yang sangat penting, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan atau kemajuan dari suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut. Faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah adalah dengan melihat potensi atau keunggulan dasar dari daerah tersebut, untuk melihat atau menentukan sektor unggulan yang ada di Kabupaten Luwu Utara maka akan digunakan alat analisis *Shift Share* dan analisis *Tipologi Klassen* lalu selanjutnya akan dilakukan penggabungan atau analisis *Overlay*. Setelah mengetahui sektor unggulan maka akan dicari strategi yang dapat digunakan untuk pengembangan sektor unggulan di wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Luwu Utara akan dilakukan dengan menggunakan analisis MCDA (*Multi-Criteria Decision Analysis*). MCDM atau *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) merupakan pendekatan atau metode dalam pengambilan keputusan berdasarkan alternatif/opsi solusi dari multi kriteria. Pada dasarnya MCDM merupakan bagian dari bidang

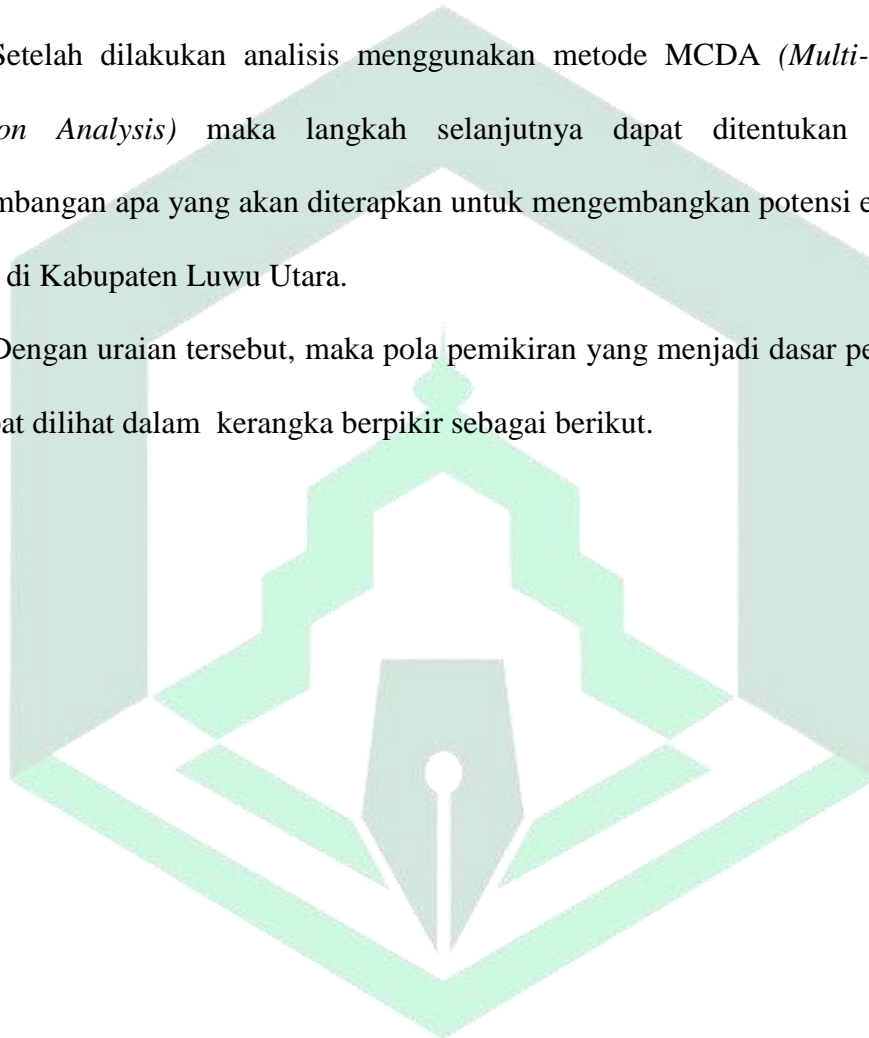
---

<sup>31</sup> Mushoffa, Skripsi, "Analisis Sektor Basis dan Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal," Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang. 20.

keilmuan riset operasi. Fokus bahasanya mencakup aspek kualitatif dan kuantitatif (Mardani et al., 2015), multi kriteria dan adakalanya saling bertentangan terhadap pencapaian kinerja, sehingga diperlukan normalisasi terhadap nilai dari kriteria tersebut (Marimin, 2004).<sup>32</sup>

Setelah dilakukan analisis menggunakan metode MCDA (*Multi-Criteria Decision Analysis*) maka langkah selanjutnya dapat ditentukan strategi pengembangan apa yang akan diterapkan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Luwu Utara.

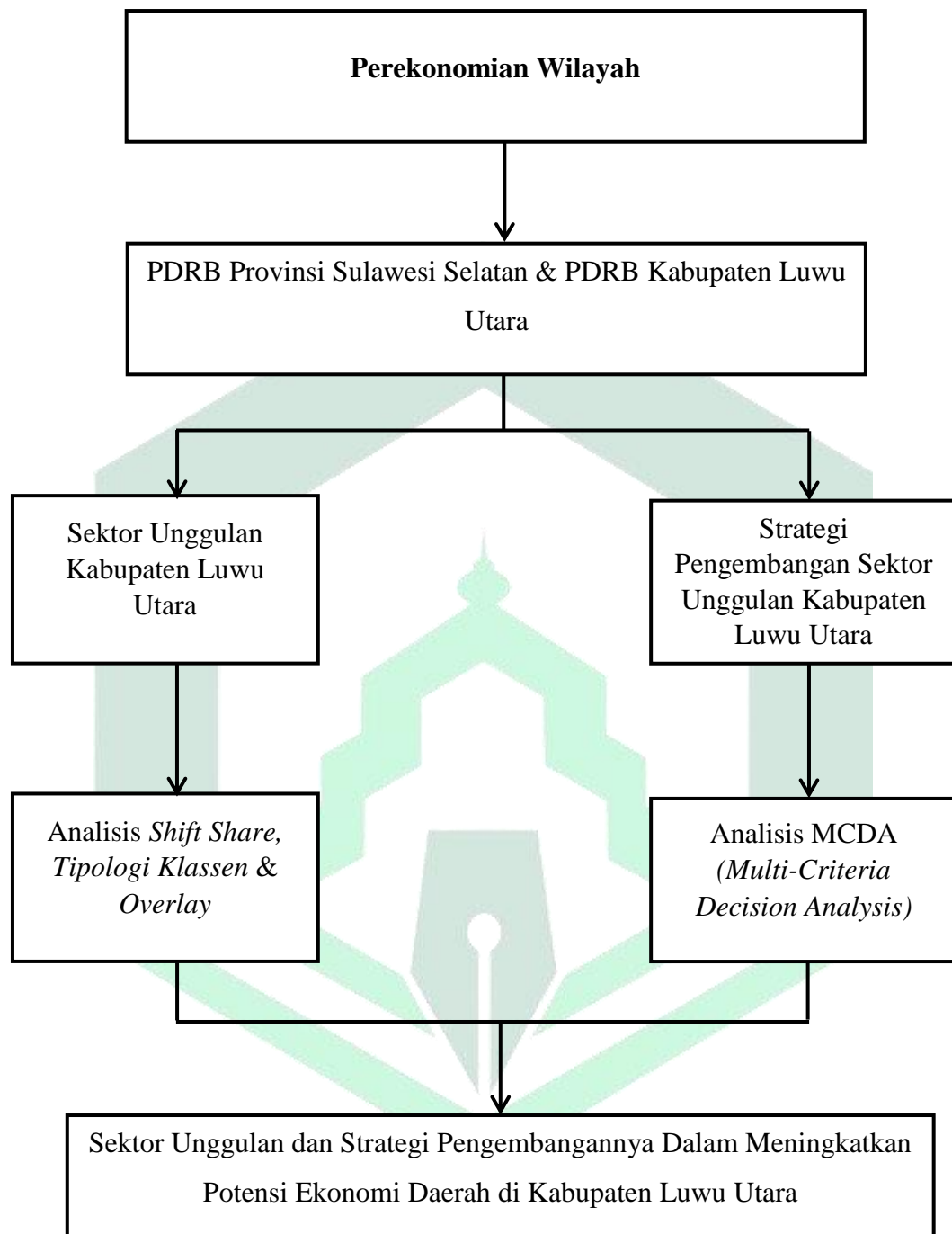
Dengan uraian tersebut, maka pola pemikiran yang menjadi dasar penelitian ini dapat dilihat dalam kerangka berpikir sebagai berikut.



IAIN PALOPO

---

<sup>32</sup> Rachman Jaya dkk, "Implementasi Multi Criteria Decision Making (MCDM) Pada Agroindustri: Suatu Telaah Literatur," Jurnal Teknologi Industri Pertanian Volume 30, No.2 (2020), 235.



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, dimana penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data berupa angka, atau data berupa kata-kata atau kalimat yang disusun menjadi data yang berbentuk angka, data yang berupa angka tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut. Analisis deskriptif digunakan digunakan untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan hasil penelitian.<sup>33</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan terhadap objek penelitian. Lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan pemilihan lokasi tersebut adalah untuk mengetahui sektor unggulan serta strategi pengembangan yang dilakukan untuk meningkatkan potensi ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian dilakukan dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2023.

#### **C. Definisi Operasional Variabel**

Untuk mengetahui deskripsi yang jelas tentang arah pembahasan, maka peneliti akan memberikan pengertian kata atau variabel penelitian yang terdapat dalam rangkaian judul proposal ini sebagai berikut:

---

<sup>33</sup> Priyono, "Metode Penelitian Kuantitatif," Edisi Revisi (Surabaya: Zifatama Publishing, 2008), 37.



**Tabel 3.1. Definisi Operasional Variabel**

No.	Variabel	Definisi Operasional
1.	Pembangunan Ekonomi	Pembangunan ekonomi adalah suatu proses peningkatan pendapatan total dan pendapatan perkapita dalam pertimbangan pertumbuhan penduduk, yang diikuti oleh perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara dan distribusi pendapatan penduduk.
2.	Sektor Unggulan	Sektor unggulan atau <i>Leading Sector</i> merupakan sektor atau bidang kegiatan ekonomi yang pertumbuhannya atau potensi dan kinerjanya lebih baik dibanding sektor yang lainnya.
3.	Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah	Strategi pengembangan potensi ekonomi daerah adalah cara yang dilakukan untuk mengembangkan masing-masing sektor unggulan dengan tujuan memperluas dan meningkatkan kemampuan sektor tersebut untuk berkontribusi dalam pembentukan PDRB.

#### **D. Populasi dan Sampel**

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit atau objek analisa yang ciri-ciri karakteristiknya hendak diduga. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari: objek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006:117).<sup>34</sup> Dalam Penelitian ini, populasi yang digunakan adalah PDRB sektoral Kabupaten Luwu Utara dan PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.

<sup>34</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)," Cetakan ke-22 (Bandung: Alfabeta, 2015), 117.

Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2013:81).<sup>35</sup> Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah PDRB Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2018-2022, data PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018-2022.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen. Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda lainnya<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui data PDRB Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku tahun 2018-2022, data PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018- 2022.

### **2. Wawancara**

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

---

<sup>35</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*," Cetakan ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 81.

<sup>36</sup> Hardani dkk, "*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*," Cetakan ke-1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), 149.

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini, metode wawancara digunakan dalam mengumpulkan data untuk mengembangkan sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara. Wawancara akan dilakukan kepada responden atau narasumber yang paling mengetahui dan berperan penting dengan berbagai hal yang berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi unggulan berdasarkan hasil analisis *Shift Share*, *Tipologi Klassen* dan *Overlay*. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan kuesioner dimana *stakeholder* diminta untuk memberikan bobot kriteria dan alternatif strategi pengembangan yang telah ditentukan.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Untuk menjawab permasalahan yang telah di jelaskan, maka digunakan beberapa metode atau teknik analisis data, yaitu :

##### **1. Analisis *Shift Share***

Putra (2011) menjelaskan analisis *Shift Share* digunakan untuk menganalisis dan mengetahui pergeseran serta peranan perekonomian di daerah. Metode ini dipakai untuk mengamati struktur perekonomian dan pergeserannya dengan penekanan pada pertumbuhan sektor di daerah, kemudian dibandingkan dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat

---

<sup>37</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,” Cetakan ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

ditunjukkan adanya *Shift* (pergeseran) hasil pembangunan ekonomi suatu daerah bila memperoleh kemajuan sesuai dengan kedudukannya dalam perekonomian.

Analisis *Shift Share* merupakan teknik yang sangat berguna dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi daerah dibandingkan dengan perekonomian nasional. Teknik ini membandingkan laju pertumbuhan perekonomian dan sektor-sektornya serta mengamati penyimpangan dan perbandingan yang ada. Apabila penyimpangan yang ada bernilai positif, maka hal itu disebut sebagai keunggulan kompetitif bagi sebuah sektor di wilayah tertentu. Namun, bila penyimpangan itu negatif, berarti sektor tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif di wilayahnya. Ini juga dapat digunakan untuk mengkaji perubahan struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah pada tingkat yang lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang pertumbuhannya lambat akan tumbuh dibawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya.

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kinerja atau produktivitas kerja perekonomian daerah dengan membandingkannya dengan wilayah yang lebih besar. Analisis *Shift Share* dapat digunakan untuk mengkaji pergeseran struktur perekonomian daerah dalam kaitannya dengan peningkatan perekonomian daerah yang bertingkat lebih tinggi. Perekonomian daerah yang didominasi oleh sektor yang lamban pertumbuhannya akan tumbuh dibawah tingkat pertumbuhan perekonomian daerah di atasnya.

- a. Komponen *National Share* ( $N_{ij}$ ), adalah jumlah pertambahan PDRB kab/kota seandainya pertumbuhannya sama dengan laju pertumbuhan PDRB Provinsi selama periode yang tercakup dalam studi.
- b. Komponen *Proportional Shift (Industrial mix)* ( $M_{ij}$ ), adalah pengaruh dari bauran industri atau pergeseran proporsional sektor  $i$  pada wilayah  $j$ . Pengukuran ini memungkinkan kita untuk mengetahui apakah perekonomian daerah terkonsentrasi pada industri yang tumbuh lebih cepat daripada perekonomian yang dijadikan acuan
- c. Komponen *Differential Shift* ( $C_{ij}$ ), adalah perbedaan antara pertumbuhan ekonomi daerah (kabupaten/kota) dan nilai tambah sektor yang sama ditingkat provinsi. Komponen ini juga digunakan untuk mengetahui daya saing suatu sektor dengan sektor yang sama pada tingkat daerah yang lebih tinggi (provinsi).

Perhitungan analisis *Shift-Share* dengan rumus sebagai berikut :

$$D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$$

Dimana:

$D_{ij}$  : *Regional economic growth*, untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah bruto sektor  $i$  di wilayah

$N_{ij}$  : *National Share*, untuk mengukur pertumbuhan regional sektor  $i$  di wilayah  $j$ .

$M_{ij}$  : *Proportional Shift (Industrial mix)*, untuk mengukur pengaruh bauran industri sektor  $i$  di wilayah  $j$ .

$C_{ij}$  : *Differential Shift*, untuk mengukur pertumbuhan nilai tambah bruto sektor i wilayah j dibandingkan pertumbuhan nilai tambah bruto sektor yang sama pada tingkat yang lebih tinggi (untuk melihat daya saing).

Berdasarkan rumus tersebut, pembangunan ekonomi dan pergeseran struktural suatu daerah ditentukan oleh tiga komponen, yaitu:

a. *National Share* ( $N_{ij}$ )

Hal ini digunakan untuk mengetahui perkembangan struktur ekonomi daerah kabupaten/kota/provinsi yang bergeser dengan melihat PDRB daerah. Pengamatan periode awal dipengaruhi oleh pergeseran dari daerah tingkat yang lebih tinggi. Hasil perhitungan akan menunjukkan peran wilayah yang lebih tinggi terhadap tingkat perekonomian yang lebih rendah. Komponen ini menggambarkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi oleh perekonomian provinsi. Rumus yang digunakan untuk menghitung *National Share* adalah sebagai berikut:

$$N_{ij} = E_{ij} * R_n$$

Keterangan :

$N_{ij}$  : Perubahan PDRB sektor i pada wilayah Kabupaten Luwu Utara yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi secara nasional

$E_{ij}$  : PDRB sektor i di Kabupaten Luwu Utara tahun awal analisis

$R_n$  : Total laju pertumbuhan PDRB sektor i di daerah Provinsi Sulawesi Selatan

b. *Propotional Shift / Industrial Mix (Mij)*

Pengembangan nilai tambah bruto sektor i dibandingkan dengan jumlah sektor di tingkat yang lebih tinggi. Untuk menghitung komponen propotional shift, maka rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\mathbf{Mij = Eij * (Rin-Rn)}$$

Keterangan :

Mij : Perubahan PDRB sektor i pada wilayah Kabupaten Luwu Utara yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor i secara nasional

Eij : PDRB sektor i di Kabupaten Luwu Utara tahun awal analisis

Rin : Total laju pertumbuhan sektor i Provinsi Sulawesi Selatan

Rn : Total laju pertumbuhan PDRB sektor i Provinsi Sulawesi Selatan

c. *Differential Shift / Competitive position (Cij)*

Posisi sektor dengan nilai kompetitif dibandingkan dengan daerah tingkat yang lebih tinggi tersebut. Berikut ini adalah perhitungan komponen pergeseran diferensial:

$$\mathbf{Cij = Eij * (Rij-Rin)}$$

Keterangan :

Cij : Keunggulan kompetitif sektor i di Kabupaten Luwu Utara.

Eij : PDRB sektor i di Kabupaten Luwu Utara tahun awal analisis

Rij : Total laju pertumbuhan sektor i di daerah Kabupaten Luwu Utara

Rin : Total laju pertumbuhan sektor i di Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Anik Setyaningrum, Skripsi, "*Analisis Strategi Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial Sebagai Upaya Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus*", Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, 2014, 40-43.

## 2. Analisis Tipologi Klassen

*Tipologi Klassen* merupakan salah satu alat analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah.<sup>39</sup> Sebelum mengklasifikasikan sektor perekonomiannya berdasarkan tabel *Tipologi Klassen*, maka perlu dilakukan terlebih dahulu perhitungan dari laju pertumbuhan dan kontribusi dari setiap masing-masing sektor. Adapun, rumus yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:

$$g = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$$

$$\bar{g} = \frac{gn_1 + \dots + gn_n}{n}$$

Keterangan :

- $g$  : Laju pertumbuhan  
 PDRB<sub>t</sub> : PDRB sektor pada tahun i  
 PDRB<sub>t-1</sub> : PDRB sektor tahun i-1  
 $\bar{g}$  : Rata-rata laju pertumbuhan

Sedangkan untuk menghitung kontribusi PDRB per sektor dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$S = \frac{PDRB}{Total\ PDRB} \times 100$$

<sup>39</sup> Abdul Rajab & Rusli, "Penentuan Sektor-Sektor Unggulan yang ada pada Kabupaten Takalar Melalui Tipologi Klassen," *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Volume 1, No. 1 (2019), 25.



$$\bar{S} = \frac{S_1 + \dots + S_n}{n}$$

Keterangan :

$S$  : Kontribusi PDRB per sektor

PDRB : PDRB sektor

Total PDRB : Jumlah total dari PDRB sektor

$\bar{S}$  : Rata-rata Kontribusi PDRB per sektor

Selanjutnya, untuk mengklasifikasikan atau mengelompokkan sektor ekonominya dapat dilihat berdasarkan tabel dari *Tipologi Klassen* berikut ini:

**Tabel 3.2 Klasifikasi Tipologi Klassen**

Kontribusi Sektor	Laju Pertumbuhan	
	$si > s$	$si < s$
$ski > sk$	<b>Kuadran I</b> Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat ( <i>developed sektor</i> )	<b>Kuadran II</b> Sektor maju tapi tertekan ( <i>stagnan sektor</i> )
$ski < sk$	<b>Kuadran III</b> Sektor potensial atau masih dapat berkembang ( <i>developing sektor</i> )	<b>Kuadran IV</b> Sektor relative tertinggal ( <i>undereveloped sektor</i> )

Sumber: Sjafrizal, 2014:198

Keterangan :

$ski$  : Kontribusi sektor i terhadap PDRB di tingkat Kabupaten

$sk$  : Kontribusi sektor i terhadap PDRB di tingkat Provinsi

$si$  : Laju pertumbuhan sektor i di tingkat Kabupaten

$s$  : Laju pertumbuhan sektor i di tingkat Provinsi

### 3. Analisis Overlay

Selanjutnya dari semua metode dilakukan peng-overlayan untuk diambil kesimpulan. Analisis *Overlay* menggabungkan hasil analisis *Tipologi Klassen* dan *Shift Share* untuk menentukan sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara. Gabungan hasil analisis menunjukkan hubungan antar metode, berisi sektor apa saja yang akan menjadi masukan serta perhatian khusus pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah. Koefisien dari ketiga komponen tersebut juga harus disamakan dimana disini diberi tanda positif (+) dan negatif (-). Gabungan *Tipologi Klassen* dan *Shift Share* nilainya sama-sama (++) positif artinya sektor tersebut dikatakan sektor unggulan. Sedangkan jika nilai jika salah satu nilai dari metode *Tipologi Klassen* dan *Shift Share* negatif (-+) maka sektor tersebut dikategorikan sebagai sektor *non-unggulan*.<sup>40</sup>

### 4. Analisis MCDA (*Multi Criteria Decision Analysis*)

Strategi pengembangan dapat ditentukan dengan beberapa cara setelah diperoleh sektor unggulannya sehingga dalam pembahasan ini lebih mengarah pada strategi yang dapat digunakan untuk mengembangkan sektor unggulan yang dapat membantu pengembangan wilayah Kabupaten Luwu Utara.

Salah satu tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan strategi pengembangan sektor unggulan dengan menggunakan analisis MCDA. MCDA tidak menghasilkan keputusan/solusi yang sama untuk setiap pengambil keputusan (*stakeholder*), tetapi menggabungkan informasi subjektif yang disebut

---

<sup>40</sup> Muammar, Skripsi, "*Analisis Sektor Unggulan Di Kota Banda Aceh Berdasarkan Metode Tipologi Klassen Dan Shift-Share*," Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021, 7.

juga preferensi informasi yang telah disediakan dan dibentuk oleh pengambil keputusan (alternatif strategi).<sup>41</sup>

Berdasarkan sebuah kamus bahasa Inggris (*The Chambers Dictionary*), kriteria adalah sebuah standar atau acuan dalam memutuskan sesuatu. Dalam pengambilan keputusan, tujuan dari kriteria ini adalah standar yang menentukan suatu pilihan untuk lebih diminati daripada pilihan lainnya. MCDA sendiri berfokus pada cara atau metode atau pendekatan dalam pengambilan keputusan yang memiliki beberapa kriteria sekaligus. (Belton, 2002).<sup>42</sup>

*Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) atau *Multi-Criteria Decision Making* (MCDM) atau analisis keputusan multi-kriteria adalah sub-disiplin penelitian operasi yang secara eksplisit mengevaluasi beberapa kriteria dalam pengambilan keputusan. Dalam proses pengambilan keputusan, para pengambil keputusan (*stakeholders*) dihadapkan pada suatu kondisi yang membutuhkan alternatif pilihan strategi atau keputusan agar tepat sasaran pada saat proses pengambilan keputusan. Alternatif keputusan dibutuhkan sebagai pembanding dari semua kemungkinan keputusan yang diambil, yaitu keputusan yang paling mampu meningkatkan keberhasilan suatu strategi, memperbesar nilai (*value*) yang diperoleh atau mengurangi efek negatif yang diterima sebagai konsekuensi dari suatu peristiwa.

IAIN PALOPO

---

<sup>41</sup> Jibria Ratna Yasir & Rhea Irwan.S, "*Analisis Ekonomi Pengembangan Aren Berkelanjutan (Studi Kasus: Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara)*," Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022, 30.

<sup>42</sup> Muhammad Ilyas Prakananda dkk, "*Rancangan Website Penyedia Informasi Potensi Lokal Dengan Menggunakan Multi Criteria Decision Analysis Dan Map Engine*," UPN Veteran Yogyakarta, 2013, 185.

*Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) merupakan suatu pendekatan yang mampu memilah keputusan mana yang lebih baik atau sesuai dengan kondisi yang ada. *Multi Criteria Decision Analysis* (MCDA) adalah metode yang dikembangkan dan digunakan dalam masalah pengambilan keputusan dan dimaksudkan untuk bisa mengakomodasi aspek-aspek di luar kriteria ekonomi dan finansial serta juga bisa mengikut sertakan berbagai pihak yang terkait dengan suatu proyek secara komprehensif dan *scientific* (kuantitatif maupun kualitatif).

Analisis ini menggunakan persepsi *stakeholders* terhadap kriteria-kriteria atau variabel-variabel yang dibandingkan dalam pengambilan keputusan. Analisis multi kriteria memiliki sejumlah kelebihan diantaranya adalah:

- 1) Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka bagi semua pihak berkepentingan,
- 2) Variabel dan kriteria analisis yang digunakan dapat lebih luas, baik yang kuantitatif maupun kualitatif,
- 3) Pemilihan variabel tujuan dan kriteria terbuka untuk dianalisis dan diubah jika dianggap tidak sesuai,
- 4) Nilai dan bobot ditentukan secara terbuka sesuai dengan persepsi pihak terkait yang dilibatkan (*stakeholders*),
- 5) Memberikan arti lebih terhadap proses komunikasi dalam pengambilan keputusan, diantara para penentu kebijakan, dan dalam hal tertentu dengan masyarakat luas.

Teknik MCDA berfokus pada penyusunan dan penentuan mana keputusan yang lebih sesuai pada suatu kondisi yang dihadapi oleh organisasi. Tujuan dari

teknik ini adalah untuk mendukung pengambil keputusan untuk menentukan keputusan yang tepat pada kondisi yang sedang dialami.<sup>43</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) adalah sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama menentukan sasaran, sebelum mengambil keputusan, target atau sasaran harus ditentukan terlebih dahulu agar keputusan yang akan diambil menjadi relevan dan dapat mencegah adanya konflik kepentingan. Sasaran yang diambil dalam penelitian ini adalah strategi pengembangan sektor unggulan dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah Kabupaten Luwu Utara.
- 2) Langkah kedua menentukan kriteria, pembuatan kriteria menjadi dasar pengambilan keputusan. Keputusan apa yang akan diambil akan bergantung pada kriteria dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 3) Langkah ketiga membuat pembobotan kriteria, setelah kriteria ditetapkan, setiap kriteria harus diberikan bobot nilai. Pembobotan perlu dilakukan untuk menentukan kriteria mana yang lebih penting dan relevan terhadap sasaran yang sudah ditetapkan. Semakin penting kriteria tersebut maka bobotnya akan semakin tinggi dan juga sebaliknya.
- 4) Langkah keempat membuat penilaian, setelah kriteria diberikan bobot nilai, langkah selanjutnya adalah memberikan nilai pada setiap alternatif keputusan pada setiap kriteria.

---

<sup>43</sup> Bayu Catur Nugroho, "Analisis Skala Prioritas Penanganan Bendungan Cengklik dengan Metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA)," Program Studi Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021, 8-9.

- 5) Langkah kelima menentukan/merekomendasikan keputusan, tahap terakhir dalam teknik MCDA adalah menentukan alternatif mana yang akan dijadikan keputusan atau merekomendasikan keputusan terkait dengan hasil penilaian yang sudah dilakukan, yakni menentukan alternatif strategi mana yang terbaik yang dijadikan prioritas untuk pengembangan sektor unggulan berkelanjutan di Kabupaten Luwu Utara.

Hasil teknik MCDA adalah rekomendasi alternatif mana yang sebaiknya dipilih. Perlu diingat bahwa pada dasarnya setiap keputusan adalah unik. Maka dari itu hasil dari keputusan yang diambil akan berbeda jika situasi yang dihadapi berbeda. Pada teknik ini memiliki beberapa alternatif keputusan yang diambil dan memberikan prioritas pada setiap alternatif, sehingga jika alternatif pertama gagal dilakukan maka dapat menggunakan alternatif kedua dan alternatif lainnya jika ada.<sup>44</sup> Adapun prosedur/tahapan penyelesaian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Menentukan data kriteria
- 2) Menentukan nilai kriteria menggunakan perbandingan berpasangan berdasarkan skala perbandingan 1-9 (sesuai teori).
- 3) Menjumlahkan nilai pada setiap kolom *matrix* yang dibuat sebelumnya
- 4) Membagi setiap nilai dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk memperoleh normalisasi matriks.

---

<sup>44</sup> Antonius Alijoyo dkk, "Multi-criteria Decision Analysis (Analisis Keputusan Multikriteria)," (Bandung: CRMS Indonesia, 2021).

- 5) Menjumlahkan nilai-nilai dari setiap baris dan membaginya dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata.
- 6) Kalikan setiap nilai pada kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, nilai pada kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, dan seterusnya.
- 7) Jumlahkan setiap baris
- 8) Hasil dari penjumlahan baris dibagi dengan elemen prioritas relatif yang bersangkutan.
- 9) Jumlahkan hasil bagi di atas dengan banyaknya elemen yang ada.
- 10) Menghitung *Consistency Index* (CI) dengan rumus:  $CI = (\lambda_{maks} - n) / (n - 1)$ , dimana n adalah banyaknya elemen.
- 11) Menghitung Rasio Konsistensi/*Consistency Ratio* (CR) dengan rumus:  $CR = CI / IR$ , dimana IR adalah *Index Random Consistency*.
- 12) Langkah terakhir adalah proses perankingan alternatif, dimana akan diurutkan dari yang tertinggi ke terendah.

**a. Kriteria Penentuan Strategi Pengembangan Sektor Unggulan**

Dalam menentukan strategi pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara, maka akan ditetapkan penilaian kriteria yang harus terpenuhi dalam kebijakan yang akan dirumuskan. Penilaian kriteria tersebut diantaranya adalah mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan asli daerah, menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan daya saing daerah.

- 1) Mampu mengurangi angka kemiskinan

Kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan lain-lain. Dengan mengetahui sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara, maka diharapkan pemerintah dapat mengembangkan sektor tersebut sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara.

2) Meningkatkan pendapatan asli daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang harus diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dengan menemukan keunggulan atau potensi asli daerah, maka hal tersebut akan membantu suatu daerah dalam meningkatkan pendapatannya.

3) Menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

4) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja

Penyerapan tenaga kerja dapat diartikan sebagai kondisi dimana banyaknya lapangan pekerjaan yang telah terisi yang dapat dilihat dari jumlah penduduk yang bekerja. Dengan adanya sektor unggulan, maka diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan di Luwu Utara.



5) Meningkatkan daya saing daerah

Daya saing daerah merupakan ukuran yang mendeskripsikan kondisi serta kemampuan sebuah daerah dalam memaksimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**b. Pembobotan Kriteria**

Penentuan bobot kepentingan antar kriteria dilakukan dengan membandingkan masing-masing kriteria. Dalam penentuan bobot kriteria pendapat kualitatif dari *stakeholders* digunakan skala penilaian untuk menilai pendapat tersebut dalam bentuk angka (kuantitatif). Menurut Saaty (1993), untuk berbagai permasalahan, skala 1 sampai 9 merupakan skala yang terbaik dalam mengkualifikasikan pendapat. Skala bilangan dari 1 sampai 9. Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya. Apabila suatu elemen dibandingkan dengan dirinya sendiri maka diberi nilai 1. Nilai dan definisi pendapat kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3. Skala Perbandingan Berpasangan**

<b>Intensitas Kepentingan</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kedua elemen sama pentingnya
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya
7	Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada

	elemen lainnya
9	Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan

Perbandingan dilakukan berdasarkan kebijakan pembuat keputusan dengan menilai tingkat kepentingan satu elemen terhadap elemen lainnya. Sedangkan untuk penilaian perbandingan berpasangan dapat dilihat pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4. Matriks Perbandingan Berpasangan**

Kriteria	A	B	C
A	1	X <sub>ab</sub>	X <sub>ac</sub>
B	X <sub>ba</sub>	1	X <sub>bc</sub>
C	X <sub>ca</sub>	X <sub>cb</sub>	1

*Sumber: Saaty (1993)*

Dalam metode dasar yang dikembangkan Saaty (1993), untuk mengidentifikasi bobot dari suatu kriteria didasarkan pada ide yang relatif lanjut dari aljabar matrik dan menghitung bobot sebagai elemen dari suatu *eigenvector* yang diasosiasikan dengan maksimum *eigenvector* dari suatu matriks.

### c. Konsistensi Pembobotan

Pengukuran konsistensi dari suatu matriks didasarkan atas suatu *eigenvalue* maksimum, sehingga inkonsistensi yang biasa dihasilkan matriks perbandingan dapat diminimalkan. Rumus untuk menghitung indeks konsistensi ditunjukkan dalam persamaan 1.

$$CI = \frac{\lambda_{maks.} - n}{n - 1} \quad (1)$$

Dimana:

CI = indeks konsistensi

$\lambda_{maks}$  = nilai *eigen* maksimum

n = ukuran matriks

Penetapan suatu matriks dianggap konsisten jika nilai Rasio Konsistensi (CR) lebih kecil atau sama dengan 0,1. Rasio konsistensi dihitung dengan persamaan 2.

$$CR = CI/RI \quad (2)$$

Dalam hal ini RI adalah indeks random yang nilainya ditentukan berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Saaty (1993) dengan menggunakan 500 sampel, dimana jika “*judgement*” numeric diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, ..., 1, 2, ..., 9 akan diperoleh rata-rata konsistensi untuk matriks dengan ukuran yang berbeda.<sup>45</sup> Dapat dilihat pada Tabel 3.5.

**Tabel 3.5. Nilai Indeks Random**

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI	0,00	0,00	0,58	0,90	1,12	1,24	1,32	1,41	1,45	1,49	1,51	1,48	1,56	1,57	1,59

Sumber : Saaty (1993)

IAIN PALOPO

<sup>45</sup> Thantawi dkk, “Prioritas Penanganan Jalan Kabupaten Pidie Menggunakan Metode Analisis Multi Kriteria (AMK),” Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan Vol.3 No.4, (2020), 259-260.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Letak Geografis dan Administratif

Kabupaten Luwu Utara adalah salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Luwu yang kemudian dimekarkan menjadi Kabupaten yang independen. Sampai saat ini, Kabupaten Luwu Utara telah memiliki 15 Kecamatan.

Luas wilayah Kabupaten Luwu Utara berdasarkan data dari BPS tercatat seluas 7.502,58 kilometer persegi. Adapun luas wilayah Kabupaten Luwu Utara menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022**

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
1	Sabbang	424,11	5,65
2	Sabbang Selatan	100,97	1,35
3	Baebunta	203,16	2,71
4	Baebunta Selatan	92,09	1,23
5	Malangke	229,70	3,06
6	Malangke Barat	214,05	2,85
7	Sukamaju	208,21	2,78
8	Sukamaju Selatan	47,27	0,63
9	Bone-bone	127,92	1,71
10	Tanalili	149,41	1,99

No.	Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Persentase
11	Masamba	1.068,85	14,25
12	Mappedecceng	275,50	3,67
13	Rampi	1.565,65	20,87
14	Rongkong	686,50	9,15
15	Seko	2.109,19	28,11
<b>Jumlah</b>		<b>7.502,58</b>	<b>100,00</b>

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara, 2023

Adapun batas-batas wilayah Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Tana Toraja.
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Teluk Bone.

Luas masing-masing dari Kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Utara diantaranya adalah Kecamatan Sabbang dengan luas wilayah 424,11 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sabbang Selatan dengan luas 100,97 km<sup>2</sup>, Kecamatan Baebunta luas wilayah dengan 203,16 km<sup>2</sup>, Kecamatan Baebunta Selatan luas wilayah dengan 92,09 km<sup>2</sup>, Kecamatan Malangke luas 229,70 km<sup>2</sup>, Kecamatan Malangke Barat dengan luas 214,05 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sukamaju luas 208,21 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sukamaju Selatan luas 47,27 km<sup>2</sup>, Kecamatan Bone-Bone 127,92 km<sup>2</sup>, Kecamatan Tanalili 149,41 km<sup>2</sup>, Kecamatan Masamba 1.068,85 km<sup>2</sup>, Kecamatan Mappedecceng 275,50 km<sup>2</sup>, Kecamatan Rampi 1.565,65 km<sup>2</sup>, Kecamatan Rongkong 686,50 km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Seko dengan luas wilayah sebesar 2.109,19 km<sup>2</sup>

Kabupaten Luwu Utara terdiri dari 15 kecamatan, 174 desa atau kelurahan yang semuanya merupakan definitif. Kecamatan Masamba merupakan salah satu kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terbanyak, yaitu sebanyak 20 desa/kelurahan, Sedangkan Kecamatan Rampi merupakan Kecamatan dengan jumlah desa paling sedikit, yakni hanya terdapat enam desa. Di antara 15 kecamatan di Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Seko tercatat sebagai kecamatan terluas dengan luas wilayah 2.109,19 km<sup>2</sup> atau 28,11% dari total wilayah Kabupaten Luwu Utara, sekaligus menjadi kecamatan yang memiliki letak terjauh dari Ibukota Kabupaten Luwu Utara, yaitu berjarak 142 km. Urutan kedua adalah Kecamatan Rampi (20,87%) sedangkan wilayah dengan yang termasuk sebagai wilayah tersempit di Kabupaten Luwu Utara adalah Kecamatan Bone-Bone dengan luas (1,71%).

**Gambar 4.1 Peta Administrasi Kabupaten Luwu Utara**



Kabupaten Luwu Utara terletak antara 01° 53' 19" – 02° 55' 36" Lintang Selatan dan 119° 47' 46" – 120° 37' 44" Bujur Timur. Terdapat sekitar 8

sungai besar yang mengalir wilayah Kabupaten Luwu Utara. Sungai yang terpanjang adalah Sungai Baliase dengan panjang 185 Km yang melewati Kecamatan Masamba. Kabupaten Luwu Utara juga dilalui oleh jalan raya Trans Sulawesi sehingga memiliki posisi amat strategis bagi pergerakan barang dan jasa, serta merupakan kabupaten penghubung dari provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

## 2. Kondisi Penduduk

Penduduk Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2022 sebanyak 327,820 jiwa yang terdiri dari 165,682 jiwa penduduk laki-laki dan 162,138 penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Luwu Utara secara keseluruhan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Sedangkan untuk kecamatan dengan populasi penduduk paling banyak adalah kecamatan Masamba dengan total penduduk 39,152 jiwa dan Kecamatan Rampi memiliki jumlah penduduk paling sedikit dengan total 3,153 jiwa.

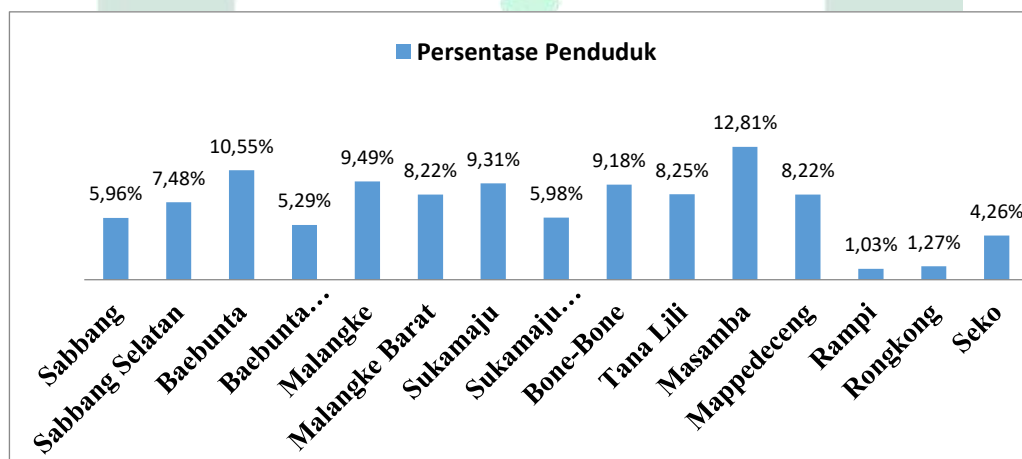
**Tabel 4.2 Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022**

Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
Sabbang	18,198	5,96	42,91
Sabbang Selatan	22,861	7,48	226,41
Baebunta	32,223	10,55	158,61
Baebunta Selatan	16,174	5,29	175,63
Malangke	28,996	9,49	126,23
Malangke Barat	25,118	8,22	117,35
Sukamaju	28,457	9,31	136,67
Sukamaju Selatan	18,256	5,98	386,21
Bone-Bone	28,037	9,18	219,18

Kecamatan	Penduduk	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>
Tana Lili	25,204	8,25	168,69
Masamba	39,152	12,81	36,63
Mappedeceng	25,104	8,22	91,12
Rampi	3,153	1,03	2,01
Rongkong	3,865	1,27	5,63
Seko	13,022	4,26	6,17
<b>Luwu Utara</b>	<b>327,820</b>	<b>100,00</b>	<b>43,69</b>

Sumber: Kabupaten Luwu Utara dalam Angka, 2023

**Gambar 4.2 Grafik Persentase Penduduk di Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022**



Sumber: Kabupaten Luwu Utara dalam Angka 2023 (data diolah)

Berdasarkan gambar grafik 4.2 persebaran penduduk antar kecamatan terlihat masih belum merata. Kepadatan penduduk biasanya terkonsentrasi di pusat perekonomian yang umumnya memiliki segala fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk. Masalah yang sering timbul akibat kepadatan penduduk pada umumnya berhubungan dengan perumahan, kesehatan, dan keamanan. Oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah



dalam melaksanakan pembangunan, seperti memprioritaskan pembangunan yang dilaksanakan di daerah-daerah yang masih terisolir dan kekurangan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sekaligus harus berkaitan dengan daya dukung lingkungan dan dapat menciptakan lapangan kerja yang luas bagi penduduk setempat juga.

Persebaran penduduk di Kabupaten Luwu Utara terkonsentrasi di empat kecamatan, yaitu kecamatan Masamba, Baebunta, Malangke, Sukamaju dan Bone-Bone dengan persentase masing-masing sebesar 12,81 persen, 10,55 persen, 9,49 persen, 9,31 persen dan 9,18 persen. Sedangkan Kecamatan dengan jumlah penduduknya paling sedikit adalah kecamatan Rampi dengan total penduduk 3,153 jiwa. Kecamatan Masamba yang luasnya 1.068,85 km<sup>2</sup> merupakan daerah terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 36,63 jiwa per km<sup>2</sup>. Sebaliknya Kecamatan Rampi merupakan daerah terjarang penduduk meskipun secara geografis memiliki wilayah lebih luas dibanding Kecamatan Masamba yaitu dengan luas wilayah 1.565,65 km<sup>2</sup>.

### **3. Struktur Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto**

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha akan menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha.

**Tabel 4.3 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2022**

Lapangan Usaha PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	50,09	47,21	47,02	49,04	49,97
Pertambangan dan Penggalian	2,14	2,15	2,22	2,13	1,95
Industri Pengolahan	4,39	4,86	4,78	4,66	4,39
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,08	0,09	0,09	0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi	11,91	13,13	12,82	12,43	12,53
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,50	10,20	10,12	9,64	9,46
Transportasi dan Pergudangan	2,06	2,19	2,03	2,01	2,16
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,10	1,16	1,08	1,04	1,03
Informasi dan Komunikasi	2,85	2,94	3,20	3,10	3,13
Jasa keuangan dan Asuransi	1,31	1,27	1,32	1,40	1,37
Real Estate	3,19	3,16	3,22	3,00	2,82
Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,71	4,89	4,94	4,66	4,49
Jasa Pendidikan	5,71	5,75	6,05	5,68	5,58
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,90	0,95	1,07	1,07	1,00

Lapangan Usaha PDRB	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jasa Lainnya	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02
<b>Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara, 2023

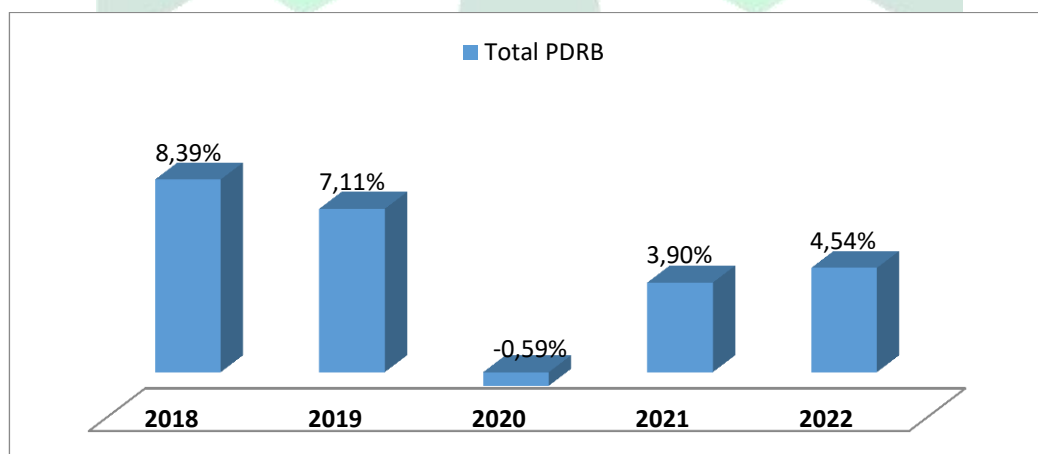
Selama 5 tahun terakhir (2018 - 2022) struktur perekonomian Kabupaten Luwu Utara didominasi oleh 3 sektor lapangan usaha, yaitu: sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Konstruksi; dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Utara.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yaitu mencapai 49,97%. Selanjutnya kategori Kontruksi sebesar 12,53%, kemudian disusul Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan total sebesar 9,46%. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang paling berperan penting di Kabupaten Luwu Utara, hal ini bisa dilihat dari total nilai kontribusi yang diberikan terhadap PDRB. Artinya bahwa sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan masih menjadi sektor primer di Kabupaten Luwu Utara.

Berdasarkan urutan dari kontribusi setiap sektor perekonomian berkaitan dengan pembentukan PDRB di Kabupaten Luwu Utara. Kontribusi PDRB terbesar setelah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Kontruksi; dan

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor adalah sektor Jasa Pendidikan dengan kontribusi 5,58%, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan kontribusi sebesar 4,49%, Industri Pengolahan 4,39%, Informasi dan Komunikasi sebesar 3,13%, Real Estate 2,82, Transportasi dan Pergudangan kontribusi sebesar 2,16%, Pertambangan dan Penggalian 1,95%, Jasa Keuangan dan Asuransi dengan sumbangan sebesar 1,37%, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1,03%, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan kontribusi 1%, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 0,08%, Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya memiliki kontribusi yang sama yakni hanya 0,02%, lalu sektor yang sama sekali tidak memiliki kontribusi di Kabupaten Luwu Utara adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan kontribusi 0%.

**Gambar 4.3 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Utara Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2018-2022**



Sumber: BPS Kabupaten Luwu Utara 2023 (data diolah)

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Luwu Utara atas dasar harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2020 terjadi penurunan atau

kontraksi sebesar -0,59 persen. Penurunan tersebut disebabkan oleh dampak dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan sebagian besar kegiatan ekonomi terganggu. Selain hal tersebut, tepat di tahun 2020 Kabupaten Luwu Utara juga sempat dilanda banjir bandang sehingga ikut menghambat kegiatan perekonomian. Pada tahun 2021 kegiatan ekonomi sedikit demi sedikit semakin pulih dan mampu bangkit dari keterpurukan sehingga pertumbuhan di Kabupaten Luwu Utara ikut mengalami kenaikan sebesar 3,90%. Selanjutnya di tahun 2022 meningkat lagi sebesar 4,54%.

## **B. Hasil Analisis Data**

### **1. Analisis Data Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Luwu Utara**

Dalam penelitian ini, analisis data yang akan digunakan yaitu menggunakan analisis *Shift Share*, *Tipologi Klassen* dan *Overlay*. Tujuan dari analisis ini adalah untuk menentukan sektor unggulan dan sektor yang memiliki daya saing selain itu juga sebagai perbandingan pertumbuhan antara satu sektor dengan sektor lainnya di Kabupaten Luwu Utara.

#### **a. Analisis *Shift Share***

Dengan menerapkan analisis *Shift Share*, kita bisa mengasumsikan bahwa perubahan dalam struktur ekonomi atau hasil aktivitas ekonomi suatu wilayah berhubungan positif dengan struktur atau kinerja sektor ekonomi dengan wilayah di atasnya seperti Provinsi Sulawesi Selatan. Perubahan kinerja sektor ekonomi di suatu daerah terhadap wilayah di atasnya akan dipengaruhi oleh beberapa komponen seperti pertumbuhan ekonomi Provinsi (Nij), ekonomi Proporsional (Mij), dan keunggulan kompetitif (Cij).

**Tabel 4.4 Analisis Shift Share Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2018 - 2022**

Lapangan Usaha	Komponen			Dampak Nyata Pertumbuhan
	<i>National Share (Nij)</i>	<i>Proportional Shift (Mij)</i>	<i>Differential Shift (Cij)</i>	<i>Regional Shift (Dij)</i>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	622.514,56	-211.660,42	-70.885,94	339.968,20
Pertambangan dan Penggalian	22.849,12	-18.822,59	15.098,27	19.124,80
Industri Pengolahan	52.491,17	6.245,83	7.812,31	66.549,30
Pengadaan Listrik dan Gas	1.732,56	2.261,20	-1.675,86	2.317,90
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57,48	11,87	25,25	94,60
Konstruksi	142.093,55	2.629,13	33.221,32	177.944,00
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	146.046,80	28.022,48	-5.953,09	168.116,20
Transportasi dan Pergudangan	25.423,31	-21.116,88	21.672,38	25.978,80
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.716,00	-4.408,02	1.663,82	10.971,80
Informasi dan Komunikasi	52.861,31	66.415,05	15.765,14	135.041,50
Jasa Keuangan dan Asuransi	18.123,61	-8.394,34	11.245,24	20.974,50
Real Estate	36.899,27	-336,18	-9.765,39	26.797,70
Jasa Perusahaan	228,40	52,51	-67,61	213,30
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	59.984,47	-4.801,98	19.256,61	74.439,10
Jasa Pendidikan	76.957,21	17.448,45	14.914,94	109.320,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.633,85	15.646,72	-3.510,07	23.770,50
Jasa Lainnya	352,96	-62,75	-141,61	148,60
<b>Total PDRB</b>	<b>1.283.965,62</b>	<b>-130.869,94</b>	<b>48.675,72</b>	<b>1.201.771,40</b>

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil dari perhitungan *Shift Share* per sektor Lapangan Usaha pada Tabel 4.4 dapat bahwa secara keseluruhan sektor di Kabupaten Luwu Utara memiliki nilai komponen *Nasional Share* (Nij) yang positif (+). Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan sektor ekonomi tersebut secara positif

dipengaruhi oleh pertumbuhan yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana pengaruh pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan terbesar terjadi pada sektor pertanian sebesar Rp.622.514,560.000,-, atau dengan nilai kontribusi sebesar 48,48% sedangkan untuk yang terkecil adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp.57,480.000,-. Dengan total pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Kabupaten Luwu Utara adalah senilai Rp.1.283.965.620.000,-. Dalam hal ini kebijakan umum Provinsi Sulawesi Selatan memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan sektor pembangunan di Kabupaten Luwu Utara.

Sedangkan nilai *Proportional Shift* (Mij) secara keseluruhan atau total perekonomian regional Kabupaten Luwu Utara masih tergolong lambat atau tidak berkembang. Hal ini dapat dilihat dalam nilai *Proportional Shift* (Mij) total dengan nilai yang negatif (130.869,94). Namun, jika ditinjau secara sektoral maka terdapat delapan sektor yang memiliki nilai negatif (-) yaitu sektor pertanian dengan jumlah -211.660,42, kemudian sektor Transportasi dan Pergudangan dengan jumlah -21.116,88, selanjutnya disusul sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar -18.822,59, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi yaitu memiliki nilai -8.394,34, selanjutnya sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yaitu -4.801,98, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -4.408,02, dan kemudian sektor Real Estate dengan jumlah nilai Mij sebesar -336,18, serta yang terakhir adalah sektor Jasa Lainnya dengan jumlah -62,75. Dengan nilai keseluruhan *Proportional Shift* (Mij) yang negatif (-), maka hal tersebut menunjukkan bahwa

sektor perekonomian yang berada di Kabupaten Luwu Utara memiliki keterlambatan pertumbuhan.

Nilai *Differential Shift* (Cij) secara keseluruhan adalah positif, nilai tersebut menunjukkan bahwa perekonomian regional Kabupaten Luwu Utara memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif yang tinggi terhadap perekonomian di Provinsi Sulawesi Selatan. Terdapat sepuluh sektor dengan angka Cij positif yang memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif. Kesepuluh sektor tersebut diantaranya adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Kontruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan terakhir sektor Jasa Pendidikan. Sektor Kontruksi memiliki nilai Cij 33.221,32 menjadikannya sebagai sektor dengan tingkat keunggulan kompetitif tertinggi dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki nilai Cij -70.885,94 menjadikannya sektor paling tidak kompetitif atau tidak berdaya saing di Kabupaten Luwu Utara.

Nilai dari Pergeseran Bersih (Dij) pada semua Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Utara secara total bernilai positif, hal ini mengindikasikan keseluruhan sektor tergolong progresif dan tidak adanya pergeseran sektor ekonomi dalam rentang tahun 2018 ke tahun 2022, yang mana sektor pertanian masih menjadi sektor primer di kabupaten luwu utara. Hal ini ditunjukkan pada



hasil perhitungan Pergeseran Bersih (Dij) dimana pergeseran bersih sektor pertanian sebesar Rp.339.968,200.000,- kemudian disusul sektor Kontruksi yang pergeseran bersihnya sebesar Rp.177.944,000.000,-. Selanjutnya sektor yang menunjukkan Pergeseran Bersih (Dij) terbesar yang menempati posisi ketiga di Kabupaten Luwu Utara adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan pergeseran bersihnya sebesar Rp.168.116,200.000,-.

b. *Analisis Tipologi Klassen*

*Analisis Tipologi Klassen* merupakan analisis yang digunakan untuk melihat gambaran terkait paradigma dan struktur pertumbuhan dari masing-masing sektor ekonomi serta untuk menentukan sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara dengan melihat sektor-sektor yang masuk ke dalam kuadran satu (I) pada *Tipologi Klassen*. Gambaran tentang paradigma atau pola struktur pertumbuhan ini nantinya dapat dipergunakan untuk memperkirakan prospek ekonomi di Kabupaten Luwu Utara pada masa yang akan datang. Analisis *Tipologi Klassen* pada penentuan sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

**Tabel 4.5 Hasil Analisis *Tipologi Klassen* Kabupaten Luwu Utara, Tahun 2018-2022 Persen (%)**

Lapangan Usaha	Provinsi Sulawesi Selatan		Kabupaten Luwu Utara		Kuadran
	Rata-Rata Pertumbuhan (s)	Rata-Rata Kontribusi (Sk)	Rata-Rata Pertumbuhan (Si)	Rata-Rata Kontribusi (Ski)	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,54	22,05	7,64	48,67	I

Lapangan Usaha	Provinsi Sulawesi Selatan		Kabupaten Luwu Utara		Kuadran
	Rata-Rata Pertumbuhan (s)	Rata-Rata Kontribusi (Sk)	Rata-Rata Pertumbuhan (Si)	Rata-Rata Kontribusi (Ski)	
Pertambangan dan Penggalian	8,84	4,79	5,08	2,12	IV
Industri Pengolahan	7,28	12,84	7,84	4,62	III
Pengadaan Listrik dan Gas	9,48	0,07	6,41	0,09	II
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,39	0,10	7,56	0,00	III
Konstruksi	7,96	14,09	9,18	12,56	III
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,63	14,58	7,58	9,78	IV
Transportasi dan Pergudangan	8,22	3,72	9,19	2,09	III
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,86	1,32	6,05	1,08	III
Informasi dan Komunikasi	9,19	5,30	10,09	3,04	III
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,87	3,67	8,74	1,33	III
Real Estate	5,37	3,66	4,32	3,08	IV
Jasa Perusahaan	7,96	0,45	6,65	0,02	IV
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,33	4,50	6,40	4,74	I
Jasa Pendidikan	5,82	5,31	6,97	5,75	I
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,21	2,20	10,54	1,00	IV
Jasa lainnya	5,98	1,35	4,47	0,03	IV

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 dapat dilihat rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Dimana sektor yang memiliki rata-rata kontribusi paling besar adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, dengan nilai pertumbuhan 7,64% dan nilai kontribusi sebesar 48,67%. Selanjutnya disusul oleh sektor Kontruksi dengan kontribusi sebesar 12,56%, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusinya sebesar 9,78%. Sedangkan untuk sektor dengan kontribusi paling rendah adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yakni 0,00%. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan menjadi sektor paling berkontribusi bagi Provinsi Sulawesi Selatan yakni dengan rata-rata kontribusi sebesar 22,05%. Sedangkan sektor Pengadaan Listrik dan Gas memiliki kontribusi terendah di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai hanya 0,07%.

Berikutnya sektor yang memiliki nilai pertumbuhan paling tinggi di Kabupaten Luwu Utara adalah sektor Informasi dan Komunikasi dengan pertumbuhan 10,09%. Sektor Real Estate dengan nilai 4,32% adalah sektor yang memiliki rata-rata pertumbuhan paling rendah. Sedangkan sektor dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan nilai sebesar 11,21% adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dengan nilai pertumbuhan sebesar 5,33% merupakan sektor yang memiliki nilai rata-rata pertumbuhan paling kecil di Provinsi Sulawesi Selatan.

**Tabel 4.6 Hasil Klasifikasi Sektor Ekonomi Kabupaten Luwu Utara  
Berdasarkan *Tipologi Klassen*, Tahun 2018-2022**

Kontribusi Sektor	Laju Pertumbuhan	
	si > s	si < s
<b>ski &gt; sk</b>	<p><b>Kuadran I</b> Sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (<i>developed sektor</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan</li> <li>2. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib</li> <li>3. Jasa Pendidikan</li> </ol>	<p><b>Kuadran II</b> Sektor maju tapi tertekan (<i>stagnan sektor</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Listrik dan Gas</li> </ol>
<b>ski &lt; sk</b>	<p><b>Kuadran III</b> Sektor potensial atau masih dapat berkembang (<i>developing sektor</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang</li> <li>2. Konstruksi</li> <li>3. Transportasi dan Pergudangan</li> <li>4. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</li> <li>5. Informasi dan Komunikasi</li> <li>6. Jasa Keuangan dan Asuransi</li> <li>7. Industri Pengolahan</li> </ol>	<p><b>Kuadran IV</b> Sektor relative tertinggal (<i>undereveloped sektor</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa lainnya</li> <li>2. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial</li> <li>3. Jasa Perusahaan</li> <li>4. Real Estate</li> <li>5. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor</li> <li>6. Pertambangan dan Penggalian</li> </ol>

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil dari klasifikasi sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018-2022 menurut Analisis *Tipologi Klassen*, maka terdapat tiga sektor yang dapat dikategorikan sebagai sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat (*developed sektor*) atau masuk dalam kuadran I yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Administrasi

Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib dan sektor Jasa Pendidikan. Itu artinya bahwa ketiga sektor tersebut memiliki kemajuan dan pertumbuhan yang pesat dibanding sektor ekonomi lainnya di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi PDRB, dimana ketiga sektor tersebut memiliki nilai lebih besar pada tingkat Kabupaten dibanding di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan yaitu yang dapat disimbolkan dengan  $(ski > sk)$  dan  $(si > s)$ .

Kemudian yang masuk kategori sektor maju tapi tertekan (*stagnan sektor*) atau kuadran II yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas. Sektor tersebut memiliki kemajuan akan tetapi mendapatkan tekanan dalam proses perkembangannya. Kemajuannya dapat dilihat dari kontribusi yang diberikan terhadap PDRB Kabupaten Luwu Utara lebih besar dibandingkan dengan sumbangan kontribusi sektor yang sama di tingkat Provinsi. Tekanan dalam perkembangannya dapat terlihat dari tingkat rata-rata laju pertumbuhan PDRB sektor tersebut yang lebih kecil dibandingkan dengan tingkat rata-rata pertumbuhan PDRB pada sektor yang sama pada tingkat Provinsi. Disimbolkan dengan  $(ski > sk)$  dan  $(si < s)$ .

Selanjutnya pada sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing sektor*) atau kuadran III terdapat tujuh sektor, diantaranya adalah sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, dan yang terakhir adalah sektor Industri Pengolahan. Ketujuh sektor tersebut memiliki potensi yang masih bisa berkembang di masa yang akan

datang. Potensi ini dapat dilihat dari tingkat rata-rata pertumbuhan PDRB sektor tersebut yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan PDRB sektor yang sama pada tingkat Provinsi. Meskipun memiliki rata-rata pertumbuhannya besar pada tingkat Kabupaten, namun sektor tersebut memiliki tingkat kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Luwu Utara lebih kecil dibandingkan dengan tingkat kontribusi pada PDRB Provinsi Sulawesi Selatan. Disimbolkan dengan  $(ski < sk)$  dan  $(si > s)$ .

Sektor yang tergolong sebagai sektor relative tertinggal (*undereveloped sektor*) atau kuadran IV terdapat enam sektor, keenam sektor tersebut adalah sektor Jasa lainnya, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sektor Jasa Perusahaan, sektor Real Estate, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, dan sektor Pertambangan dan Penggalian. Keenam sektor tersebut memiliki nilai rata-rata pertumbuhan dan kontribusi PDRB di tingkat Kabupaten yang kecil dibandingkan dengan nilai rata-rata pertumbuhan dan kontribusi PDRB pada tingkat Provinsi. Sektor ini disimbolkan dengan  $(ski < sk)$  dan  $(si < s)$ .

c. Analisis *Overlay*

Analisis *Overlay* adalah metode yang digunakan untuk memberikan penilaian pada sektor-sektor ekonomi yang ada di Kabupaten Luwu Utara. Selanjutnya untuk menentukan sektor unggulan dengan mengacu terhadap ketiga alat analisis yang telah digunakan yakni hasil analisis atau perhitungan dari *Shift Share* dan *Tipologi Klassen* yang kemudian dilakukan analisis *Overlay* (gabungan). Koefisien dari kedua analisis tersebut harus disamakan dimana

disimbolkan dengan tanda positif (+) dan negatif (-). Hal ini juga sesuai dengan penelitian (Andi Kurniawan Karta Negara & Aning Kesuma Putri, 2020) yang menjelaskan bahwasannya, apabila identifikasi dari analisis *Overlay* keduanya bernilai positif (++) maka sektor tersebut dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan, sebaliknya jika hasil analisisnya menghasilkan positif-negatif (+-) atau negatif-negatif (--) maka sektor tersebut tergolong sektor *non-unggulan*.<sup>46</sup> Hasil analisis *Overlay* dapat dilihat pada tabel 4.7 berikut.

**Tabel 4.7 Hasil Analisis *Overlay* (*Shift Share* dan *Tipologi Klassen*) Sektor Perekonomian di Kabupaten Luwu Utara 2018-2022**

Lapangan Usaha	Overlay		Kesimpulan
	<i>Shift Share</i>	<i>Tipologi Klassen</i>	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	+	+	<b>Sektor Unggulan</b>
Pertambangan dan Penggalian	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Industri Pengolahan	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Pengadaan Listrik dan Gas	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Konstruksi	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Transportasi dan Pergudangan	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>

<sup>46</sup> Andi Kurniawan Karta Negara & Aning Kesuma Putri, "Analisis Sektor Unggulan Kecamatan Toboali Dengan Metode *Shift Share* Dan *Location Quotient*," Jurnal Ekonomi Volume 8, No.1 (2020), 34.

Overlay			
Lapangan Usaha	Overlay		Kesimpulan
	<i>Shift Share</i>	<i>Tipologi Klassen</i>	
Informasi dan Komunikasi	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Jasa Keuangan dan Asuransi	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Real Estate	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Jasa Perusahaan	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	+	+	<b>Sektor Unggulan</b>
Jasa Pendidikan	+	+	<b>Sektor Unggulan</b>
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>
Jasa lainnya	+	-	<b>Non Sektor Unggulan</b>

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 4.7 yaitu hasil analisis *Overlay* dapat dilihat bahwa sektor yang memenuhi kriteria analisis *Overlay* yakni yang memiliki koefisien positif (++) dari kedua alat analisis yang digunakan (*Shift Share* dan *Tipologi Klassen*) atau yang tergolong sebagai sektor ekonomi unggulan adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan sektor Jasa Pendidikan.

Sedangkan sektor dengan nilai overlay (+-) dan (-) atau yang termasuk sebagai sektor *non-unggulan* diantaranya adalah sektor Jasa lainnya, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, sektor Jasa Perusahaan, sektor Real Estate, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda



Motor, sektor Konstruksi, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Industri Pengolahan, sektor Pertambangan dan Penggalian.

## **2. Analisis Data Penentuan Strategi Pengembangan Sektor Unggulan di Kabupaten Luwu Utara**

### **a. Analisis MCDA (*Multi Criteria Decision Analysis*)**

Analisis Multi Kriteria atau MCDA (*Multi Criteria Decision Analysis*) merupakan sebuah metode pengambilan alternatif, yang mana setiap alternatif akan dinilai berdasarkan kriteria-kriteria tertentu sehingga nantinya alternatif yang terpilih merupakan alternatif dengan nilai terbaik. Analisis Multi Kriteria (AMK) menggunakan persepsi dari para pengambil keputusan atau *stakeholders* terhadap kriteria-kriteria atau variabel-variabel yang dibandingkan dalam pengambilan keputusan. Dalam metode ini ada beberapa langkah yang dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### **1) Pembobotan Kriteria**

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam menentukan alternatif strategi pengembangan sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara, yaitu mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan pendapatan asli daerah, menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan meningkatkan daya saing daerah. Dari kriteria-kriteria tersebut, maka langkah yang dapat dilakukan selanjutnya adalah dari masing-masing kriteria tersebut diberikan bobot nilai, dimana bobot nilai ini merepresentasikan derajat kepentingan masing-masing kriteria yang diberikan oleh pengambil

keputusan (*stakeholder*). Semakin tinggi bobot nilai yang diberikan oleh *stakeholder*, maka semakin penting aspek kriteria tersebut dalam merumuskan alternatif kebijakan.

Berikut tabel 4.8, yang menunjukkan bobot nilai kepentingan pada kriteria yang telah ditetapkan.

**Tabel 4.8 Hasil Pembobotan Kriteria Keseluruhan *Stakeholders***

Kriteria	Bobot/Prioritas	Rasio Konsistensi (CR)
Menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat (K1)	0,139	0,048
Meningkatkan pendapatan asli daerah (K2)	0,320	
Meningkatkan penyerapan tenaga kerja (K3)	0,266	
Mampu mengurangi angka kemiskinan (K4)	0,181	
Meningkatkan daya saing daerah (K5)	0,094	

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari hasil pembobotan tersebut menunjukkan bahwa kriteria meningkatkan pendapatan asli daerah memiliki derajat kepentingan paling besar yaitu memiliki bobot sebesar 0,320, karena berbagai permasalahan terkait sektor unggulan saat ini dampak utamanya yaitu belum maksimalnya kemampuan daerah yang diperoleh dari sektor unggulan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. Dimana ketika suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang kecil dan setiap tahunnya tidak mengalami peningkatan yang signifikan, maka daerah

tersebut belum dapat memaksimalkan kemampuan daerahnya dan belum mencerminkan kondisi atau kemampuan ekonomi yang baik dan stabil. Oleh karena itu, strategi pengembangan sektor unggulan yang dirumuskan diharapkan dapat mengurangi berbagai permasalahan yang menghambat perolehan pendapatan asli daerah dari sektor unggulan Kabupaten Luwu Utara.

Prioritas kedua adalah kriteria meningkatkan penyerapan tenaga kerja dengan bobot prioritas sebesar 0,266. Kriteria ini menjadi prioritas kedua karena kriteria ini merupakan hal yang penting untuk mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Luwu Utara. Dengan adanya sektor unggulan maka diharapkan akan mampu menarik perhatian investor luar untuk berinvestasi di Kabupaten Luwu Utara sehingga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kabupaten Luwu Utara. Penyerapan tenaga kerja juga merupakan salah satu indikator dari pertumbuhan ekonomi suatu daerah, dimana ketika tingkat pengangguran lebih kecil dibandingkan jumlah tenaga kerjanya maka bisa dikatakan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sedang bergerak ke arah yang positif.

Selanjutnya derajat kepentingan ketiga adalah mampu mengurangi angka kemiskinan yang memiliki bobot 0,181, kriteria ini berdasarkan pertimbangan bahwa Kabupaten Luwu Utara masih berada di urutan ke-3 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dengan angka kemiskinan terbesar. Padahal jika dilihat dari potensi yang ada Kabupaten Luwu Utara memiliki potensi ekonomi yang berlimpah. Oleh karena itu diharapkan dengan diketahui

potensi sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara akan mampu mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara.

Derajat kepentingan keempat adalah menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat dengan nilai bobot 0,139. Manfaat dengan adanya sektor unggulan salah satunya adalah diharapkan mampu menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat yakni dilihat dari kondisi tempat tinggal, pendapatan, pendidikan dan lain-lain. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah agar sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara dapat dimaksimalkan dan dimanfaatkan dengan tepat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun kriteria dengan derajat kepentingan terakhir (kelima) adalah meningkatkan daya saing daerah yakni dengan nilai bobot sebesar 0,094. Kriteria ini menjadi ukuran yang menggambarkan suatu kondisi atau kemampuan suatu daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki melalui tingkat produktivitas, infrastruktur, kualitas SDM, menciptakan inovasi produk dan potensi lainnya. Dengan demikian untuk strategi pengembangan sektor unggulan diharapkan akan mampu membantu dalam meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Luwu Utara.

Sedangkan untuk nilai rasio konsistensi secara keseluruhan dalam perhitungan kriteria ini adalah sebesar 0,048 atau 4,8 %, hal ini menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan ini konsisten atau berada dalam batas penerimaan yang telah ditetapkan yakni kurang dari sepuluh persen ( $\leq 0,1$  atau 10 %).

2) Pembobotan Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Kabupaten Luwu Utara

a) Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Dalam meningkatkan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Luwu Utara pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dibutuhkan beberapa alternatif strategi pengembangannya. Berikut ini adalah hasil dari diskusi dan kondisi objektif untuk menentukan alternatif strategi pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Luwu Utara, antara lain:

- (a) Memaksimalkan upaya penanggulangan bencana guna meminimalkan bencana yang sudah terjadi dan yang akan terjadi. Bencana dapat diartikan sebagai sebuah proses alam atau bukan alam yang menyebabkan korban jiwa, harta serta dapat mengganggu tatanan kehidupan. Adapun bencana yang sering terjadi di Kabupaten Luwu Utara adalah banjir, seperti yang terjadi pada tanggal 13 Juli 2020 Kabupaten Luwu Utara dilanda banjir bandang yang mengakibatkan kerusakan mulai dari rumah warga, infrastruktur umum, lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, sehingga mengakibatkan warga harus mengungsi dan mengalami kerugian materi yang cukup besar. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor yang menyumbang PDRB paling besar di Kabupaten Luwu Utara, namun juga menjadi sektor yang paling terdampak dengan adanya bencana banjir di Kabupaten Luwu Utara. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut diperlukan upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalkan bencana yang sudah terjadi dan yang akan terjadi

kedepannya. Bencana yang sering terjadi di Kabupaten Luwu Utara adalah bencana banjir. Untuk itu sebagai upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan strategi yang tepat agar dapat mengatasi bencana banjir yang berpotensi di Kabupaten Luwu Utara.

- (b) Pelatihan atau peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja. Pelatihan atau peningkatan kualitas SDM merupakan hal yang sangat penting dalam mendukung peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan di Kabupaten Luwu Utara. Peningkatan produksi pertanian, perkebunan dan perikanan dapat dilakukan melalui perbaikan kualitas produk yang dihasilkan oleh SDM pertanian, perkebunan dan perikanan. Peningkatan kualitas SDM sektor ini dilakukan melalui penyuluhan atau pelatihan. Bekal pengetahuan dan keterampilan dapat membantu petani dalam meningkatkan hasil produksi yang akan berdampak pada kesejahteraan para petani. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan akan membantu dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Luwu Utara, begitu pula dengan melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan pemberdayaan.
- (c) Berusaha untuk meningkatkan jaringan infrastruktur di setiap daerah demi mendorong kegiatan perekonomian. Pentingnya jaringan infrastruktur merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Ketersediaan infrastruktur adalah

salah satu aspek yang sangat penting dalam proses percepatan pembangunan daerah. Dengan adanya infrastruktur yang memadai di setiap daerah maka diharapkan akan mampu membantu menunjang kegiatan pemasaran produk-produk dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan di Kabupaten Luwu Utara, sehingga kegiatan distribusi atau penyaluran hasil pertanian, perkebunan dan perikanan antar daerah dapat berjalan dengan lancar.

- (d) Berupaya untuk mendorong kegiatan ekspor komoditas unggulan dari bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Kegiatan ekspor menjadi bagian yang penting dalam proses perdagangan antar wilayah yang dapat secara signifikan mampu menggerakkan perekonomian. Oleh karena itu perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara untuk memaksimalkan kegiatan ekspor dari hasil sektor pertanian, perkebunan dan perikanan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Utara.
- (e) Mengenalkan teknologi pertanian yang modern serta menyediakan sarana produksi pertanian yang memadai. Menyebarkan atau mengenalkan inovasi kepada petani adalah salah satu peran dan tugas dari penyuluh pertanian agar petani mau mengadopsi serta menerapkan teknologi pertanian dalam kegiatan usahataniya sehingga pendapatan dan kesejahteraan petani dapat meningkat. Kemajuan sistem pertanian tentunya diperlukan dukungan teknologi yang modern karena dengan adanya globalisasi akan mendukung sektor pertanian untuk meningkatkan proses

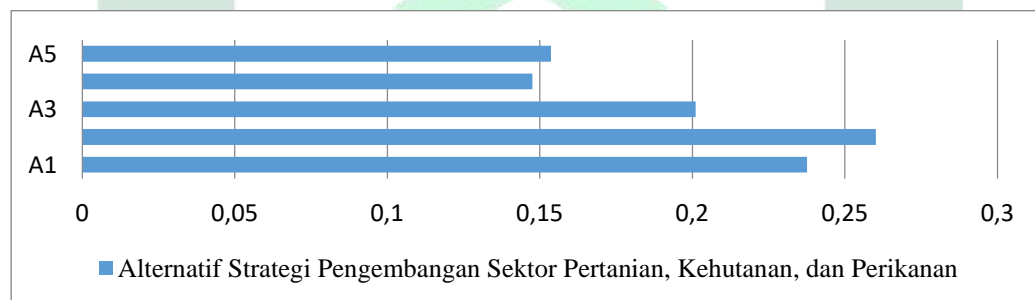
industrialisasi dari hulu ke hilir. Dukungan serta peran pemerintah dalam mewujudkan petani yang melek teknologi tentunya sangat penting demi terciptanya kesejahteraan para petani di Kabupaten Luwu Utara.

**Tabel 4.9 Pembobotan Alternatif Strategi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Terhadap Kriteria**

Kode/Symbol	K1	K2	K3	K4	K5		Bobot Kriteria	Hasil
A1	0,16	0,22	0,30	0,24	0,24		0,139	0,238
A2	0,21	0,38	0,17	0,22	0,25		0,320	0,260
A3	0,29	0,18	0,20	0,19	0,17	X	0,266	0,201
A4	0,11	0,11	0,18	0,17	0,17		0,181	0,148
A5	0,23	0,11	0,14	0,18	0,17		0,094	0,154

Sumber: Data primer diolah, 2023

**Gambar 4.4 Grafik Analisis Multi Kriteria Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**



Sumber: Data primer diolah, 2023

Keterangan:

A1 :Memaksimalkan upaya penanggulangan bencana guna meminimalkan bencana yang sudah terjadi dan yang akan terjadi

A2 :Pelatihan atau peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja

A3 :Berusaha untuk meningkatkan jaringan infrastruktur di setiap daerah demi mendorong kegiatan perekonomian



A4 :Berupaya untuk mendorong kegiatan ekspor komoditas unggulan dari bidang pertanian, perkebunan dan perikanan

A5 :Mengenalkan teknologi pertanian yang modern serta menyediakan sarana produksi pertanian yang memadai

Dari hasil analisis multi kriteria atau MCDA (*Multi-Criteria Decision Analysis*) yang dilakukan untuk alternatif strategi pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diperoleh bahwa alternatif strategi memaksimalkan upaya penanggulangan bencana guna meminimalkan bencana yang sudah terjadi dan yang akan terjadi memiliki bobot atau nilai 0,238, alternatif strategi pelatihan atau peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja memiliki bobot 0,260, alternatif strategi berusaha untuk meningkatkan jaringan infrastruktur di setiap daerah demi mendorong kegiatan perekonomian memiliki bobot sebesar 0,201, alternatif strategi berupaya untuk mengenalkan teknologi pertanian yang modern serta menyediakan sarana produksi pertanian yang memadai memiliki bobot atau nilai 0,154, dan untuk alternatif strategi mendorong kegiatan ekspor komoditas unggulan dari bidang pertanian, perkebunan dan perikanan memiliki bobot 0,148.

b) Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

Peningkatan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Luwu Utara pada sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dibutuhkan beberapa alternatif strategi dalam pengembangannya. Golongan administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mencakup

terkait keamanan dan keselamatan umum, peraturan tentang kegiatan penyediaan pelayanan kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan pelayanan sosial lain termasuk jaminan sosial. Berikut ini adalah hasil dari diskusi dan kondisi objektif untuk menentukan alternatif strategi pengembangan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Kabupaten Luwu Utara, antara lain:

- (a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik. Alternatif strategi ini berdasarkan pertimbangan bahwa perlunya peningkatan kualitas dari sumber daya manusia para pegawai di instansi pemerintah terkait pelayanan dan keterampilan teknis. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan memberikan beasiswa pendidikan ke jenjang lebih lanjut serta pelatihan-pelatihan seperti seminar, workshop, maupun pameran. Hal ini digunakan sebagai upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mengembangkan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib di Kabupaten Luwu Utara.
- (b) Pengembangan dan pemanfaatan *Electronic-Government (E-Government)* bagi instansi pelayanan publik. Pengembangan dan pemanfaatan *Electronic-Government (E-Government)* merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu manfaat dengan adanya *E-Government* adalah pemberian layanan yang lebih baik seperti informasi pemerintahan tersedia

dalam 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu terbukanya kantor pemerintahan. Pemerataan penggunaan layanan *E-Government* di setiap wilayah di Kabupaten Luwu Utara sangat penting agar setiap waktu data dari penduduk dapat ter-*update* dengan cepat.

- (c) Penguatan program jaminan sosial wajib. Meningkatkan cakupan dan kualitas jaminan sosial wajib merupakan strategi penting dalam memastikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan aksesibilitas program-program jaminan sosial, termasuk jaminan kesehatan, jaminan pensiun, dan jaminan ketenagakerjaan. Diperlukan peningkatan pendanaan dan pengawasan yang ketat guna memastikan keberlanjutan program ini.
- (d) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelayanan publik oleh aparatur, maka perlu dikembangkan suatu konsepsi dengan membangun keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik contohnya seperti dalam menetapkan indeks kepuasan masyarakat. Hal ini berguna untuk membangun kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di samping masyarakat dapat berpartisipasi penuh dan melakukan pengawasan sosial (*social control*). Sehingga nantinya pemerintah khususnya pemerintah Kabupaten Luwu Utara mendapat masukan-masukan yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.

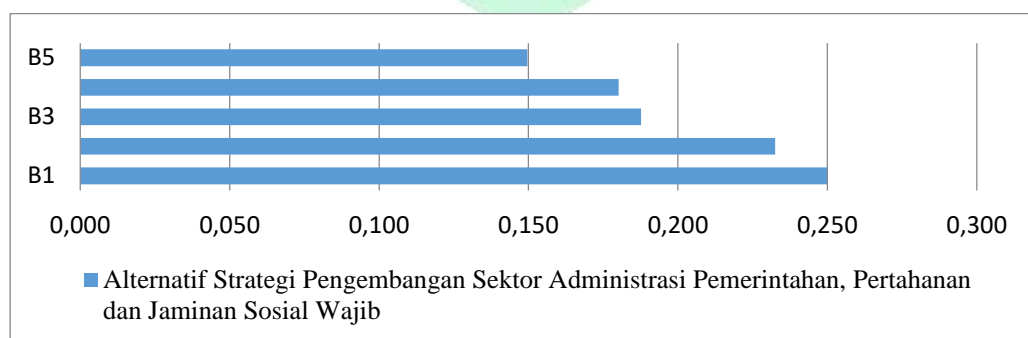
- (e) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Tuntutan masyarakat dan dunia usaha terhadap peningkatan kualitas pelayanan semakin kuat. Untuk itu perlu didukung dengan terciptanya lingkungan yang kondusif, dengan indikator pelayanan yang tepat, aman, layak, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, kenyataannya pelayanan masyarakat belum berjalan baik. Oleh karena itu perlu stimulasi/rangsangan dalam bentuk pemberian penghargaan kepada unit pelayanan yang berhasil menjadi unit pelayanan percontohan serta pemberian sanksi kepada unit pelayanan yang kinerjanya tidak optimal.

**Tabel 5.1 Pembobotan Alternatif Strategi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**

Kode/Symbol	K1	K2	K3	K4	K5	Bobot Kriteria	Hasil
B1	0,25	0,26	0,26	0,21	0,25	0,139	0,250
B2	0,23	0,23	0,25	0,24	0,19	0,320	0,233
B3	0,15	0,17	0,22	0,18	0,23	X	0,188
B4	0,18	0,18	0,16	0,21	0,18	0,181	0,180
B5	0,19	0,15	0,12	0,15	0,15	0,094	0,150

Sumber: Data primer diolah, 2023

**Gambar 4.5 Grafik Analisis Multi Kriteria Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib**



Sumber: Data primer diolah, 2023

Keterangan :

B1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik

B2 : Pengembangan dan pemanfaatan *Electronic-Government (E-Government)* bagi instansi pelayanan publik

B3 : Penguatan program jaminan sosial wajib

B4 : Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik

B5 : Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat

Dari hasil analisis multi kriteria atau MCDA (*Multi-Criteria Decision Analysis*) yang dilakukan untuk alternatif strategi pengembangan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib diperoleh hasil bahwa untuk alternatif strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik memiliki bobot 0,250, alternatif strategi pengembangan dan pemanfaatan *Electronic-Government (E-Government)* bagi instansi pelayanan publik memiliki bobot atau nilai 0,233, alternatif strategi penguatan program jaminan sosial wajib memiliki bobot sebesar 0,188, alternatif strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik memiliki bobot 0,180, dan untuk alternatif strategi pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat memiliki bobot sebesar 0,150.

c) Sektor Jasa pendidikan

Peningkatan potensi ekonomi daerah di Kabupaten Luwu Utara pada sektor jasa pendidikan dibutuhkan beberapa alternatif strategi dalam pengembangannya. Berikut ini adalah hasil dari diskusi dan kondisi objektif

untuk menentukan alternatif strategi pengembangan sektor jasa pendidikan di Kabupaten Luwu Utara, antara lain:

- (a) Memberikan beasiswa kepada para mahasiswa/i berprestasi yang kurang mampu untuk penyelesaian studi. Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Luwu Utara maka diperlukan pendidikan bagi warga terkhusus para mahasiswa/i sedang menempuh pendidikan dibangku perkuliahan. Beasiswa merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi kepada mahasiswa, yang berupa uang bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan finansial.
- (b) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu masukan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan. Adapun fungsi sarana prasarana pendidikan adalah membuat siswa merasa nyaman dan bisa memotivasi siswa dalam belajar, sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan berhasil sesuai yang diharapkan yakni dapat meningkatkan prestasi siswa dan meningkatkan kualitas dari sumber daya manusianya.
- (c) Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam menunjang sistem pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi. Untuk lebih mendorong pengembangan pelaksanaan program pendidikan, maka perlu dilakukan kerjasama antar pemerintah

Kabupaten Luwu Utara dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Luwu Utara.

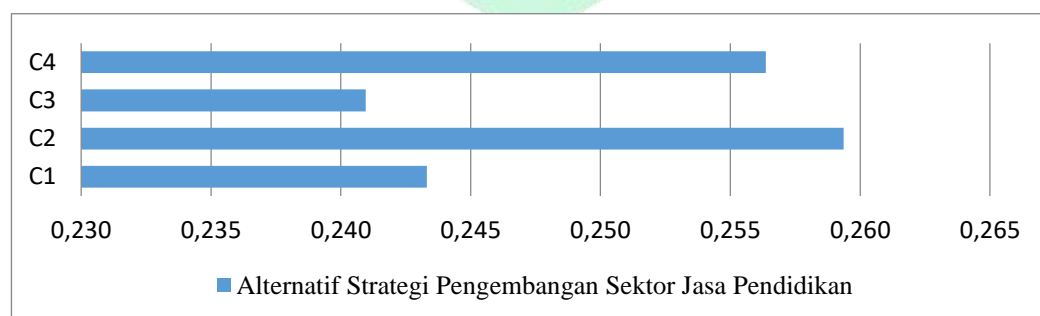
- (d) Peningkatkan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok. Strategi ini merupakan salah satu strategi pengembangan sektor jasa pendidikan yang sangat penting untuk memastikan pendidikan yang berkualitas bagi para semua guru/tenaga pendidik terkhusus mereka yang berada di daerah pelosok. Banyak upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara guna meningkatkan kualitas dari para tenaga pendidik misalnya seperti memberikan program pelatihan dan pengembangan profesional, mentoring, bahan pembelajaran dan memberikan program pertukaran guru antar daerah.

**Tabel 5.2 Pembobotan Alternatif Strategi Sektor Jasa Pendidikan**

Kode/Symbol	K1	K2	K3	K4	K5		Bobot Kriteria	Hasil
C1	0,31	0,23	0,13	0,33	0,32		0,139	0,243
C2	0,29	0,26	0,23	0,28	0,26		0,320	0,259
C3	0,22	0,29	0,23	0,21	0,19	X	0,266	0,241
C4	0,18	0,22	0,41	0,18	0,23		0,181	0,256

Sumber: Data primer diolah, 2023

**Gambar 4.6 Grafik Analisis Multi Kriteria Alternatif Strategi Pengembangan Sektor Jasa Pendidikan**



Sumber: Data primer diolah, 2023

Keterangan :

C1 :Memberikan beasiswa kepada para mahasiswa/i berprestasi yang kurang mampu untuk penyelesaian studi

C2 :Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan

C3 :Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan

C4 :Peningkatkan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok

Dari hasil analisis multi kriteria atau MCDA (*Multi-Criteria Decision Analysis*) yang dilakukan untuk alternatif strategi pengembangan sektor jasa pendidikan diperoleh hasil bahwa alternatif strategi meningkatkan memberikan beasiswa kepada para mahasiswa/i berprestasi yang kurang mampu untuk penyelesaian studi memiliki bobot 0,243, alternatif strategi meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan memiliki bobot sebesar 0,259, alternatif strategi bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan memiliki bobot atau nilai 0,241, sedangkan untuk alternatif strategi peningkatkan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok memiliki bobot 0,256.

## C. Pembahasan

### 1. Sektor Unggulan di Kabupaten Luwu Utara

Dari hasil ketiga analisis yang telah dilakukan yaitu analisis *Shift Share*, *Tipologi Klassen* dan analisis *Overlay* (gabungan) terdapat tiga sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara. Sektor pertama yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.



Berdasarkan tabel 4.4 hasil analisis *Shift Share* sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor dengan pengaruh pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan terbesar yakni dengan nilai Nij sebesar Rp.651.095.110.000. Hasil ini juga turut menjelaskan bahwa kinerja perekonomian wilayah Kabupaten Luwu Utara masih sangat didominasi oleh sektor pertanian bahkan terdapat disparitas kontribusi sektoral yang sangat timpang antara sektor pertanian dengan sektor ekonomi lainnya. Peningkatan kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB daerah diyakini dapat mengurangi disparitas pendapatan. Sedangkan untuk hasil *Proportional Shift* (Mij) sektor ini memiliki laju pertumbuhan sektoralnya tumbuh lebih lambat dari wilayah referensi. Ada hal menarik yang perlu diperhatikan disini bahwa pada hasil analisis *National Share* diperoleh informasi bahwa begitu dominannya sektor pertanian dalam menyumbang pendapatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), berbanding terbalik dengan hasil *Proportional Shift* (Mij) dan *Differential Shift* (Cij) dimana nilai yang diperoleh mengalami pertumbuhan yang negative sebesar -211.660,42 dan -70.885,94. Kemudian untuk hasil analisis klasifikasi *Tipologi Klassen* berdasarkan tabel 4.6 sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masuk dalam kuadran I yang berarti bahwa sektor ini merupakan sektor yang maju dan tumbuh dengan pesat di Kabupaten Luwu Utara.

Hasil penelitian ini tidak berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh Frederic Winston Nalle (2022) dengan judul “Peran Sektor Unggulan Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Timor Tengah Utara”. Dimana dari hasil analisis yang dilakukan oleh Frederic Winston

Nalle sektor pertanian juga menjadi sektor unggulan di Kabupaten Timor Tengah Utara. Untuk hasil analisis *Tipologi Klassen* terdapat temuan yang menggambarkan sektor pertanian termasuk ke dalam sektor maju dan berkembang pesat akan tetapi pada analisis *Shift Share* dalam komponen *Proportional Shift* dimana sektor tersebut terbukti mempunyai pertumbuhan yang lambat terhadap PDRB Provinsi NTT, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian tidak memiliki daya saing dibandingkan dengan sektor yang lain.

Penelitian tersebut hampir memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan di Kabupaten Luwu Utara, yaitu ada hal menarik yang didapatkan dimana terdapat adanya kontradiksi hasil perhitungan antara nilai *National Share*, *Proportional Shift*, *Differential Shift* dan hasil analisis *Tipologi Klassen* yang diperoleh menggambarkan bahwa meskipun sektor pertanian merupakan sektor yang menyerap tenaga kerja begitu besar dan dapat diandalkan dalam menyumbang pendapatan daerah dan juga pertumbuhan ekonomi wilayah, akan tetapi sektor pertanian masih menyimpan ragam permasalahan dalam pengembangannya dikarenakan memiliki laju pertumbuhan sektoral yang sangat lambat akibat tidak memiliki keunggulan kompetitif pada setiap jenis komoditas sektor ini. Ada beberapa permasalahan mendasar yang menyebabkan sektor pertanian masih memiliki nilai yang rendah dalam perhitungan *Proportional Shift*, *Differential Shift* pada analisis *Shift Share*, diantaranya karena pola pertanian yang masih bersifat tradisional, minimnya akses teknologi dan akses pasar atau infrastruktur, rendahnya kualitas SDM dan yang tidak kalah penting adalah dikarenakan Kabupaten Luwu Utara menjadi salah satu daerah dengan

intensitas potensi bencana alam yang tinggi. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah inovasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah serta yang tak kalah penting adalah inovasi dari para petani itu sendiri guna menunjang sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan agar lebih baik lagi sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Seperti penggunaan sistem irigasi yang modern, mesin pertanian, dan metode bertani yang lebih efisien Hal ini sejalan dengan teori yang diungkapkan oleh Joseph Schumpeter terkait pertumbuhan ekonomi bahwa faktor terpenting dalam perekonomian adalah inovasi yang berguna untuk meningkatkan jumlah produktivitas atau output, misalnya seperti penggunaan teknologi yang modern dalam proses produksi. Meskipun teori yang diungkapkan Schumpeter adalah teori umum terkait pertumbuhan ekonomi dan inovasi, serta tidak secara spesifik terfokus pada sektor pertanian. Namun, konsep inovasi dan peran wirausaha dijelaskan dalam teori ini, sehingga dapat diterapkan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Luwu Utara untuk dapat memahami bagaimana inovasi dan dinamikan ekonomi mempengaruhi pertumbuhan sektor ini.

Meskipun pada dasarnya sektor pertanian sampai saat ini masih tetap menjadi tumpuan atau sektor unggulan perekonomian daerah Luwu Utara karena sebagian besar masyarakat menggantungkan kehidupan ekonominya pada sektor pertanian atau sebagai sumber pendapatan. Hal ini sejalan dengan teori dari Sjafrizal, bahwa sektor unggulan merupakan sektor yang menjadi tulang punggung atau sektor penunjang perekonomian suatu daerah karena memiliki keunggulan kompetitif yang cukup tinggi, selain itu sektor unggulan juga

mampu memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, sektor pertanian layak menjadi sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini juga sesuai dengan teori yang diungkapkan W.W Rostow bahwa sektor pertanian merupakan fokus pada awal perkembangan ekonomi pada tahap pertama, dimana sektor pertanian dianggap sebagai tulang punggung ekonomi yang menyediakan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk dan menjadi penopang utama dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Sebagai salah satu sektor unggulan, sebenarnya tidak lepas dari peranan/kontribusi dari sub sektor di dalamnya. Sub sektor tersebut adalah tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Selanjutnya yang menjadi sub sektor unggulan pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan di Kabupaten Luwu Utara adalah sektor pertanian. Hal ini berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) berdasarkan luas panen dan produksi padi di Sulsel tahun 2022, Kabupaten Luwu Utara memiliki luas panen padi sebesar 40,37 ribu hektare dengan produksi sebesar 203,75 ribu ton gabah kering giling (GKG). Jika dikonversikan menjadi beras, maka produksi beras pada tahun 2022 mencapai 116,92 ribu ton beras. Selain itu, pemerintah daerah juga telah memantapkan posisinya sebagai salah satu kabupaten penyanggah pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Termasuk mempertahankan posisinya sebagai daerah lumbung beras di Sulawesi Selatan.

Disisi lain, berdasarkan data yang diperoleh, pada sektor perkebunan ada dua komoditi yang mampu bersaing di Kabupaten Luwu Utara, yaitu komoditi

buah kelapa sawit dan dan kakao. Dimana berdasarkan data terakhir yang diperoleh pada tahun 2021 produksi kelapa sawit mencapai 386.018,80 ton, dengan sumbangan terbesar yaitu Kecamatan Malangke dengan jumlah produksi sebesar 61.471,39 ton. Sedangkan untuk produksi buah kakao sebesar 28.573,37 ton, penyumbang terbesar adalah Kecamatan Malangke yaitu sebesar 5.158,13 ton. Kemudian berdasarkan data yang diperoleh untuk sektor perikanan menjadi salah satu sektor penyumbang PDRB terbesar kedua setelah pertanian atau perkebunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya produksi budidaya perikanan air tawar, air laut, ataupun air payau di Kabupaten Luwu Utara dari tahun 2016 sampai tahun 2020 yang terus mengalami peningkatan. Untuk produksi budidaya perikanan air tawar tahun 2016 sebesar 1.629,60 ton menjadi 1.886,06 ton pada tahun 2020 atau mengalami peningkatan sebesar 256,46 ton atau sekitar 15,75%, produksi budidaya perikanan air laut sebesar 32.758,13 ton pada tahun 2016 meningkat menjadi 38.418,49 ton pada tahun 2020 dan produksi perikanan air payau dari 158.712,78 ton pada tahun 2016 meningkat menjadi 38.418,49 ton pada tahun 2020.

Selanjutnya, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib menjadi sektor unggulan kedua dengan pertumbuhan dan kontribusi tingkat kabupaten lebih besar dibanding tingkat provinsi. Sektor ini juga memiliki nilai *Differential Shift* (Cij) positif yang berarti memiliki daya saing atau keunggulan yang kompetitif. Hal ini dapat dilihat dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tingkat pelayanan publik pada Disdukcapil di Kabupaten Luwu Utara dari tahun 2020 hingga tahun 2022 mengalami kenaikan yang cukup

konsisten, yakni tahun 2020 sebesar 78,23, lalu tahun 2021 sebesar 85,14 dan di tahun 2022 naik sebesar 85,86. Selain itu, berdasarkan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilakukan oleh CPI-LSI Network tahun 2021 terhadap penyelenggaraan pelayanan publik Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara mendapatkan nilai B alias memiliki kategori yang Baik. Dari hasil survei yang dilakukan ada satu instansi yang memiliki kategori A (Sangat Baik), yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP). Sisanya, mayoritas dari instansi pelayanan publik di Kabupaten Luwu Utara berkategori B (Baik) dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Selanjutnya untuk sektor pertahanan, dari data terakhir yang diperoleh untuk persentase tindak pidana yang diselesaikan di Kabupaten Luwu Utara tahun 2021 memiliki persentase sebesar 46,20%. Sedangkan dari jumlah tindak pidana yang dilaporkan pada tahun 2021 di Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 66,08 persen perkara tindak pidana dapat diselesaikan (*clearance rate*). Hal ini menunjukkan penurunan jika dibandingkan tahun 2020, dimana persentase perkara yang diselesaikan sekitar 68,45 persen. Kemudian untuk jaminan sosial wajib Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2021 lalu telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 1.666 nelayan di Kabupaten Luwu Utara yang mana jaminan sosial tersebut berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pemberian perlindungan tersebut berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 2016 tentang perlindungan nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam. Selain itu, pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Luwu Utara juga memberikan BPJS

Ketenagakerjaan kepada 7.500 tenaga *non* Aparatur Sipil Negara (*non*-ASN) di Kabupaten Luwu Utara tahun 2022. Dari jumlah keseluruhan tersebut, 2.500 kuota diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, penyuluh KB, dan penyuluh pertanian. Termasuk bagi tenaga kesehatan hingga ke pustu yang ada di desa-desa. Sedangkan sisanya 5.000 kuota untuk para tenaga *non*-ASN lainnya. Selain itu, Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2023 berhasil meraih penghargaan *Universal Health Coverage* (UHC) dari pemerintah pusat dan BPJS Kesehatan Republik Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan berkat capaian jumlah penerima manfaat Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Luwu Utara mencapai 98,99 persen, yang artinya bahwa 327,251 jiwa dari 330,600 penduduk Luwu Utara telah memiliki jaminan kesehatan.

Sektor terakhir atau ketiga yang merupakan sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara adalah sektor jasa pendidikan. berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sektor jasa pendidikan merupakan salah satu sektor yang memiliki pertumbuhan cepat dan yang berdaya saing di Kabupaten Luwu Utara. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa program unggulan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Luwu Utara, program tersebut diantaranya yakni seperti program sarjana mengajar. Program sarjana mengajar merupakan program dinas pendidikan untuk mengatasi kekurangan guru di wilayah terpencil dan kawasan pesisir Kabupaten Luwu Utara. Sarjana mengajar memiliki tujuan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan akan tetapi juga untuk mengedukasi warga tentang *urgent*-nya dunia pendidikan. Selain itu, sarjana mengajar juga aktif memberikan bimbingan secara gratis kepada para

siswa berprestasi dan kurang mampu guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil.

Program selanjutnya adalah program distribusi guru proporsional. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Luwu utara mengalami kekurangan guru yang diakibatkan oleh distribusi yang tidak merata. Sebaran guru atau tenaga pendidik di Kabupaten Luwu Utara bisa dikatakan belum merata hampir di seluruh kecamatan, terutama pada daerah terpencil seperti kecamatan Rongkong, Seko dan Rampi serta beberapa daerah terpencil di kecamatan lainnya.

Selain itu, berdasarkan data perhitungan analisis *Shift Share* sektor jasa pendidikan memiliki nilai *Proportional Share* (Mij) dan *Differential Share* (Cij) yang positif yakni dengan nilai 17.448,45 dan 14.914,94. Hal ini dapat diartikan bahwa sektor jasa pendidikan tergolong sebagai sektor yang mengalami pertumbuhan yang cepat dan memiliki keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) atau sektor yang memiliki daya saing di Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti (2021) dengan judul penelitian “Analisis Potensi Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi (*Sectoral Potential Analysis In Economic Development Planning*)” penelitian ini dilakukan di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Dari hasil penelitiannya, sektor jasa pendidikan merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Kendari yakni dengan sektor yang memiliki daya saing kuat dan tumbuh dengan cepat sehingga berpotensi untuk dikembangkan dalam upaya mendorong pertumbuhan PDRB Kota Kendari.



Sektor jasa pendidikan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara dibuktikan dengan adanya data terkait Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Utara. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya bersekolah (dalam tahun) yang diharapkan dapat dialami oleh anak pada usia tertentu. HLS di Kabupaten Luwu Utara mengalami peningkatan setiap tahunnya dari tahun 2020-2022. Dengan rata-rata skor Harapan Lama Sekolah sebesar 12,52 tahun yang menjelaskan bahwa anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk terus bersekolah hingga 12-13 tahun. Berikutnya Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Luwu Utara adalah sebesar 7,84 tahun, yang mengindikasikan bahwa penduduk Luwu Utara usia 25 tahun ke atas rata-rata menyelesaikan pendidikannya 7-8 tahun.

Dalam penelitian ini selain dari ketiga sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara terdapat temuan yang menarik dimana sektor konstruksi memiliki nilai Cij (*Differential Shift*) tertinggi yang artinya bahwa sektor konstruksi merupakan sektor pembentuk PDRB di wilayah Kabupaten Luwu Utara paling tinggi yang memiliki keunggulan kompetitif atau sektor yang memiliki daya saing tinggi dibandingkan sektor yang lainnya. Selain itu, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan sektor konstruksi juga memiliki nilai Mij (*Proportional Shift*) positif yang artinya sektor konstruksi merupakan sektor yang berkembang dan berpotensi menjadi sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara. Sektor konstruksi juga berada di urutan kedua sebagai sektor yang memiliki kontribusi paling besar setelah sektor pertanian, kehutanan, dan

perikanan di Kabupaten Luwu Utara yakni dengan rata-rata kontribusi sebesar 12,56% . Hal ini dibuktikan dengan peningkatan signifikan dari sektor konstruksi, yang mana tahun 2021 bertumbuh sekitar 1,28% di tahun 2022 tumbuh menjadi 5,88%. Peningkatan ini diakibatkan karena adanya perbaikan infrastruktur jalan dan pembangunan irigasi pasca banjir bandang tahun 2020. Selain itu untuk lapangan pekerjaan dari sektor konstruksi mengalami peningkatan yang ditandai adanya pembangunan di beberapa titik setelah bencana sehingga menyebabkan terbukanya lapangan kerja baru.

Meskipun sektor konstruksi memiliki pertumbuhan yang positif, namun sektor ini masih belum dikategorikan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara, hal ini karena nilai rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi di tingkat kabupaten masih kecil dibanding rata-rata pertumbuhan dan rata-rata kontribusi di tingkat provinsi. Tentunya sektor konstruksi juga berpeluang besar untuk menjadi sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara jika pemerintah daerah terus berupaya untuk mengembangkannya.

## **2. Strategi Pengembangan Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Kabupaten Luwu Utara**

### **a. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa alternatif strategi dalam pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan diantaranya : (1) Memaksimalkan upaya penanggulangan bencana guna meminimalkan bencana yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, (2) Pelatihan atau peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang pertanian,

perkebunan dan perikanan sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja, (3) Meningkatkan jaringan infrastruktur di setiap daerah demi mendorong kegiatan perekonomian, (4) Berupaya untuk mendorong kegiatan ekspor komoditas unggulan dari bidang pertanian, perkebunan dan perikanan, (5) Mengenalkan teknologi pertanian yang modern serta menyediakan sarana produksi pertanian yang memadai.

Kemudian berdasarkan hasil analisis pembobotan Multi Kriteria atau *Multi Criteria decision Analysis* (MCDA) pada tabel 5.2, maka dapat diurutkan sesuai dengan perolehan nilai dari analisis MCDA. Berikut adalah urutan kepentingan alternatif kebijakan berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah.

**Tabel 5.3 Urutan Peringkat Alternatif Strategi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan**

Urutan	Alternatif Strategi	Bobot
1	Pelatihan atau peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja	0,260
2	Memaksimalkan upaya penanggulangan bencana guna meminimalkan bencana yang sudah terjadi dan yang akan terjadi	0,238
3	Berusaha untuk meningkatkan jaringan infrastruktur di setiap daerah demi mendorong kegiatan perekonomian	0,201
4	Mengenalkan teknologi pertanian yang modern serta menyediakan sarana produksi pertanian yang memadai	0,154
5	Berupaya untuk mendorong kegiatan ekspor komoditas unggulan dari bidang pertanian, perkebunan dan perikanan	0,148

Sumber: Data primer diolah, 2023

Berdasarkan tabel 5.2, dapat dilihat bahwa ada tiga alternatif strategi yang memiliki nilai atau bobot tertinggi dalam pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Luwu Utara yaitu (1) Pelatihan atau peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja, (2)

Memaksimalkan upaya penanggulangan bencana guna meminimalkan bencana yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, (3) Berusaha untuk meningkatkan jaringan infrastruktur di setiap daerah demi mendorong kegiatan perekonomian. Hal ini sesuai dengan kebutuhan kondisi perkembangan dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Luwu Utara saat ini, dimana pada dasarnya sektor ini memiliki potensi yang sangat besar. Pelatihan dan peningkatan kualitas SDM sangat diperlukan guna terciptanya tenaga kerja yang terampil, inovatif, dan siap menghadapi tantangan pada sektor ini. Pelatihan tersebut dapat dilakukan oleh para petani yang diberikan oleh penyuluh atau lembaga pertanian seperti pemberian sosialisasi dan pengetahuan terkait teknik pertanian, kehutanan yang berkelanjutan, dan metode perikanan yang efektif serta memberikan informasi yang *up-to-date* terkait perkembangan atau perubahan kebijakan-kebijakan dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bintoro Tjokroamidjojo bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses perubahan sosial terencana, karena di dalamnya menyangkut berbagai aspek untuk mengupayakan kemajuan dalam kesejahteraan ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, kesadaran lingkungan dan bahkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Dimana dalam teori tersebut dikatakan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aspek yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan pendapat yang diungkapkan oleh Rahayu, bahwa pembangunan daerah sangat penting sebagai usaha yang

dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kelembagaan, sumber daya teknis, dan prasarana fisik secara efektif, optimal, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan pertumbuhan daerah dan mengurangi ketimpangan atau kesenjangan antar daerah.

Selain itu, alternatif strategi kedua yang perlu diperhatikan adalah terkait penanganan dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Luwu Utara. Diketahui bahwasanya Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat bencana yang cukup tinggi, maka pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk mengantisipasi bencana yang akan terjadi. Karena salah satu penghambat sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Luwu Utara mengalami keterlambatan dalam perkembangannya diakibatkan karena adanya bencana banjir yang sering terjadi di Kabupaten Luwu Utara sehingga menyebabkan para petani gagal panen. Seperti yang terjadi pada tahun 2020 silam Kabupaten Luwu Utara telah terjadi bencana banjir bandang cukup parah yang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan meluapnya sungai-sungai di daerah tersebut. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu Kabupaten dengan potensi bencana alam tertinggi di Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu berdasarkan nilai indeks risiko bencana alam di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022, Kabupaten Luwu Utara menempati posisi ke-9 dengan kelas risiko tertinggi, dan yang paling sering terjadi adalah bencana banjir. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya atau

langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut, beberapa upaya yang perlu dilakukan diantaranya seperti (1) membangun sistem pengendalian banjir yang lebih baik misalnya bendungan, tanggul, saluran air, atau sistem drainase, (2) membangun sebuah sistem pemantauan yang efektif untuk mengawasi kondisi cuaca dan tinggi permukaan air, (3) menggunakan teknologi dan peralatan yang tepat untuk mendeteksi dan memantau potensi banjir bandang, (4) mengirim peringatan dini kepada masyarakat secara cepat dan efektif melalui sirene, pengeras suara, pesan teks, atau melalui media sosial dan aplikasi seluler.

Selanjutnya alternatif ketiga dalam pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah berusaha untuk meningkatkan jaringan infrastruktur di setiap daerah demi mendorong kegiatan perekonomian. Dalam meningkatkan produktivitas hasil dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dibutuhkan infrastruktur yang memadai untuk mendukung sebuah kegiatan perekonomian. Kabupaten Luwu Utara masih memiliki beberapa kecamatan yang akses untuk menuju kesana masih dikatakan cukup sulit karena infrastruktur jalan yang belum maksimal. Salah satunya adalah kecamatan Seko dimana kecamatan ini merupakan kecamatan yang memiliki wilayah terluas di Kabupaten Luwu Utara yaitu sekitar 2.109,19 kilometer persegi, namun akses kesana masih sulit dan membutuhkan waktu yang cukup lama karena jarak dari ibu kota Kabupaten Luwu Utara cukup jauh. Hingga terkadang hasil produksi pertanian seperti beras seko (*tarone*) dan hasil perkebunan seperti kakao dan kopi dari kecamatan seko masih begitu sulit untuk dipasarkan keluar daerah karena akses jalan yang masih sulit. Maka dari itu dibutuhkan infrastruktur yang

memadai agar para petani dapat memperluas akses pasarnya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan mendorong pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Frederic Winston Nalle (2022) dengan judul “Peran Sektor Unggulan Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Timor Tengah Utara”. Dimana pembangunan infrastruktur dimaksudkan agar para pelaku usaha petani memiliki akses komunikasi yang baik dalam mendukung kegiatan produksi dan pemasaran hasil pertanian. Sarana transportasi yang memadai berupa akses jalan raya agar memudahkan mobilitas barang dan jasa serta demi peningkatan nilai efisiensi usaha tani di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Alternatif keempat yaitu pengembangan dan pengenalan teknologi pertanian yang modern serta penyediaan sarana produksi pertanian yang memadai. Hal ini dikarenakan Kabupaten Luwu Utara memiliki lahan pertanian yang cukup luas untuk dikelola. Dari data Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) Luwu Utara tahun 2021, luas lahan sawah di Kabupaten Luwu Utara mencapai 29.209 hektare, lahan kakao 38.367 hektare, kelapa sawit 23.988 hektare, serta lahan hortikultura mencapai 45.391 hektare. Sehingga hal tersebut memerlukan teknologi pertanian untuk menuju pertanian yang lebih modern, efektif, dan ramah lingkungan.

Strategi kelima adalah berupaya untuk mendorong kegiatan ekspor komoditas unggulan dari bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Kegiatan ekspor komoditas unggulan merupakan upaya yang perlu dilakukan oleh

pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah serta potensi ekonomi di Kabupaten Luwu Utara. Diketahui bahwa ada beberapa komoditas unggulan yang di ekspor oleh pemerintah Kabupaten Luwu Utara diantaranya adalah kakao dan kelapa sawit.

Dari kelima alternatif tersebut, maka alternatif strategi dengan bobot tertinggi harus diprioritaskan terlebih dahulu, yaitu pelatihan atau peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja; memaksimalkan upaya penanggulangan bencana guna meminimalkan bencana yang sudah terjadi dan yang akan terjadi; dan berusaha untuk meningkatkan jaringan infrastruktur di setiap daerah demi mendorong kegiatan perekonomian. Oleh karena itu ketiga alternatif strategi tersebut merupakan langkah awal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai upaya untuk meningkatkan potensi ekonomi daerah Kabupaten Luwu Utara. Namun tidak berarti alternatif strategi atau kebijakan lainnya tidak perlu dijalankan, hanya saja untuk tahap awal ketiga alternatif strategi tersebut menjadi prioritas awal, sebagai antisipasi apabila tidak memungkinkan secara paralel menjalankan seluruh strategi yang telah dirumuskan, karena keterbatasan modal serta adanya *trade off* dengan pengembangan sektor atau kepentingan lainnya.

b. Sektor Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa alternatif strategi dalam pengembangan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib diantaranya: (1) Meningkatkan kualitas



sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik, (2) Penguatan program jaminan sosial wajib, (3) Pengembangan dan pemanfaatan *Electronic-Government (E-Government)* bagi instansi pelayanan publik, (4) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat, (5) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.

Kemudian berdasarkan hasil analisis pembobotan Multi Kriteria atau *Multi Criteria decision Analysis (MCDA)* pada tabel 5.3, maka dapat diurutkan sesuai dengan perolehan nilai dari analisis MCDA. Berikut adalah urutan kepentingan alternatif kebijakan berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah.

**Tabel 5.4 Urutan Peringkat Alternatif Strategi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib**

Urutan	Alternatif Strategi	Bobot
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik	0,250
2	Pengembangan dan pemanfaatan <i>Electronic-Government (E-Government)</i> bagi instansi pelayanan publik	0,233
3	Penguatan program jaminan sosial wajib	0,188
4	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik	0,180
5	Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat	0,150

Sumber: Data primer diolah, 2023

Dari hasil analisis pada tabel 5.3, dapat dilihat bahwa ada tiga alternatif strategi yang memiliki bobot tertinggi dalam pengembangan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib di Kabupaten Luwu Utara yaitu (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik, (2) Pengembangan dan pemanfaatan *Electronic-Government (E-Government)* bagi instansi pelayanan publik, (3) Penguatan program jaminan sosial wajib. Ketiga alternatif tersebut merupakan prioritas utama yang perlu

dijalankan oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara.

Alternatif strategi pertama ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik, alternatif strategi ini sangat penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan yang berkelanjutan kepada para aparatur pelayanan publik agar mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan baik. Pelatihan yang dapat dilakukan meliputi pengembangan keterampilan manajemen, keterampilan komunikasi, keterampilan teknis, serta pemahaman tentang etika pelayanan publik dalam rangka menciptakan kualitas pelayanan publik yang profesional. Hal ini sesuai dengan kebijakan umum dan program pembangunan daerah kabupaten Luwu Utara yang tertuang pada RPJMD tahun 2021-2026 yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional melalui peningkatan kualitas SDM aparatur dan mendorong inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Selanjutnya, alternatif strategi kedua adalah pengembangan dan pemanfaatan *electronic-government (e-government)* bagi instansi pelayanan publik di Kabupaten Luwu Utara. Penerapan *e-government* dalam sebuah pemerintahan sangat dibutuhkan guna menunjang pelayanan publik yang maksimal. Adapun manfaat dengan adanya *e-government* diantaranya adalah meningkatkan efisiensi pelayanan publik, meningkatkan aksesibilitas yang

mudah dan luas kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan, dan yang tak kalah penting adalah meningkatkan efektivitas pemerintah dalam memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan publik dengan lebih efektif. Hal ini sesuai dengan Intruksi Presiden (INPRES) No.3 Tahun 2003 tentang pengembangan *E-government* di Indonesia. *E-government* didasari oleh kebutuhan masyarakat yang menginginkan pemerintah yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

Alternatif strategi ketiga untuk mengembangkan sektor Administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib di Kabupaten Luwu Utara adalah penguatan program jaminan sosial wajib. Meningkatkan cakupan dan kualitas jaminan sosial wajib merupakan strategi penting dalam memastikan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat Kabupaten Luwu Utara. Upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan aksesibilitas program jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan pensiunan, dan jaminan ketenagakerjaan. Selanjutnya diperlukan peningkatan pendanaan serta pengawasan yang ketat untuk memastikan keberlanjutan program tersebut. Pemberian jaminan sosial kepada masyarakat diharapkan mampu mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Luwu Utara. Pemerintah daerah (Pemda) kabupaten luwu utara pada tahun 2021 lalu juga telah memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 1.666 nelayan di Kabupaten Luwu Utara yang mana jaminan sosial tersebut berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pemberian perlindungan tersebut berdasarkan Undang-Undang No.7 tahun 2016 tentang

perlindungan nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam. Selain itu, pemerintah daerah (pemda) Kabupaten Luwu Utara juga memberikan BPJS Ketenagakerjaan kepada 7.500 tenaga *non*-Aparatur Sipil Negara (*non*-ASN) di Kabupaten Luwu Utara tahun 2022. Dari jumlah keseluruhan tersebut, 2.500 kuota diperuntukkan bagi tenaga kesehatan, penyuluh KB, dan penyuluh pertanian. Termasuk bagi tenaga kesehatan hingga ke pustu yang ada di desa-desa. Sedangkan sisanya 5.000 kuota untuk para tenaga *non*-ASN lainnya. Namun, peningkatan kuota bantuan jaminan sosial juga harus terus ditingkatkan demi mendukung kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Utara, sehingga bantuan jaminan sosial dapat dirasakan seluruh masyarakat.

Alternatif strategi berikutnya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Strategi tersebut merupakan langkah penting untuk memperkuat sektor administrasi pemerintahan dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas layanan yang disediakan. Tercatat pada Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tingkat pelayanan publik pada Disdukcapil di Kabupaten Luwu Utara tahun 2020 sebesar 78,23, lalu tahun 2021 sebesar 85,14 dan di tahun 2022 sebesar 85,86. Kenaikannya konsisten, hanya saja partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik yaitu seperti melakukan sosialisasi terkait kesadaran atau menginformasikan masyarakat tentang hak, tanggung jawab, dan manfaat partisipasi dalam pelayanan publik.

Terakhir adalah pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Pemberian penghargaan atau penerapan sanksi ini dimaksudkan

untuk membangun semangat dan mendorong kreativitas unit penyelenggara pelayanan masyarakat untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta mutu pelayanan, menumbuhkan prinsip akuntabilitas dan transparansi aparatur, memotivasi unit pelayanan dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan. Seperti pada tahun 2021 Kabupaten Luwu Utara mendapatkan penghargaan kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2021 dari Ombudsman RI dengan nilai kepatuhan 85,89 atau masuk dalam predikat zona hijau. Sehingga hal ini diharapkan menjadi support atau motivasi bagi seluruh perangkat daerah dan ASN agar melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Dari kelima alternatif tersebut, maka alternatif strategi dengan bobot tertinggi harus diprioritaskan terlebih dahulu, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik; pengembangan dan pemanfaatan *Electronic-Government (E-Government)* bagi instansi pelayanan publik; dan penguatan program jaminan sosial wajib. Ketiga alternatif strategi tersebut merupakan alternatif awal yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah guna mengembangkan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib di Kabupaten Luwu Utara. Meskipun ketiga alternatif strategi tersebut memiliki bobot atau nilai paling tinggi bukan berarti dua alternatif strategi lainnya tidak perlu dijalankan. Hanya saja untuk tahap awal ketiga alternatif strategi tersebut menjadi prioritas awal dalam pengembangannya.

c. Sektor Jasa Pendidikan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa alternatif strategi dalam pengembangan sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib diantaranya: (1) Memberikan beasiswa kepada para mahasiswa/i berprestasi yang kurang mampu untuk penyelesaian studi, (2) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, (3) Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan (4) Peningkatkan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok

Kemudian berdasarkan hasil analisis pembobotan Multi Kriteria atau *Multi Criteria Decision Analysis* (MCDA) pada tabel 5.4, maka dapat diurutkan sesuai dengan perolehan nilai dari analisis MCDA. Berikut adalah urutan kepentingan alternatif kebijakan berdasarkan nilai tertinggi hingga terendah.

**Tabel 5.5 Urutan Peringkat Alternatif Strategi Sektor Jasa Pendidikan**

Urutan	Alternatif Strategi	Bobot
1	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan	0,259
2	Peningkatkan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok	0,256
3	Memberikan beasiswa kepada para mahasiswa/i berprestasi yang kurang mampu untuk penyelesaian studi	0,243
4	Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan	0,241

*Sumber: Data primer diolah, 2023*

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 5.4, dapat dilihat bahwa ada empat alternatif strategi yang digunakan dalam pengembangan sektor jasa pendidikan di Kabupaten Luwu Utara. Dimana berdasarkan pembobotan prioritas didapatkan hasil bahwa alternatif strategi meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi prioritas pertama dengan bobot 0,259, peningkatkan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok jadi prioritas

kedua dengan nilai 0,256, memberikan beasiswa kepada para mahasiswa/i berprestasi yang kurang mampu untuk penyelesaian studi menjadi prioritas ketiga dengan nilai 0,243, dan bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan menjadi prioritas keempat atau prioritas yang terakhir dengan bobot penilaian sebesar 0,241. Adapun terdapat dua alternatif strategi yang menjadi prioritas awal dalam pengembangan sektor jasa pendidikan di Kabupaten Luwu Utara yaitu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dan meningkatkan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok.

Untuk alternatif strategi pertama dalam mengembangkan sektor jasa pendidikan adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendidikan merupakan langkah penting dalam pengembangan sektor jasa pendidikan di Kabupaten Luwu Utara. Ada beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah, diantaranya: (1) meningkatkan pembangunan dan perbaikan fasilitas fisik pendidikan, seperti gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium, ruang kelas, dan fasilitas olahraga yang memadai, (2) memastikan tersedianya sumber daya pembelajaran yang memadai, seperti buku teks, buku perpustakaan, media pembelajaran, dan bahan ajar digital, (3) memberikan fasilitas sekolah, seperti ruang seni, studio musik, laboratorium sains untuk mengembangkan keterampilan kreatif dan ilmiah melalui eksploitasi, percobaan, dan inovasi. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah terpencil dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan,

yaitu seperti meningkatkan aksesibilitas pendidikan di daerah-daerah melalui pembangunan infrastruktur pendidikan, pemenuhan kebutuhan sumber daya, dan penyediaan transportasi yang memadai guna membantu mengurangi kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Tercatat bahwa jumlah sekolah yang berada di Kabupaten Luwu Utara tahun ajaran 2021/2022 tingkat Sekolah Dasar sebanyak 250 unit yaitu berada di urutan ke-11. Sekolah Menengah Pertama sebanyak 76 unit dan berada di urutan ke-9. Sekolah Menengah Atas sebanyak 19 unit dengan urutan ke-12, dan untuk Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 14 unit yang berada di urutan ke-12 dari 24 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya alternatif kedua dalam mengembangkan sektor jasa pendidikan di Kabupaten Luwu Utara adalah dengan meningkatkan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok. Meningkatkan kualitas tenaga pendidik di daerah pelosok merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan di Kabupaten Luwu Utara. Beberapa upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah adalah, seperti menyediakan program pelatihan dan pengembangan profesional yang intensif bagi tenaga pendidik di daerah pelosok, mendorong akses dan kesempatan bagi tenaga pendidik untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas yakni dengan memberikan beasiswa atau insentif bagi mereka yang berminat melanjutkan pendidikannya, dan yang tak kalah penting adalah penyediaan sarana prasarana bagi tenaga pendidik yang memadai guna meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut diharapkan kualitas tenaga pendidik atau guru



di daerah pelosok Kabupaten Luwu Utara dapat meningkat, menghasilkan pendidikan yang berkualitas tinggi, relevan, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Alternatif berikutnya adalah memberikan beasiswa kepada para mahasiswa/i berprestasi yang kurang mampu untuk penyelesaian studi. Dalam hal ini adalah memberikan dukungan finansial kepada mereka yang memiliki potensi akademik tinggi namun menghadapi kendala keuangan dalam menyelesaikan pendidikan. Untuk saat ini, beasiswa yang diberikan oleh pemerintah daerah (Pemda) Luwu Utara hanya beasiswa untuk penyelesaian studi dalam bentuk bantuan finansial untuk penelitian tugas akhir atau skripsi (D1, S1 dan S2). Sedangkan beasiswa pemberian biaya finansial per semester bagi mahasiswa di Kabupaten Luwu Utara masih belum ada. Oleh karena itu, diharapkan pemda Kabupaten Luwu Utara dapat memberikan beasiswa penuh atau *full* kepada para mahasiswa berprestasi dan kurang mampu untuk memastikan bahwa potensi dan bakat dari para pemuda di Luwu Utara tidak terbuang sia-sia akibat keterbatasan finansial. Dengan memberikan beasiswa, pemerintah dapat mendorong mahasiswa untuk mengembangkan diri, berkontribusi pada pembangunan, serta menciptakan peluang yang lebih adil dalam mengakses pendidikan yang lebih tinggi.

Alternatif terakhir adalah bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kabupaten Luwu Utara pada tahun 2023 telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi di Provinsi Sulawesi Selatan maupun luar Provinsi seperti, UNCP Palopo, UNIBOS Makassar, UMB

Palopo, UNISMUH Makassar, UNHAS Makassar, IPB Bogor dan ITS Surabaya. Kerja sama ini dilakukan dalam rangka memperkuat bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang diharapkan dapat meningkatkan kompetensi sumber daya manusia serta pengembangan pendidikan di Kabupaten Luwu Utara.

Dari keempat alternatif tersebut, maka alternatif strategi dengan bobot tertinggi harus diprioritaskan terlebih dahulu, yaitu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan; dan peningkatan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok. Kedua alternatif strategi tersebut merupakan alternatif awal yang harus diprioritaskan oleh pemerintah daerah guna mengembangkan sektor jasa pendidikan di Kabupaten Luwu Utara. Meskipun kedua alternatif strategi tersebut memiliki bobot atau nilai paling tinggi bukan berarti dua alternatif strategi lainnya tidak perlu dijalankan. Hanya saja untuk tahap awal kedua alternatif strategi tersebut menjadi prioritas dalam pengembangannya, sebagai antisipasi apabila tidak memungkinkan untuk menjalankan seluruh strategi yang telah dirumuskan, karena keterbatasan modal atau adanya kepentingan lainnya.

### **3. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat perbandingan antara penelitian terdahulu yang dianggap relevan, dimana penelitian ini menggunakan metode *Shift Share*, *Tipologi Klassen*, dan *Overlay* untuk menganalisis sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara pada periode 2018-2022, serta mengusulkan strategi pengembangan untuk sektor-sektor tersebut. Berdasarkan analisis yang

dilakukan, penelitian ini menetapkan ada tiga (3) sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara, diantaranya adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; dan sektor jasa pendidikan. Ketiga sektor ini memiliki nilai rata-rata kontribusi yang signifikan terhadap PDRB wilayah dan menyediakan lapangan pekerjaan yang luas. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi alternatif strategi pengembangan yang meliputi untuk alternatif strategi pengembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah: (1) Pelatihan atau peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja memiliki bobot 0,260, (2) Memaksimalkan upaya penanggulangan bencana guna meminimalkan bencana yang sudah terjadi dan yang akan terjadi dengan bobot 0,238, (3) Mengenalkan teknologi pertanian yang modern serta menyediakan sarana produksi pertanian yang memadai dengan nilai 0,201, (3) Berusaha untuk meningkatkan jaringan infrastruktur di setiap daerah demi mendorong kegiatan perekonomian memiliki bobot 0,154, (5) Berupaya untuk mendorong kegiatan ekspor komoditas unggulan dari bidang pertanian, perkebunan dan perikanan bobot 0,148.

Sedangkan untuk alternatif strategi pengembangan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib adalah: (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan bobot senilai 0,250, (2) Pengembangan dan pemanfaatan *Electronic-Government (E-Government)* bagi instansi pelayanan publik memiliki bobot 0,233, (3)

Penguatan program jaminan sosial wajib dengan bobot sebesar 0,188, (4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik dengan bobot 0,180, (5) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat bobot 0,150. Untuk alternatif strategi pengembangan sektor jasa pendidikan diantaranya: (1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan bobot 0,259, (2) Peningkatkan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok dengan nilai 0,256, (3) Memberikan beasiswa kepada para mahasiswa/i berprestasi yang kurang mampu untuk penyelesaian studi memiliki bobot 0,243, (4) Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan bobot 0,241.

Hasil penelitian terdahulu yang pertama dilakukan oleh Imroatul Mutmainah dan Hendry Cahyono dengan judulnya “Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Kabupaten Lamongan” penelitian ini menggunakan dua alat analisis yaitu *Location Quotient* dan *Shift Share*, dimana dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Lamongan ini menemukan bahwa sektor pertanian juga menjadi salah satu sektor unggulan. Selain sektor pertanian, ada dua sektor lagi yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Lamongan yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Sedangkan untuk strategi pengembangannya Kabupaten Lamongan belum sampai pada pembangunan berkelanjutan jika hanya dilihat dari sisi aspek ekonomi saja dan tidak melihat dari seluruh aspek dalam komponen pembangunan berkelanjutan. Diperlukan strategi kebijakan yang berbeda-beda pada masing-masing aspek di wilayah Kabupaten Lamongan

dalam upaya percepatan capaian untuk menuju pembangunan berkelanjutan Kabupaten Lamongan.

Sementara itu, penelitian terdahulu yang kedua yaitu penelitian dari Aty Uar dan Hadija Madubun dengan judul “Strategi Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara” dalam penelitian ini Aty Uar dan Hadija Madubun dalam menentukan sektor unggulan menggunakan analisis *Location Qoutiont* dan *Shift Share* dan yang menjadi sektor unggulan adalah sektor pertanian; sektor industri pengolahan; dan sektor perdagangan, hotel & restoran. Strategi yang digunakan untuk pengembangan sektor-sektor unggulan adalah strategi diversifikasi yang konsentrik, yakni dengan memanfaatkan kekuatan sektor-sektor unggulan untuk mencari berbagai peluang baru sesuai kemampuan yang ada dan mengembangkan sektor lain (non unggulan) untuk memanfaatkan kelebihan kemampuan sektor unggulan baik yang masih berkaitan dengan kegiatan sektor unggulan maupun sama sekali tidak berkaitan.

Penelitian terdahulu ketiga yang relevan selanjutnya adalah penelitian dari Frederic Winston Nalle dalam penelitiannya yang berjudul “Peran Sektor Unggulan dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif di Kabupaten Timor Tengah Utara” berdasarkan hasil analisis *Shift Share* dan *Tipologi Klassen* sektor pertanian menjadi sektor unggulan dan merupakan sektor yang memiliki kontribusi penyumbang PDRB paling besar di Kabupaten Timor Tengah Utara. Strategi pengembangan yang disarankan adalah: Pertama; lakukan pemetaan spasial potensi komoditi sub sektor pertanian di seluruh

wilayah kecamatan yang ada yang berjumlah 24 Kecamatan. Kedua; Penyediaan anggaran yang lebih berpihak pada pembangunan infrastruktur daerah hingga ke pelosok desa, terutama pada daerah potensial penghasil komoditi unggul bidang pertanian. Ketiga; Perkuat kapasitas Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja di Sektor Pertanian yang handal melalui berbagai pelatihan dan juga Pendidikan formal. Keempat; Terapkan konsep Agribisnis dan Perkuat system kelembagaan sektor pertanian mulai dari hulu hingga hilir guna mendukung seluruh rangkaian kegiatan usaha tani.

Selanjutnya yang keempat, untuk penelitian yang relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti yang berjudul “Analisis Potensi Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi (*Sectoral Potential Analysis In Economic Development Planning*)” penelitian ini menggunakan analisis *Location Qoutient*, *Shift Share* dan *Tipologi Klassen* untuk mengidentifikasi sektor unggulan di Kota Kendari. Hasilnya menunjukkan bahwa kota Kendari lebih menekankan pada sektor yang menjadi fokus pembangunan pemerintah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 adalah sektor infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kota kendari juga telah mengalami transformasi struktural ekonomi dengan berspesialisasi pada sektor-sektor primer ke sektor sekunder dan sektor tersier. Hal ini terjadi karena lahan-lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan produktif di sektor-sektor sekunder dan tersier, seperti dijadikan perumahan, pusat niaga, ruko, dan sarana publik.

Penelitian terdahulu yang relevan berikutnya adalah penelitian dari Abdul Kadir Arno dan Ilham yang berjudul “*Competitiveness of Gross Regional Domestic Product and Its Effect on Economic Development in Palopo City, South Sulawesi Province*”. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *Location Quotient*, *Tipologi Klassen*, *Shift Share*, dan regresi. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa di Kota Palopo terdapat beberapa sektor ekonomi basis diantaranya adalah pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan dan daur ulang sampah; konstruksi; perdagangan hotel dan restoran; transportasi dan pergudangan; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; dan jasa lainnya. Sedangkan sektor yang memiliki daya saing di Kota Palopo adalah sektor industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; perdagangan, hotel, restoran; transportasi, dan pergudangan. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota Palopo tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Dari penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kadir Arno dan Ilham dapat terlihat bahwa sektor ekonomi di Kota Palopo sudah diambil alih oleh sektor ekonomi sekunder dan tersier seperti industri pengolahan, listrik, perdagangan dan transportasi. Sedangkan sektor primer seperti sektor pertanian sudah mengalami pergeseran. Hal ini karena minimnya lahan pertanian yang ada di Kota Palopo yang berubah menjadi perumahan atau gedung-gedung pusat perbelanjaan sehingga sektor pertanian produktivitasnya mengalami penurunan yang cukup drastis. Berbeda dengan Kabupaten Luwu Utara yang belum mengalami pergeseran dari sektor primer ke

sektor sekunder atau tersier, dimana sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam menunjang perekonomian di Kabupaten Luwu Utara.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa sektor unggulan disetiap wilayah atau daerah dapat bervariasi atau berbeda-beda. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa sektor unggulan dapat bervariasi bergantung pada karakteristik serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Meskipun begitu, sektor pertanian masih menjadi sektor yang dominan sebagai sektor unggulan di berbagai wilayah di Indonesia terbukti dari adanya hasil penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu yaitu sebagai sektor dengan penyumbang PDRB terbesar.

Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang lebih spesifik tentang sektor unggulan di wilayah Kabupaten Luwu Utara, termasuk peran penting dari sektor unggulan di dalam perekonomian Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini dapat menjadi dasar perumusan kebijakan lebih lanjut yang bertujuan untuk mendukung serta memperkuat sektor-sektor unggulan di daerah tersebut. Selain itu, perbandingan dengan penelitian terdahulu pertama, kedua, ketiga, dan penelitian terdahulu keempat membantu dalam konteks memahami perbedaan dan persamaan dalam peran sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan di atas maka terdapat beberapa *point* penting yang dapat diambil sebagai kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh bahwa yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Administrasi, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; dan terakhir adalah Sektor Jasa Pendidikan.
2. Untuk mengembangkan sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut: Strategi prioritas untuk mengembangkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah (1) Pelatihan atau peningkatan kualitas SDM khususnya dalam bidang pertanian, perkebunan dan perikanan sebagai upaya peningkatan penyerapan tenaga kerja, (2) Memaksimalkan upaya penanggulangan bencana guna meminimalkan bencana yang sudah terjadi dan yang akan terjadi, (3) Berusaha untuk meningkatkan jaringan infrastruktur di setiap daerah demi mendorong kegiatan perekonomian, (4) Mengenalkan teknologi pertanian yang modern serta menyediakan sarana produksi pertanian yang memadai, dan (5) Berupaya untuk mendorong kegiatan ekspor komoditas unggulan dari bidang pertanian, perkebunan dan perikanan. Prioritas alternatif strategi untuk pengembangan sektor

administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib yaitu: (1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur penyelenggara pelayanan publik, (2) Pengembangan dan pemanfaatan Electronic-Government (E-Government) bagi instansi pelayanan publik, (3) Penguatan program jaminan sosial wajib, (4) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, dan (5) Pemberian penghargaan dan sanksi kepada unit pelayanan masyarakat. Sedangkan untuk prioritas strategi pengembangan sektor jasa pendidikan adalah: (1) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, (2) Peningkatan kualitas para tenaga pendidik di daerah pelosok, (3) Memberikan beasiswa kepada para mahasiswa/i berprestasi yang kurang mampu untuk penyelesaian studi, dan (4) Bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

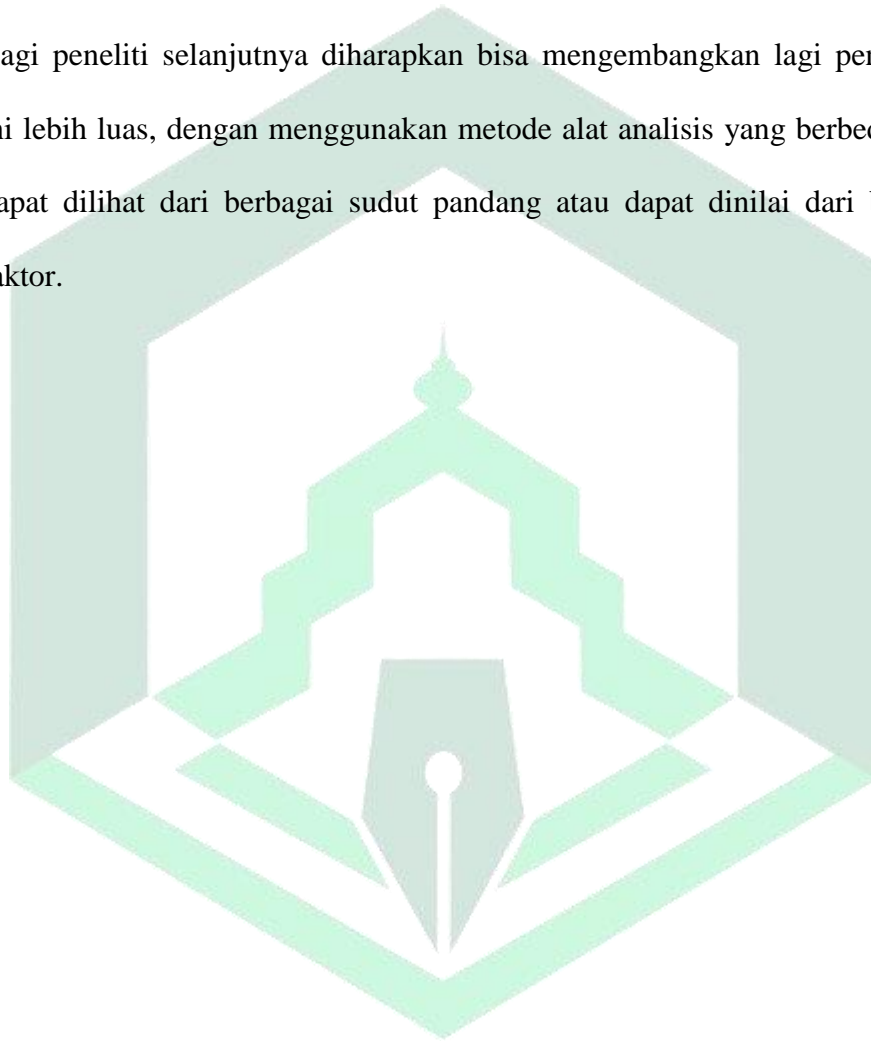
## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka ada beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti sebagai masukan bagi pihak-pihak terkait, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten Luwu Utara diharapkan dapat mempertimbangkan strategi yang telah dirumuskan untuk mengembangkan sektor unggulan di Kabupaten Luwu Utara. Disamping itu pula, disarankan kepada pemerintah agar tidak hanya memprioritaskan untuk mengembangkan sektor-sektor yang memiliki kontribusi paling besar terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Utara, melainkan juga mengembangkan sektor-sektor ekonomi non-unggulan lainnya, karena

mengingat antara satu sektor dengan sektor lainnya saling berhubungan. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar sektor ekonomi yang lain dapat tersinergikan sehingga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Utara bisa lebih merata kedepannya.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan lagi penelitian ini lebih luas, dengan menggunakan metode alat analisis yang berbeda agar dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau dapat dinilai dari banyak faktor.



IAIN PALOPO

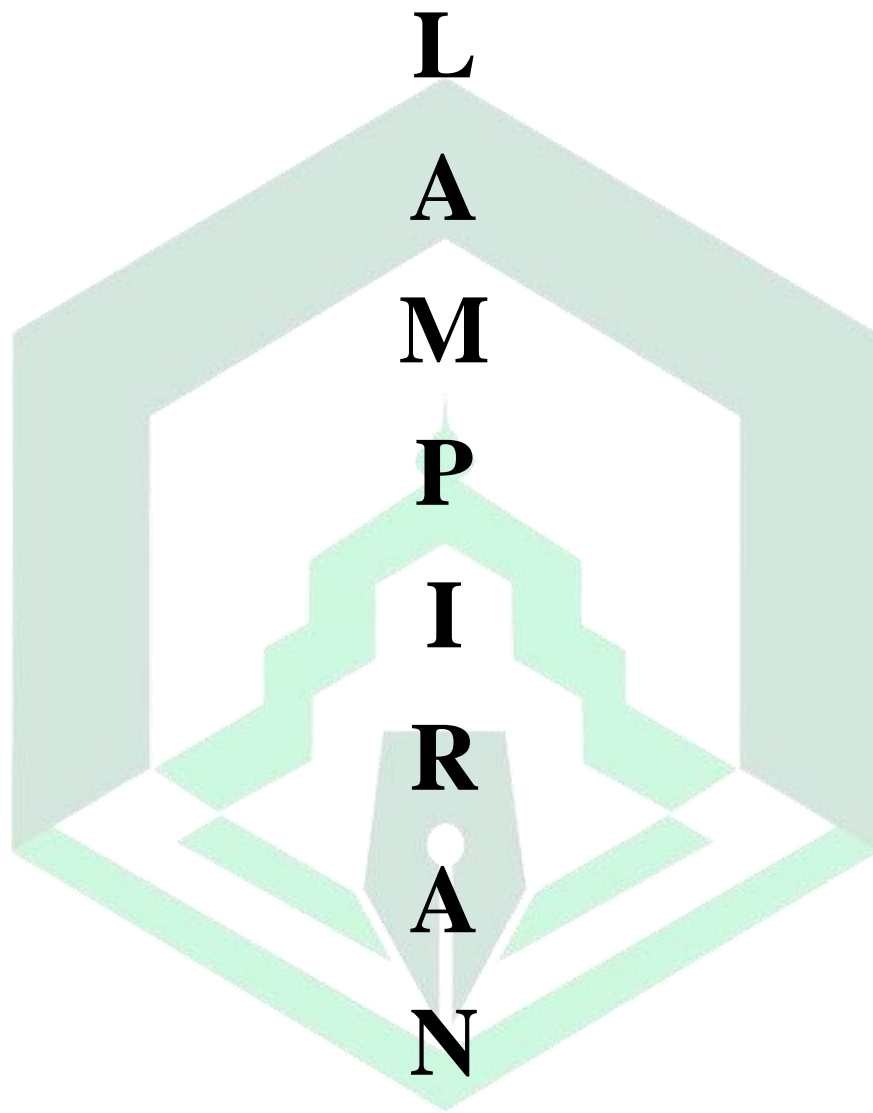
## DAFTAR PUSTAKA

- Alijoyo, Antonius dkk, “*Multi-criteria Decision Analysis (Analisis Keputusan Multikriteria)*,” (Bandung: CRMS Indonesia, 2021).
- Amalia, Fitri dkk, “*Ekonomi Pembangunan*,” Cetakan Pertama (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022).
- Arno, Abd. Kadir dan Ilham, “*Competitiveness of Gross Regional Domestic Product and Its Effect on Economic Development in Palopo City, South Sulawesi Province*,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* Vol. 5 No. 5, (2023).
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2022*.
- Badan Pusat Statistik. 2022. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Luwu Utara 2018-2022*.
- Chandra, Dodi dkk, “*Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Daerah di Provinsi Jambi*,” *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol. 12. No. 2, (2017)
- Gunawan, Muh. Aqsa, Skripsi, “*Analisis Peran Sektor Unggulan Terhadap Perekonomian Kabupaten Sinjai*,” Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Alauddin Makassar, 2019.
- Hajeri dkk, “*Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya*,” *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* Vol. 4, No. 2, (2015)
- Hardani dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*,” Cetakan ke-1 (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020)..
- Hartono, Rudi, “*Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Upah Minimum Kota (UMK) Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja*,” *Jurnal Inovasi* Volume 14, No.1 (2018).
- Hasan, Muhammad dan Muhammad Azis, “*Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat (Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal)*,” Edisi ke-2 (Makassar: CV. Nur Lina, 2018).

- Irmansyah, Maulana, *“Analisis Sektor Unggulan yang Ada di Kabupaten Mojokerto Jawa Timur,”* JDEP-Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan Volume 2, No. 1 (2018).
- Karta Negara, Andi Kurniawan & Aning Kesuma Putri, *“Analisis Sektor Unggulan Kecamatan Toboali Dengan Metode Shift Share Dan Location Quotient,”* Jurnal Ekonomi Volume 8, No.1 (Juni 2020).
- Mardiana, Andi dan Azhar J. Habu, *“Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo Utara”,* Mutawazzin (Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo) Volume 1, Nomor 1 (2020).
- Masruri, Fahrul Alam dkk, *“Analisis Penentuan Sektor Unggulan di Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat,”* Jurnal Ilmiah Manajemen Vol. XII, No 1 (Maret 2021).
- Mawikere, Heryanikov Atiiano dkk, *“Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan Di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur,”* Program studi Perencanaan wilayah dan kota Institut Teknologi Nasional Malang, 2017.
- Muammar, Skripsi, *“Analisis Sektor Unggulan Di Kota Banda Aceh Berdasarkan Metode Tipologi Klassen Dan Shift-Share,”* Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Muljanto, Muhammad Agus, *“Analisis Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Sidoarjo,”* Jurnal Manajemen Keuangan Publik Vol.5, No.2, (2021).
- Mulyani, Endang, *“Ekonomi Pembangunan,”* Edisi ke-1 (Yogyakarta: UNY Press, 2017).
- Mushoffa, Skripsi, *“Analisis Sektor Basis dan Strategi Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Tegal,”* Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Malang. 2009.
- Mutmainah, Imroatul dan Hendry Cahyono, *“Strategi Pengembangan Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Kabupaten Lamongan,”* Journal Of Economics Volume 1, Nomor 1, (2021).
- Nalle, Frederic Winston, *” Peran Sektor Unggulan Dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Inklusif Di Kabupaten Timor Tengah Utara,”* Jurnal AGRIFOR Volume 21 No.2, (2022).

- Ndoen, Aldy Cornelis, Skripsi, "*Strategi Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor Unggulan di Kabupaten Rote Ndao Provinsi Nusa Tenggara Timur,*" Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Cendana Kupang, 2022.
- Negara, Andi Kurniawan Karta & Aning Kesuma Putri, "*Analisis Sektor Unggulan Kecamatan Toboali dengan Metode Shift Share dan Location Share,*" Jurnal Ekonomi Vol.8, No.1 (2020).
- Nugroho, Bayu Catur, Skripsi, "*Analisis Skala Prioritas Penanganan Bendungan Cengklik dengan Metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA),*" Program Studi Diploma III Teknik Sipil Sekolah Vokasi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2021.
- Nur, Muhammad dkk, "*Potensi Pertumbuhan Ekonomi dan Sektor Unggulan Dalam Perekonomian Kota Pare-Pare*" Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. VII No.2 (2021)
- Purba, Bonaraja dkk, "*Ekonomi Pembangunan,*" Cetakan ke-1 (Yogyakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Puspitasari, Niken dan Farida Rahmawati, "*Analisis Indeks Daya Saing dan Pengaruh Sektor Pariwisata dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah Kota Batu,*" OECONOMICUS Journal of Economics Vol. 6, No. 2, (2022).
- Putri, Lucky Riana, "*Pengaruh Pariwisata Terhadap Peningkatan PDRB Kota Surakarta,*" Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret, 2020.
- Prakananda, Muhammad Ilyas dkk, "*Rancangan Website Penyedia Informasi Potensi Lokal Dengan Menggunakan Multi Criteria Decision Analysis Dan Map Engine,*" UPN Veteran Yogyakarta, 2013.
- Priyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif,*" Edisi Revisi (Surabaya: Zifatama Publishing, 2008).
- Rachman, Ircham Adri Nur, "*Analisis Sektor Unggulan Dalam Perekonomian Kabupaten Malang,*" Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, 2019.
- Rachman Jaya dkk, "*Implementasi Multi Criteria Decision Making (MCDM) Pada Agroindustri: Suatu Telaah Literatur,*" Jurnal Teknologi Industri Pertanian Volume 30, No.2 (2020).

- Rajab, Abdul & Rusli, “*Penentuan Sektor-Sektor Unggulan yang ada pada Kabupaten Takalar Melalui Tipologi Klassen,*” *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* Volume 1, No. 1 (2019).
- Rismayanti, ” “*Analisis Potensi Sektoral dalam Perencanaan Pembangunan Ekonomi,*” *Gorontalo Development Review (GOLDER)* Vol. 4 No. 2, (Oktober 2021).
- Saaty, T. L.. “*Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin Proses Hirarki Analitik untuk Pengambilan Keputusan dalam Situasi yang Kompleks,*” (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1993).
- Setiyaningrum, Anik, Skripsi, “*Analisis Strategi Pengembangan Sektor Ekonomi Potensial Sebagai Upaya Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus*”, Universitas Brawijaya Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik, 2014.
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),*” Cetakan ke-22 (Bandung: Alfabeta, 2015).
- Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D,*” Cetakan ke-19 (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Thantawi dkk, “*Prioritas Penanganan Jalan Kabupaten Pidie Menggunakan Metode Analisis Multi Kriteria (AMK),*” *Jurnal Arsip Rekayasa Sipil dan Perencanaan* Vol.3 No.4, (2020).
- Tumangkeng, Steeva, “*Analisis Potensi Ekonomi di Sektor dan Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kota Tomohon,*” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 18, No.01 (2018).
- Uar, Aty dan Hadija Madubun, “*Strategi Pengembangan Sektor-Sektor Unggulan Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah Kabupaten Maluku Tenggara ,*” *Jurnal Hipotesa* Volume 15, No. 1 (Mei 2021).
- Yasir, Jibria Ratna & Rhea Irwan, “*Analisis Ekonomi Pengembangan Aren Berkelanjutan (Studi Kasus: Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara),*” Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.



IAIN PALOPO



*Lampiran 1 : Data PDRB ADHK Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018-2022*

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,721,222.4	3,806,792.7	3,722,525.5	3,925,725.4	4,061,190.6
Pertambangan dan Pengalihan	136,585.8	148,523.0	152,998.6	157,885.8	155,710.6
Industri Pengolahan	313,777.9	367,850.1	358,505.7	375,983.6	380,327.2
Pengadaan Listrik dan Gas	10,356.8	11,148.3	11,805.8	12,109.3	12,674.7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	343.6	373.1	393.9	407.5	438.2
Konstruksi	849,396.5	968,446.7	958,020.3	970,302.7	1,027,340.5
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	873,028.0	989,073.9	976,017.9	994,057.4	1,041,144.2
Transportasi dan Pergudangan	151,973.6	174,219.2	158,694.4	159,872.1	177,952.4
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	81,990.5	92,486.9	84,354.5	86,842.2	92,962.3
Informasi dan Komunikasi	315,990.5	350,717.9	386,683.5	406,992.8	451,032.0
Jasa keuangan dan Asuransi	108,338	111,639.7	118,518.2	129,605.2	129,312.4
Real Estate	220,573.8	233,813.8	240,228.0	243,350.2	247,371.5
Jasa Perusahaan	1,365.3	1,546.7	1,422.8	1,487.4	1,578.6
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	358,570.8	395,614.0	398,803.3	406,042.2	433,009.9
Jasa Pendidikan	460,029.2	488,495.2	515,553.8	526,956.1	569,349.8
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,544.0	78,086.2	86,064.2	91,667.5	93,314.5
Jasa Lainnya	2,109.9	2,371.1	2,149.3	2,211.7	2,258.5
<b>Total PDRB</b>	<b>7,675,196.6</b>	<b>8,221,198.6</b>	<b>8,172,739.7</b>	<b>8,491,499.1</b>	<b>8,876,967.9</b>

Lampiran 2 : Data PDRB ADHB Kabupaten Luwu Utara Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.010.627,4	6.159.670,0	6.223.779,3	7.066.436,1	8.020.959,3
Pertambangan dan Penggalian	257.326,2	280.750,8	293.550,4	306.784,1	313.336,3
Industri Pengolahan	526.663,3	634.622,6	632.250,5	672.055,4	705.117,2
Pengadaan Listrik dan Gas	10.390,1	11.078,9	11.545,2	12.491,4	13.315,7
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	426,5	474,0	502,7	520,0	569,9
Konstruksi	1.429.443,4	1.712.470,9	1.697.421,3	1.790.570,8	2.010.818,3
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.140.186,8	1.330.691,4	1.339.520,7	1.388.595,1	1.517.752,0
Transportasi dan Pergudangan	247.662,3	285.909,7	268.145,9	289.896,0	346.240,7
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	131.824,3	151.880,4	143.260,9	149.387,4	164.885,4
Informasi dan Komunikasi	342.305,0	382.983,9	423.176,6	446.845,1	502.268,5
Jasa keuangan dan Asuransi	157.417,1	165.766,8	175.389,5	201.460,4	219.540,5
Real Estate	382.230,9	412.595,2	426.316,4	432.676,5	452.243,2
Jasa Perusahaan	2.108,8	2.435,4	2.286,3	2.434,2	2.696,3
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	564.614,1	638.013,4	653.906,3	672.134,5	721.313,3
Jasa Pendidikan	684.873,8	750.373,0	800.742,9	817.727,7	895.349,1
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	107.784,1	123.732,7	141.871,8	154.628,3	160.369,9
Jasa Lainnya	3.372,6	3.881,9	3.582,8	3.738,1	3.967,9
<b>Total PDRB</b>	<b>11.999.256,5</b>	<b>13.047.331,2</b>	<b>13.237.249,4</b>	<b>14.408.381,1</b>	<b>16.050.743,4</b>

Lampiran 3 : Data PDRB ADHK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	64.815,46	66.615,94	66.139,90	70.357,80	71.971,63
Pertambangan dan Pengalihan	16.788,76	17.237,90	17.330,64	17.228,08	17.283,69
Industri Pengolahan	40.786,59	44.830,63	42.781,92	44.075,32	48.421,55
Pengadaan Listrik dan Gas	292,44	310,62	318,67	353,30	405,21
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	363,43	369,70	394,15	410,19	436,78
Konstruksi	37.854,20	41.232,63	41.875,48	43.609,99	44.303,91
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47.115,92	51.376,92	49.799,33	53.035,21	56.510,16
Transportasi dan Pergudangan	11.777,68	11.982,70	9.410,66	9.901,00	12.111,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.612,02	4.907,93	4.236,64	4.361,95	5.135,60
Informasi dan Komunikasi	21.028,66	23.339,17	25.869,89	27.522,34	28.966,31
Jasa keuangan dan Asuransi	10.754,89	11.185,27	11.457,58	11.587,74	11.720,73
Real Estate	10.695,90	11.276,11	11.703,74	12.005,49	12.468,89
Jasa Perusahaan	1.363,67	1.507,22	1.355,80	1.440,27	1.644,24
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13.114,34	14.423,36	14.416,91	14.837,68	15.132,58
Jasa Pendidikan	17.217,12	18.410,59	19.465,08	20.178,62	20.750,36
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.208,38	6.708,17	7.382,80	7.956,36	8.643,79
Jasa Lainnya	4.366,71	4.791,50	4.215,38	4.534,06	4.967,33
<b>Total PDRB</b>	<b>309.156,19</b>	<b>330.506,38</b>	<b>328.154,57</b>	<b>343.395,41</b>	<b>360.874,18</b>

Lampiran 4 : Data PDRB ADHB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha PDRB	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	104.097,07	107.655,08	109.460,08	122.930,64	133.718,14
Pertambangan dan Penggalian	22.166,69	23.301,72	23.541,09	25.904,92	30.875,23
Industri Pengolahan	59.443,10	66.426,93	64.316,58	68.092,54	78.092,71
Pengadaan Listrik dan Gas	300,09	318,61	322,65	367,61	428,38
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	462,7	476,36	510,09	541,44	592,23
Konstruksi	62.568,95	71.164,18	72.415,57	78.560,75	84.725,07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	66.418,32	74.624,40	72.982,96	79.490,51	88.596,71
Transportasi dan Pergudangan	19.699,78	21.211,47	15.483,18	16.764,76	24.131,76
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.532,74	7.129,70	6.302,00	6.566,25	7.991,81
Informasi dan Komunikasi	22.779,85	25.485,62	28.309,67	30.297,13	32.345,58
Jasa keuangan dan Asuransi	17.278,62	18.429,94	18.914,62	19.793,43	21.681,00
Real Estate	17.144,39	18.407,59	19.214,27	19.747,55	21.121,93
Jasa Perusahaan	2.106,30	2.370,75	2.176,61	2.354,76	2.808,55
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20.654,25	23.328,53	23.749,39	24.674,03	25.330,32
Jasa Pendidikan	24.425,95	26.538,45	28.238,15	29.214,69	30.606,82
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.187,59	10.163,10	11.635,10	12.801,99	14.045,50
Jasa Lainnya	6.508,35	7.288,27	6.480,52	7.069,66	8.052,95
<b>Total PDRB</b>	<b>461.774,74</b>	<b>504.320,73</b>	<b>504.052,53</b>	<b>545.172,68</b>	<b>605.144,68</b>

Lampiran 5 : Hasil Analisis Shift Share

NO	Lapangan Usaha	Kabupaten		Provinsi		rij	rin	rn	rin-rn	rij-rin
		Luwu Utara		Sulawesi Selatan		(E'ij -Eij)/Eij	(E'in - Ein)/Ein	(E'n - En)/En		
		2018	2022	2018	2022					
1	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	3.721.222,4	4.061.190,6	64.815,46	71.971,63	0,091359	0,110408	0,167288	-0,056879	-0,019049
2	Pertambangan dan Penggalian	136.585,8	155.710,6	16.788,76	17.283,69	0,140020	0,029480		-0,137808	0,110541
3	Industri Pengolahan	313.777,9	380.327,2	40.786,59	48.421,55	0,212090	0,187193		0,019905	0,024898
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10.356,8	12.674,7	292,44	405,21	0,223805	0,385618		0,218330	-0,161813
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	343,6	438,2	363,43	436,78	0,275320	0,201827		0,034539	0,073493
6	Konstruksi	849.396,5	1.027.340,5	37.854,20	44.303,91	0,209495	0,170383		0,003095	0,039112
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	873.028,0	1.041.144,2	47.115,92	56.510,16	0,192567	0,199386		0,032098	-0,006819
8	Transportasi dan Pergudangan	151.973,6	177.952,4	11.777,68	12.111,42	0,170943	0,028337		-0,138951	0,142606
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	81.990,5	92.962,3	4.612,02	5.135,60	0,133818	0,113525		-0,053763	0,020293
10	Informasi dan Komunikasi	315.990,5	451.032,0	21.028,66	28.966,31	0,427359	0,377468		0,210181	0,049891
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	108.338,000	129.312,5	10.754,89	11.720,73	0,193602	0,089805		-0,077483	0,103798
12	Real Estate	220.573,8	247.371,5	10.695,90	12.468,89	0,121491	0,165764		-0,001524	-0,044273
13	Jasa Perusahaan	1.365,3	1.578,6	1.363,67	1.644,24	0,156229	0,205746		0,038459	-0,049517
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	358.570,8	433.009,9	13.114,34	15.132,58	0,207599	0,153896		-0,013392	0,053704
15	Jasa Pendidikan	460.029,2	569.349,8	17.217,12	20.750,36	0,237638	0,205217		0,037929	0,032422
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69.544,0	93.314,5	6.208,38	8.643,79	0,341805	0,392278		0,224990	-0,050473
17	Jasa Lainnya	2.109,9	2.258,5	4.366,71	4.967,33	0,070430	0,137545		-0,029742	-0,067115
<b>Total PDRB</b>		<b>7.675.196,60</b>	<b>8.876.968,00</b>	<b>309.156,17</b>	<b>360.874,18</b>					

NO	Lapangan Usaha	Nij	Mij	Cij	Dij
		Eij*rn	Eij (rin-rn)	Eij (rij-rin)	Nij + Mij + Cij
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	622.514,56	-211.660,42	-70.885,94	339.968,20
2	Pertambangan dan Penggalian	22.849,12	-18.822,59	15.098,27	19.124,80
3	Industri Pengolahan	52.491,17	6.245,83	7.812,31	66.549,30
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.732,56	2.261,20	-1.675,86	2.317,90
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	57,48	11,87	25,25	94,60
6	Konstruksi	142.093,55	2.629,13	33.221,32	177.944,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	146.046,80	28.022,48	-5.953,09	168.116,20
8	Transportasi dan Pergudangan	25.423,31	-21.116,88	21.672,38	25.978,80
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13.716,00	-4.408,02	1.663,82	10.971,80
10	Informasi dan Komunikasi	52.861,31	66.415,05	15.765,14	135.041,50
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	18.123,61	-8.394,34	11.245,24	20.974,50
12	Real Estate	36.899,27	-336,18	-9.765,39	26.797,70
13	Jasa Perusahaan	228,40	52,51	-67,61	213,30
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	59.984,47	-4.801,98	19.256,61	74.439,10
15	Jasa Pendidikan	76.957,21	17.448,45	14.914,94	109.320,60
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11.633,85	15.646,72	-3.510,07	23.770,50
17	Jasa Lainnya	352,96	-62,75	-141,61	148,60
<b>Total</b>		<b>1.283.965,62</b>	<b>-130.869,94</b>	<b>48.675,72</b>	<b>1.201.771,40</b>

IAIN PALOPO

Lampiran 6 : Hasil Analisis Tipologi Klassen

Lapangan Usaha PDRB Provinsi Sulawesi Selatan	Laju Pertumbuhan(%)				Rata-rata	Kontribusi( %)					Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,42	1,68	12,31	8,78	6,54	22,54	21,35	21,72	22,55	22,10	22,05
Pertambangan dan Penggalian	5,12	1,03	10,04	19,19	8,84	4,80	4,62	4,67	4,75	5,10	4,79
Industri Pengolahan	11,75	-3,18	5,87	14,69	7,28	12,87	13,17	12,76	12,49	12,90	12,84
Pengadaan Listrik dan Gas	6,17	1,27	13,93	16,53	9,48	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,95	7,08	6,15	9,38	6,39	0,10	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10
Konstruksi	13,74	1,76	8,49	7,85	7,96	13,55	14,11	14,37	14,41	14,00	14,09
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,36	-2,20	8,92	11,46	7,63	14,38	14,80	14,48	14,58	14,64	14,58
Transportasi dan Pergudangan	7,67	-27,01	8,28	43,94	8,22	4,27	4,21	3,07	3,08	3,99	3,72
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,14	-11,61	4,19	21,71	5,86	1,41	1,41	1,25	1,20	1,32	1,32
Informasi dan Komunikasi	11,88	11,08	7,02	6,76	9,19	4,93	5,05	5,62	5,56	5,35	5,30
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,66	2,63	4,65	9,54	5,87	3,74	3,65	3,75	3,63	3,58	3,67
Real Estate	7,37	4,38	2,78	6,96	5,37	3,71	3,65	3,81	3,62	3,49	3,66
Jasa Perusahaan	12,56	-8,19	8,18	19,27	7,96	0,46	0,47	0,43	0,43	0,46	0,45
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,95	1,80	3,89	2,66	5,33	4,47	4,63	4,71	4,53	4,19	4,50
Jasa Pendidikan	8,65	6,40	3,46	4,77	5,82	5,29	5,26	5,60	5,36	5,06	5,31
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,62	14,48	10,03	9,71	11,21	1,99	2,02	2,31	2,35	2,32	2,20
Jasa lainnya	11,98	-11,08	9,09	13,91	5,98	1,41	1,45	1,29	1,30	1,33	1,35
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>9,21</b>	<b>-0,05</b>	<b>8,16</b>	<b>11,00</b>	<b>7,08</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Lapangan Usaha PDRB Kabupaten Luwu Utara	Laju Pertumbuhan(%)				Rata-rata	Kontribusi(%)					Rata-rata
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,48	1,04	13,54	13,51	7,64	50,09	47,21	47,02	49,04	49,97	48,67
Pertambangan dan Penggalian	9,10	4,56	4,51	2,14	5,08	2,14	2,15	2,22	2,13	1,95	2,12
Industri Pengolahan	20,50	-0,37	6,30	4,92	7,84	4,39	4,86	4,78	4,66	4,39	4,62
Pengadaan Listrik dan Gas	6,63	4,21	8,20	6,60	6,41	0,09	0,08	0,09	0,09	0,08	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11,14	6,05	3,44	9,60	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi	19,80	-0,88	5,49	12,30	9,18	11,91	13,13	12,82	12,43	12,53	12,56
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,71	0,66	3,66	9,30	7,58	9,50	10,20	10,12	9,64	9,46	9,78
Transportasi dan Pergudangan	15,44	-6,21	8,11	19,44	9,19	2,06	2,19	2,03	2,01	2,16	2,09
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,21	-5,68	4,28	10,37	6,05	1,10	1,16	1,08	1,04	1,03	1,08
Informasi dan Komunikasi	11,88	10,49	5,59	12,40	10,09	2,85	2,94	3,20	3,10	3,13	3,04
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,30	5,80	14,86	8,97	8,74	1,31	1,27	1,32	1,40	1,37	1,33
Real Estate	7,94	3,33	1,49	4,52	4,32	3,19	3,16	3,22	3,00	2,82	3,08
Jasa Perusahaan	15,49	-6,12	6,47	10,77	6,65	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,00	2,49	2,79	7,32	6,40	4,71	4,89	4,94	4,66	4,49	4,74
Jasa Pendidikan	9,56	6,71	2,12	9,49	6,97	5,71	5,75	6,05	5,68	5,58	5,75
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,80	14,66	8,99	3,71	10,54	0,90	0,95	1,07	1,07	1,00	1,00
Jasa lainnya	15,10	-7,70	4,33	6,15	4,47	0,03	0,03	0,03	0,03	0,02	0,03
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	8,73	1,46	8,85	11,40	7,61	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Lapangan Usaha	Prov Sulsel		Kab Luwu Utara		Hasil		Kuadran
	Rata-Rata Pertumbuhan	Rata-Rata Kontribusi	Rata-Rata Pertumbuhan	Rata-Rata Kontribusi			
	(s)	(Sk)	(Si)	(Ski)			
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6,54	22,05	7,64	48,67	ski>sk	si>s	<b>I</b>
Pertambangan dan Penggalian	8,84	4,79	5,08	2,12	ski<sk	si<s	<b>IV</b>
Industri Pengolahan	7,28	12,84	7,84	4,62	ski<sk	si>s	<b>III</b>
Pengadaan Listrik dan Gas	9,48	0,07	6,41	0,09	ski>sk	si<s	<b>II</b>
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,39	0,10	7,56	0,00	ski<sk	si>s	<b>III</b>
Konstruksi	7,96	14,09	9,18	12,56	ski<sk	si>s	<b>III</b>
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,63	14,58	7,58	9,78	ski<sk	si<s	<b>IV</b>
Transportasi dan Pergudangan	8,22	3,72	9,19	2,09	ski<sk	si>s	<b>III</b>
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,86	1,32	6,05	1,08	ski<sk	si>s	<b>III</b>
Informasi dan Komunikasi	9,19	5,30	10,09	3,04	ski<sk	si>s	<b>III</b>
Jasa Keuangan dan Asuransi	5,87	3,67	8,74	1,33	ski<sk	si>s	<b>III</b>
Real Estate	5,37	3,66	4,32	3,08	ski<sk	si<s	<b>IV</b>
Jasa Perusahaan	7,96	0,45	6,65	0,02	ski<sk	si<s	<b>IV</b>
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,33	4,50	6,40	4,74	ski>sk	si>s	<b>I</b>
Jasa Pendidikan	5,82	5,31	6,97	5,75	ski>sk	si>s	<b>I</b>
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,21	2,20	10,54	1,00	ski<sk	si<s	<b>IV</b>
Jasa lainnya	5,98	1,35	4,47	0,03	ski<sk	si<s	<b>IV</b>
<b>Total</b>	<b>7,08</b>	<b>100,00</b>	<b>7,61</b>	<b>100,00</b>			

*Lampiran 7 : Analisis Overlay (Gabungan)*

Lapangan Usaha	Overlay	
	<i>Shift Share</i>	<i>Tipologi Klassen</i>
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	+	+
Pertambangan dan Penggalian	+	-
Industri Pengolahan	+	-
Pengadaan Listrik dan Gas	+	-
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	+	-
Konstruksi	+	-
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	+	-
Transportasi dan Pergudangan	+	-
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	+	-
Informasi dan Komunikasi	+	-
Jasa Keuangan dan Asuransi	+	-
Real Estate	+	-
Jasa Perusahaan	+	-
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	+	+
Jasa Pendidikan	+	+
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	+	-
Jasa lainnya	+	-

IAIN PALOPO

Lampiran 8 : Analisis Multi Criteria Decision Analysis (MCDA)

a. Perhitungan Kriteria

1) Normalisasi

KRITERIA	K1	K2	K3	K4	K5
K1	1	0,3	0,28	1,16	2,14
K2	3,33	1	1,16	1,78	2,94
K3	3,57	0,86	1	1,16	1,97
K4	0,86	0,56	0,86	1	2,28
K5	0,47	0,34	0,51	0,44	1
JUMLAH	9,23	3,06	3,81	5,54	10,33

2) Matrix hasil normalisasi

KRITERIA	K1	K2	K3	K4	K5	JUMLAH	BOBOT/PRIORITAS
K1	0,11	0,10	0,07	0,21	0,21	0,70	0,139
K2	0,36	0,33	0,30	0,32	0,28	1,60	0,320
K3	0,39	0,28	0,26	0,21	0,19	1,33	0,266
K4	0,09	0,18	0,23	0,18	0,22	0,90	0,181
K5	0,05	0,11	0,13	0,08	0,10	0,47	0,094
JUMLAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,00

3) Mengukur Konsisten Logis dengan menguji Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR)

(a) Mencari Vektor [X]

Rumus:

$$\text{Vektor [X]} = A \times W$$

Keterangan:

A = Matrix awal

B = Bobot Prioritas

$$\text{Vektor [X]} = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 & 0,28 & 1,16 & 2,14 \\ 3,33 & 1 & 1,16 & 1,78 & 2,94 \\ 3,57 & 0,86 & 1 & 1,16 & 1,97 \\ 0,86 & 0,56 & 0,86 & 1 & 2,28 \\ 0,47 & 0,34 & 0,51 & 0,44 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,139 \\ 0,320 \\ 0,266 \\ 0,181 \\ 0,094 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,72 \\ 1,69 \\ 1,43 \\ 0,92 \\ 0,48 \end{bmatrix}$$

(b) Mencari Vektor [Y]

Rumus:

$$\mathbf{Vektor [Y] = Vektor [X] / W}$$

Keterangan:

W= Bobot Prioritas

$$\mathbf{Vektor [Y] = \begin{bmatrix} 0,72 \\ 1,69 \\ 1,43 \\ 0,92 \\ 0,48 \end{bmatrix} \div \begin{bmatrix} 0,139 \\ 0,320 \\ 0,266 \\ 0,181 \\ 0,094 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5,18 \\ 5,29 \\ 5,39 \\ 5,11 \\ 5,12 \end{bmatrix}}$$

(c) Menghitung  $\lambda_{maks}$

Rumus:

$$\lambda_{maks} = \mathbf{Jumlah\ elemen\ Vektor\ [Y] \div n}$$

Keterangan:

$\lambda_{maks}$  = Maximum Eigenvalue

n = Jumlah Elemen

$$\begin{aligned} \lambda_{maks} &= 5,18 + 5,29 + 5,39 + 5,11 + 5,12 \div (5) \\ &= 26,09 \div 5 \\ &= 5,22 \end{aligned}$$

(d) Menghitung CI

Rumus:

$$\mathbf{CI = \lambda_{maks} - n \div n-1}$$

$$\begin{aligned} CI &= 5,22 - 5 \div 5-1 \\ &= 0,22 \div 4 \\ &= 0,0547 \end{aligned}$$

(e) Menghitung CR

Rumus:

$$\mathbf{CR = CI/RI}$$

$$CR = 0,0547 \div 1,12 = 0,049$$

Berdasarkan pengujian di atas, diperoleh  $CR = 0,049 < 0,1$ . Maka data tentang perbandingan berpasangan antar kriteria konsisten atau diterima.

RI adalah indeks random konsistensi (inkonsistensi). Jika nilai CR < 0,1 berarti hasil perhitungan data dapat dibenarkan. Sedangkan jika CR > 0,1, maka data tidak dapat digunakan dan perlu direvisi.

## b. Perhitungan Alternatif strategi

a) Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

➤ Penilaian alternatif pada kriteria mengurangi angka kemiskinan

### 1) Normalisasi

ALTERNATIF	A1	A2	A3	A4	A5
A1	1	1,73	0,28	1,16	0,44
A2	0,58	1	1,16	1,97	1,16
A3	3,57	0,86	1	1,65	1,73
A4	0,86	0,51	0,61	1	0,38
A5	2,27	0,86	0,58	2,63	1
JUMLAH	8,28	4,96	3,62	8,41	4,71

### 2) Matrix hasil normalisasi

ALTERNATIF	A1	A2	A3	A4	A5	JUMLAH	BOBOT/PRIORITAS
A1	0,12	0,35	0,08	0,14	0,09	0,78	0,156
A2	0,07	0,20	0,32	0,23	0,25	1,07	0,214
A3	0,43	0,17	0,28	0,20	0,37	1,44	0,289
A4	0,10	0,10	0,17	0,12	0,08	0,57	0,115
A5	0,27	0,17	0,16	0,31	0,21	1,13	0,227
JUMLAH	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	5,00	1,000

### 3) Mengukur Konsisten Logis dengan menguji Consistency Index (CI) dan Consistency Ratio (CR)

(a) Mencari Vektor [X]

Rumus:

$$\text{Vektor [X]} = \text{A X W}$$

Keterangan:

A = Matrix awal

B = Bobot Prioritas

Cara perhitungan untuk penentuan alternatif strategi pengembangan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, dan untuk sektor jasa pendidikan adalah sama yaitu berdasarkan kriteria yang telah ditentukan (mulai dari langkah pertama sampai ketiga hingga menghasilkan nilai CR < 0,1%)

$$\text{Vektor [X]} = \begin{bmatrix} 1 & 1,73 & 0,28 & 1,16 & 0,44 \\ 0,58 & 1 & 1,16 & 1,97 & 1,16 \\ 3,57 & 0,86 & 1 & 1,65 & 1,73 \\ 0,86 & 0,51 & 0,61 & 1 & 0,38 \\ 2,27 & 0,86 & 0,58 & 2,63 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,156 \\ 0,214 \\ 0,289 \\ 0,115 \\ 0,227 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,84 \\ 1,13 \\ 1,61 \\ 0,62 \\ 1,23 \end{bmatrix}$$

(b) Mencari Vektor [Y]

Rumus:

$$\text{Vektor [Y]} = \text{Vektor [X]} / W$$

Keterangan:

W= Bobot Prioritas

$$\text{Vektor [Y]} = \begin{bmatrix} 0,84 \\ 1,13 \\ 1,61 \\ 0,62 \\ 1,23 \end{bmatrix} \div \begin{bmatrix} 0,156 \\ 0,214 \\ 0,289 \\ 0,115 \\ 0,227 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5,40 \\ 5,26 \\ 5,58 \\ 5,40 \\ 5,45 \end{bmatrix}$$

(c) Menghitung  $\lambda_{maks}$

Rumus:

$$\lambda_{maks} = \text{Jumlah elemen Vektor [Y]} \div n$$

keterangan:

$\lambda_{maks}$  = Maximum Eigenvalue

n = Jumlah Elemen

$$\begin{aligned} \lambda_{maks} &= 5,40 + 5,26 + 5,58 + 5,40 + 5,45 \div (5) \\ &= 27,08 \div 5 \\ &= 5,415 \end{aligned}$$

(d) Menghitung CI

Rumus:

$$CI = \lambda_{maks} - n \div n - 1$$

$$\begin{aligned} CI &= 5,415 - 5 \div 5 - 1 \\ &= 0,42 \div 4 \\ &= 0,104 \end{aligned}$$

Perhitungan penilaian alternatif strategi berdasarkan setiap kriteria: (a) mengurangi angka kemiskinan, (b) meningkatkan pendapatan asli daerah, (c) menumbuhkan tingkat kesejahteraan masyarakat, (d) meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan (e) meningkatkan daya saing daerah. Setelah dihitung dan diperoleh hasil yang konsisten, maka langkah selanjutnya akan dilakukan perhitungan prioritas global dari setiap sektor.

(e) Menghitung CR

Rumus:

$$CR = CI/RI$$



*Lampiran 9 : Dokumentasi Penelitian*



Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah  
(Bapak Muhammad Khalis, ST.,M.Si)



Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan  
(Bapak Ovan Patuang Putra, ST.,M.Si)





Ahli Muda/ Sub Koordinator Bidang Penelitian dan Pengembangan  
(Ibu Kumalasari, S.AN)



Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia  
(Bapak Basrun, SP)

Lampiran 10 : Surat Izin Meneliti

  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**  
Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

---

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor : 00523/00215/SKP/DPMPTSP/V/2023

Membaca : Permohonan Surat Keterangan Penelitian an. Anistia Alvya beserta lampirannya.  
Menimbang : Hasil Verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Utara Nomor 070/196-V/Bakesbangpol/2023  
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
6. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Memberikan Surat Keterangan Penelitian Kepada :  
Nama : Anistia Alvya  
Nomor Telepon : 082290505541  
Alamat : Dsn. Sidorejo, Desa Sidomukti Kecamatan Bone-Bone, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Sekolah / : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo  
Instansi  
Judul Penelitian : Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kab. Luwu Utara  
Lokasi : Bapelitbangda, Kelurahan Bone Tua Kecamatan Masamba, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan  
Penelitian

Dengan ketentuan sebagai berikut  
1. Surat Keterangan Penelitian ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei s/d 29 Juni 2023 (1 Bulan).  
2. Mematuhi semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.  
3. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang surat ini tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan batal dengan sendirinya jika bertentangan dengan tujuan dan/atau ketentuan berlaku.

Ditetbitkan di : Masamba  
Pada Tanggal : 22 Mei 2023

  
BUPATI LUWU UTARA  
Dinas Penanaman Modal dan  
an Terpadu Satu Pintu  
**IR. RI. UDDIN SUKRI, MSI**  
196512311997031060

Retribusi : Rp. 0,00  
No. Seri : 00523

**DPMPTSP**  
www.dpmptsp.luwuutara.go.id

Lampiran 11 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

  
**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
**(BAPPELITBANGDA)**  
*Jl. Simpursiang No. 27 Kantor Gabungan Dinas Lt. III Masamba*

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 000.9.2 / 263 / Bappelitbangda

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : FATMAWATI BASO AMIR, S.Sos
2. NIP : 198008282001122001
3. Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk. I ( III/d )
4. Jabatan : Kepala Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
5. Instansi : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
6. Unit Kerja : Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa an :

1. Nama : ANISTIA ALVIA
2. NIM : 19 0401 0154
3. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo
4. No. HP/WA : 0822 9050 5541

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Luwu Utara dengan Judul Penelitian "*Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara*".

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Masamba, 13 Juni 2023

An. KEPALA BADAN  
Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

  
**FATMAWATI BASO AMIR, S.Sos**  
Pkt. Penata Tk. I  
NIP. 198008282001122001

IAIN PALOPO

## Lampiran 12 : SK Penguji

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO  
NOMOR : 116 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM  
NEGERI (IAIN) PALOPO

---

- I. Nama Mahasiswa : Anistia Alvia  
NIM : 19 0401 0154  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara.
- III. Dosen Pembimbing dan Penguji :
- Ketua Sidang : Dr. Takdir, S.H., M.H.  
Sekretaris : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.  
Pembimbing : Jitria Ratna Yasir, S.E., M.Si  
Penguji Utama (I) : Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si  
Pembantu Penguji (II) : Umar, S.E., M.SE.

Palopo, 28 Februari 2023

a.n. Rektor  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



# IAIN PALOPO

## Lampiran 13 : Nota Dinas Pembimbing

Jibria Ratna Yasir, S.E.,M.Si

---

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Anistia Alvia  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di-  
Palopo

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

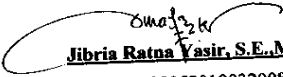
Nama : Anistia Alvia  
NIM : 1904010154  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara

menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palopo, 30 Agustus 2023  
Pembimbing

  
**Jibria Ratna Yasir, S.E.,M.Si**  
NIP. 198508052019032008



IAIN PALOPO

## Lampiran 14 : Halaman Persetujuan Pembimbing

### HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama skripsi berjudul: *Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara*

Yang ditulis oleh :

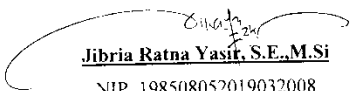
Nama : Anistia Alvia  
NIM : 1904010154  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Ekonomi Syariah

menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Palopo, 20 Agustus 2023

Pembimbing

  
**Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si**

NIP. 198508052019032008



## Lampiran 15 : Nota Dinas Penguji

Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si  
Umar, SE., M.SE  
Jibria Ratna Yasir, S.E., M.Si

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Anistia Alvia  
Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di-  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Anistia Alvia  
NIM : 1904010154  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara

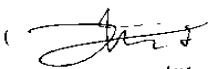
maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

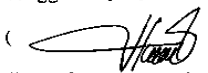
1. Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si

Penguji I

(  )  
Tanggal : 29 Agustus 2023

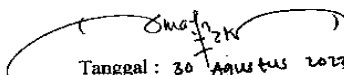
2. Umar, SE., M.SE

Penguji II

(  )  
Tanggal : 29 Agustus 2023

3. Jibria Ratna Yasir, SE., M.Si

Pembimbing Utama/Penguji

(  )  
Tanggal : 30 Agustus 2023



IAIN PALOPO

## Lampiran 16 : Halaman Persetujuan Penguji

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara yang ditulis oleh Anistia Alvia Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 19 0401 0154, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari selasa, tanggal 22 Agustus 2023 bertepatan dengan 5 Safar 1445 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI

(Ketua Sidang/Penguji)

(  )


2. Dr. Fasiha, M.El

(Sekretaris Sidang/Penguji)

(  )

3. Abd. Kadir Arno, SE.Sy., M.Si

(Penguji I)

(  )

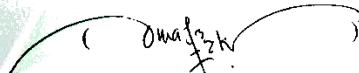
4. Umar, SE., M.SE

(Penguji II)

(  )

5. Jibria Ratna Yasir, SE., M.Si

(Pembimbing Utama/Penguji)

(  )



IAIN PALOPO



Lampiran 17 : Halaman Verifikasi Naskah

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Anistia Alvia

Kepada Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Di-  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Anistia Alvia

NIM : 1904010154

Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten Luwu Utara  
menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Tim Verifikasi

1. Hardianti Yusuf, S.E.,Sy., M.E.

Tanggal : 29 Agustus 2023

2. Kamriani, S.Pd.

Tanggal: 31 Agustus 2023

(  )  
(  )

  
IAIN PALOPO

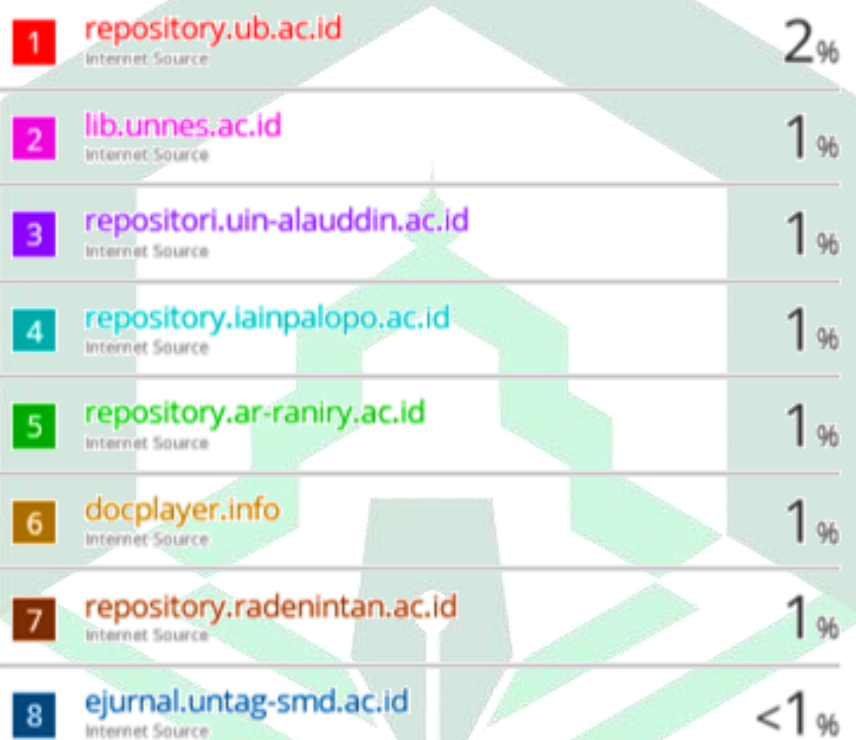
Lampiran 18 : Hasil Cek Plagiasi

Analisis Sektor Unggulan dan Strategi Pengembangannya  
Dalam Meningkatkan Potensi Ekonomi Daerah di Kabupaten  
Luwu Utara

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES



Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

IAIN PALOPO

## RIWAYAT HIDUP



**Anistia Alvia**, lahir di Desa Sidomukti pada tanggal 19 Juni 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Jumari dan Ibu Asmiati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Sidomukti, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2013 di SDN 199 Sidomukti. Kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Bone-Bone hingga tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di UPT SMK Negeri 1 Luwu Utara. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMK pada tahun 2019, penulis kembali melanjutkan pendidikan tingkat S1 di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dengan mengambil Program Studi (Prodi) Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

contact person penulis : *anistia\_alvia0154\_mhs19@iainpalopo.ac.id*

IAIN PALOPO